

**HASIL PENELITIAN KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2017**

**JUDUL PENELITIAN
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH PENDIDIKAN DEMOKRASI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**



Oleh

Dr. Nasiwan, M.Si.
Satriyo Wibowo, M.Pd.
Drs. Agus Sudarsono, M.Pd.
Ratnasari
Septi Dewi Susanti

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

ABSTRAK

Oleh: Nasiwan, Satriyo, Raras G

Pengembangan bahan ajar untuk ilmu-ilmu sosial yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) termasuk di dalamnya untuk mata kuliah Pendidikan Politik dan Demokrasi perlu diorientasikan untuk melahirkan karakteristik keilmuan yang bercorak keindonesian, sejalan dengan visi yang disepakati oleh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial. Berkaitan dengan gagasan untuk membangun ilmu-ilmu Sosial yang berkarakter keindonesiaan maka perlu dirintis suatu ikhtiar akademik untuk menyusun suatu bahan ajar yang memiliki relevansi dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Sejalan dengan gagasan tersebut maka untuk mata kuliah pendidikan politik dan demokrasi kiranya perlu disusun suatu modul “Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengembangkan bahan ajar IPS untuk topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal dan bagaimana efektivitas bahan ajar IPS dengan topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS.

Desain penelitian menggunakan metode penelitian *Research and Development* dan alur penelitian yang dijelaskan pada Gambar 2. Fase *define* atau *research and information collection* (Borg dan Gall, 1983: 776) merupakan fase penelitian dan pengumpulan data awal berupa studi literatur, analisis kebutuhan dan studi lapangan. Fase *design* atau *planning* (Borg dan Gall, 1983: 777) merupakan rancangan produk yang akan dihasilkan, meliputi tujuan penggunaan produk, pengguna produk dan deskripsi komponen-komponen produk. Fase *develop* atau *develop preliminary form of product* (Borg dan Gall, 1983: 781) merupakan pengembangan produk awal. Fase *Disseminate* ada empat langkah pengembangan, yaitu *preliminary field testing* (Borg dan Gall, 1983: 782) yang merupakan uji coba lapangan awal, *main product revision* (Borg dan Gall, 1983: 782) atau revisi hasil uji coba, *main field testing* (Borg dan Gall, 1983: 783) atau uji coba lapangan utama serta *operational product revision* (Borg dan Gall, 1983: 784) atau penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan.

Hasil penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar berupa modul Nilai-nilai Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dihasilkan melalui empat tahap yaitu tahap *define*, *design*, *development* dan *deseminasi*. Modul Nilai-nilai Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal setelah diujicobakan secara terbatas pada mahasiswa semester 5 Pendidikan IPS dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan beberapa perbaikan.

LEMBAR PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN KELOMPOK

1. Judul Penelitian : PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH
PENDIDIKAN DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN
LOKAL
2. Ketua Peneliti :
a. Nama lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.
b. Jabatan : Lektor Kepala
c. Program Studi : Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial - SI
d. Alamat : Kradenan RT.10/ RW.69, Maguwoharjo, Depok, Sleman
e. Telepon : +6281578007988
f. e-mail : nasiwan@uny.ac.id
3. Bidang Keilmuan : Pendidikan
4. Skim : Penelitian Kelompok
5. Tema Penelitian Payung : Kurikulum pendidikan kearifan lokal
6. Sub Temap Penelitian Payung :
7. Kelompok Peneliti :


No	Nama, Gelar	NIP	Bidang Keahlian
1.	Satriyo Wibowo, M.Pd.	19741219 200812 1 001	
2.	Drs. Agus Sudarsono, M.Pd.	19530422 198011 1 001	

8. Mahasiswa yang terlibat :


No	Nama	NIM	Prodi
1.	Ratnasari	13416241008	Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial
2.	Septi Dewi Susanti	13416241020	Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial

9. Lokasi Penelitian : FIS Universitas Negeri Yogyakarta
10. Waktu Penelitian : 1 Juni 2017 s/d 30 November 2017
11. Dana yang diusulkan : Rp. 10.000.000,00

Mengetahui,
Ketua Prodi PIPS FIS UNY


Dr. Nasiwan, M.Si.
NIP 19650417 200212 1 001

Yogyakarta, 30 Oktober 2017
Ketua Pelaksana


Dr. Nasiwan, M.Si.
NIP 19650417 200212 1 001

Menyetujui,
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP 19620321 198903 1 001

Daftar Isi

JUDUL PENELITIAN	i
ABSTRAK	ii
alaman Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
BAB II. KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Teori	7
B. Penelitian yang Relevan.....	22
C. Kerangka Pikir.....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
G. Teknis Analisis Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengantar.....	33
B. Tahap define.....	33
C. Tahap Design.....	34
D. Development	35
Contoh Produk yang dihasilkan.....	36
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	129
Daftar Pustaka	130

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan bahan ajar untuk ilmu-ilmu Sosial yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) termasuk di dalamnya untuk mata kuliah Pendidikan Politik dan Demokrasi perlu diorientasikan untuk melahirkan karakteristik keilmuan yang bercorak keindonesian, sejalan dengan visi yang disepakati oleh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial.

Berkaitan dengan gagasan untuk membangun ilmu-ilmu Sosial yang berkarakter keindonesiaan maka perlu dirintis suatu ikhtiar akademik untuk menyusun suatu bahan ajar yang memiliki relevansi dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Sejalan dengan gagasan tersebut maka untuk mata kuliah pendidikan politik dan demokrasi kiranya perlu disusun suatu modul “Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal”.

Bahan ajar yang terkait dengan gagasan demokrasi perlu sekali dibangun di atas nilai-nilai kearifan lokal, hal tersebut seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi pada masyarakat Indonesia, termasuk pemahaman pada nilai-nilai demokrasi yang ditengarai sudah cenderung liberal.

Salah satu cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis. Kehidupan masyarakat yang demokratis ialah memandang bahwa setiap warga negara mempunyai tingkat kesetaraan yang sama, tidak membedakan latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, setiap individu tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengupayakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan pemerintah dan kehidupan masyarakat. Menurut Sunarso (2013: 80-81) kehidupan pemerintah dan kehidupan masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan yang terwujud dalam Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan prinsip demokrasi pada UUD 1945 terutama terdapat didalam pasal 27 ayat 1 bahwa dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa kecuali, pasal 28 bahwa setiap negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta pasal 31 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari pembentukan pemerintahan berdasarkan Pancasila adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpendidikan. Tujuan pendidikan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai sistem pendidikan nasional, bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan pendidikan dikembangkan pada iklim belajar mengajar dengan harapan dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang inovatif, kreatif dan mandiri. Pendidikan nasional diharapkan mampu mewujudkan manusia pembangunan dalam seluruh lapisan bangsa secara demokratis.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait akan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Menurut Ignas Kladen dikutip dari kompas.com (22/5/2014) beberapa pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi terjadi diberbagai bidang kehidupan, seperti tindakan diskriminasi pada suatu oknum tertentu (pelanggaran HAM), kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, *bullying*, adanya geng klithih, kasus pemilu, tindakan intoleran dan risiko demokrasi. Kasus tersebut rawan terjadi di Yogyakarta karena sebagai kota dengan beragam kultur masyarakat. Pelanggaran yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi dilakukan oleh elit-elit pemerintahan serta aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupannya.

Salah satu kasus yang terkait dengan pelanggaran demokrasi di masyarakat seperti dikutip dari kompas.com (12/5/2016) yaitu kasus kebebasan berkumpul dan berekspresi yang dinilai memburuk. Kasus ini paling banyak terjadi pada ranah kesenian dan ilmiah. Adapun kota yang tercatat sebagai kota yang paling banyak terjadi pelanggaran tersebut adalah Yogyakarta. Kasus pelanggaran demokrasi lain yang terjadi di daerah Yogyakarta adalah pelanggaran HAM yaitu pada penggrebagan di Asrama mahasiswa Papua yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi, terjadi kekerasan oleh

polisi, terjadinya tindakan intoleran oleh kelompok ormas dan lainnya. Kasus tersebut adalah salah satu yang melanggar nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat multikultur. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling dihormati, disetarakan, tidak membedakan latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi ini merupakan salah satu cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai demokrasi tercipta melalui pendidikan. Binti Maunah (2009: 217) menyebutkan pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada lingkungan sekolah, akan dapat mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik untuk kehidupannya kelak.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan juga masih terjadi pelanggaran. Adapun pelanggaran tersebut seperti yang dikutip pada www.edukasi.kompas.com meliputi kekerasan terhadap anak, perkelahian antar pelajar (tawuran), *bullying* serta interaksi antara guru dan peserta didik pada proses pembelajaran. Pada proses pendidikan diperlukan peran dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Lucy Irawati Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, yang dikutip dari liputan6.com (14/5/2016) kasus kekerasan terutama terhadap anak-anak di wilayah Kota Yogyakarta cukup memprihatinkan. Berbeda dengan kasus KDRT yang mengalami penurunan sedangkan kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan. Berdasarkan data, pada 2011 tercatat sebanyak 142 kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2012 menjadi 265 kasus, pada tahun 2013 menjadi 691, pada tahun 2014 sebanyak 642 kasus dan pada tahun 2015 626 kasus. Kasus tersebut harus dapat menjadi pembelajaran pada dunia pendidikan, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan dalam hal ini menjadi penting akan peranan dan fungsinya. Fungsi pendidikan yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 yaitu menjadikan suatu warga negara yang demokratis, hal ini dapat diwujudkan pada proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru dan peserta didik harus mengembangkan

keterbukaan serta saling berpartisipasi aktif. Guru memiliki andil besar dalam menghidupkan suasana demokratis selama proses pembelajaran.

Menurut Zamroni (2007: 65) nilai-nilai demokrasi harus diterapkan pada pembelajaran yang relevan salah satunya adalah diterapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan di masyarakatnya, sehingga dalam mempelajarinya harus dikaji secara empiris dengan kondisi masyarakatnya. Nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam proses pembelajaran yang memuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Peran penting dalam pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral (Huriah Rahmah, 2014: 107). Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan sebagai warga negara yang baik.

Apabila dilihat pada keadaan saat ini pelaksanaan pendidikan moral masih belum berhasil dilihat dari parameter kejahatan dan fenomena *bulliyning* yang sering melibatkan kalangan terdidik (Takdir Ilahi, 2014: 9). Penerapan pendidikan karakter disekolah masih mengalami banyak masalah terkait dengan nilai universal apa saja yang bisa diintegrasikan dalam desain kurikulum. Krisis karakter yang menimpa anak muda Indonesia, akan mempengaruhi kepribadian dan perilakunya pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini diperlukan adanya sebuah kerjasama dengan guru dalam pembelajaran di kelas. Akan tetapi kebanyakan guru masih berpaku pada tercapainya pengetahuan kognitif saja belum pada aspek lain.

Dibeberapa sekolah di Yogyakarta terdapat sekolah yang menerapkan ramah anak. Adapun prinsip sekolah ramah anak yang terdapat dalam UU No. 49 Tahun 2014 adalah adanya partisipasi, tidak ada diskriminasi, transparansi, penghargaan terhadap pendapat anak serta tanpa kekerasan. Salah satu tujuan sekolah ramah anak adalah menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.

Menurut hasil observasi pra penelitian yang dilakukan dengan pelajaran IPS di beberapa mahasiswa FIS UNY, nilai-nilai demokrasi masih belum diterapkan dengan

optimal. Hal ini dapat dilihat pada pemahaman siswa akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam sekolah, terutama siswa yang berada pada jenjang awal. Pemahaman siswa yang rendah akan nilai-nilai demokrasi ini menyebabkan sifat kesetaraan kurang berjalan selain itu pada sekolah ini terjadi kasus *bullying*. Adapun beberapa kasus *bullying* yang terjadi seperti mengejek, mencemooh, dan memalak yang dilakukan sesama peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya bahan ajar topk nilai demokrasi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat pada adanya pelanggaran nilai-nilai demokrasi.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pada nilai-nilai demokrasi.
3. Masih sering terjadi kasus pelanggaran nilai-nilai demokrasi di kehidupan masyarakat.
4. Masih adanya pelanggaran nilai-nilai demokrasi pada jenjang pendidikan.
5. Belum maksimalnya peranan pendidikan di sekolah dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi.
6. Belum diketahuinya integrasi nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa FIS UNY.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada belum tersedianya bahan ajar yang memadai untuk topic integrasi nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengembangkan baha ajar IPS untuk topic nilsai- nilai demorasi berbasis kearifan lokal?
2. Bagaimana efektivitas bahan ajar IPS dengan topic nilai-nilai demokrasio berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana mengembangkan baha ajar IPS untuk topic nilsai- nilai demorasi berbasis kearifan lokal.
2. Bagaimana efektivitas bahan ajar IPS dengan topic nilai-nilai demokrasio berbasis kearifan liokal dalam pembelajaran IPS .

F. Luaran

Dihasilkannya bahan ajar IPS untuk topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal berbentuk modul

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS FIS UNY Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan informasi bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di Jurusan Pendidikan IPS FIS UNY

b. Bagi Sekolah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada sekolah dan guru dalam integrasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran IPS.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Nilai-Nilai Demokrasi

a) Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, gabungan dua kata *demos-cratos* (demokrasi) atau *demos-cratein* memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Khomarudin Hidayat, 2008: 35). Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Demokrasi dipakai dalam berbagai level, mulai dari individu sampai suatu bangsa.

Menurut Josept Schumpeter pengertian demokrasi secara terminologi merupakan suatu perencanaan institusional dalam mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan atas suara rakyat (Ubaedillah & Abdul Razak, 2011: 3). Partisipasi rakyat pada pengambilan keputusan negara adalah andil terbesar. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya.

Menurut Robert Dahl (1985: 8) demokrasi adalah suatu kondisi penting dalam tertib politik paling sempurna di suatu negara yang mencakup dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Kehidupan demokrasi yang dianut pada masing-masing negara berbeda, begitu pula negara Indonesia. Demokrasi merupakan pilihan politik Indonesia sejak lahirnya sebuah negara yang dinilai sebagai sistem pemerintahan sempurna.

Pelaksanaan demokrasi mempunyai prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur kehidupannya yaitu persamaan dan kebebasan (Cholisin & Nasiwan, 2012: 85). Prinsip persamaan meliputi persamaan hak, politik, ekonomi dan sosial, sedangkan prinsip kebebasan meliputi kebebasan berpendapat, pers, agama, berkumpul dan berserikat secara adil. Persamaan dan kebebasan akan dapat berkembang apabila terdapat toleransi pada masyarakat yang saling berpartisipasi sehingga demokrasi akan dapat tercapai.

Pada kehidupan yang demokrasi peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam suatu keputusan negara memberikan rasa puas tersendiri dan kesetiaan pada bangsanya (Gabriel Almond, 1984: 252). Partisipasi dalam sebuah kehidupan masyarakat dijadikan sebagai panutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan negara harus dilakukan dengan tidak membedakan latar belakang sosial dan saling bertoleransi.

Kesejahteraan suatu bangsa tercipta apabila kehidupan masyarakatnya saling berdemokrasi. Demokrasi menjadi suatu penghormatan setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat dan memberikan peluang untuk mengambil peran dalam pembuatan kebijakan negara. Menurut Afan Gaffar (2006: 8) keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan negara adalah upaya dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis. Rakyat harus dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian demokrasi, dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi merupakan suatu kedaulatan yang menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dengan memegang prinsip kebebasan dan partisipasi. Keterlibatan masyarakat sangat berperan dalam suatu pengambilan keputusan negara guna mewujudkan kehidupan yang demokratis. Semua rakyat mempunyai hak yang sama dan tidak saling membedakan latarbelakang sosialnya.

Pada penelitian ini penulis mengambil teori mengenai pengertian demokrasi adalah suatu kondisi dalam tertib politik yang paling sempurna dengan prinsip yang dianut yaitu memegang teguh adanya kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat secara adil atas rakyat. Hal ini dikarenakan pada suatu kehidupan masyarakat harus saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Rakyat adalah kunci bagi demokrasi. kehidupan demokrasi sebagai upaya dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

b) Nilai-Nilai Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud apabila mengedepankan pada nilai-nilai demokrasi. Menurut John Dewey nilai-nilai demokrasi meliputi toleransi, menghargai pendapat, anti kekerasan, mencari solusi secara damai, dan mendahulukan kepentingan umum (Zamroni, 2013: 19). Kehidupan yang demokrasi merupakan suatu tujuan bersama pada suatu

negara, sehingga dalam sistem politiknya memerlukan warga negara yang memiliki watak dan jiwa demokratis.

Nilai-nilai demokrasi sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Nilai-nilai demokrasi harus dapat diterapkan pada masyarakat yang multikultur. Menurut Henry B. Mayo dalam Cholisin dan Nasiwan (2012: 89-90) menguraikan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi:

- 1) menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Hal ini terlihat pada fungsi kompromi atau kebijakan umum dan mayoritas.
- 2) menjamin terjadinya perubahan secara damai.
- 3) Pergantian penguasa dan pengatur. Pada demokrasi, suksesi kepemimpinan didasarkan pada pilihan atau penunjukan oleh orang banyak dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dalam suatu periode tertentu.
- 4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin. Pada pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik dalam demokrasi lebih mendasarkan pada kemauan umum untuk persuasif, dibanding melalui paksaan fisik dan non-fisik.
- 5) Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman. Demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keanekaragaman dan pentingnya saluran terbuka dan kebebasan politik.
- 6) Menegakan keadilan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur persamaan.
- 7) Memajukan ilmu pengetahuan. Pengakuan dan jaminan adanya persamaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi pikiran, kreativitas, daya inovasi, afeksi, maka hal ini akan memberikan motivasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehidupan demokrasi harus mampu menjunjung tinggi kesadaran akan perbedaan pendapat dari masing-masing individu. Tanpa adanya kesadaran, maka nilai demokrasi tidak dapat diwujudkan. Sikap menjunjung tinggi adanya

perbedaan pendapat dalam kehidupan demokrasi ini ditunjukkan dengan saling toleransi dan menghargai keanekaragaman.

Bentuk masyarakat demokratis akan kokoh apabila didalamnya tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi menurut Sunarso (2013: 272) meliputi toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, serta kebersamaan dan keseimbangan. Terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai demokrasi tercipta melalui pendidikan, yaitu pada kehidupan sekolah.

Menurut Zamroni (2007: 50) masyarakat demokratis akan tumbuh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi tersebut terdiri dari: 1) toleransi; 2) menghormati perbedaan pendapat; 3) memahami keanekaragaman masyarakat; 4) terbuka dalam menjunjung martabat manusia; 5) kebersamaan; 6) percaya diri; dan 7) saling menghormati. Nilai-nilai demokrasi tersebut harus menjadi kultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung nilai martabat manusia dalam setiap perbedaan adalah salah satu sikap yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi.

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang penting dimiliki oleh setiap individu. Adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu akan membantu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain. Sikap percaya diri harus ditanamkan sejak dini agar tercipta masyarakat demokratis.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai nilai-nilai demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah nilai-nilai yang melekat pada demokrasi yaitu meliputi toleransi, menghormati pendapat, memahami keanekaragaman masyarakat, menjunjung martabat manusia dan bebas berserikat. Nilai-nilai menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tinjauan Pendidikan Demokrasi

a) Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, dan mengenalkan konsep, prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perannya dalam masyarakat (Winataputra, 2006: 12). Salah satu cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terciptanya kehidupan yang demokratis. Pendidikan demokrasi diharapkan dapat memberikan contoh peserta didik agar menjadi warga negara yang sesuai pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Nurul Zuriah (2009: 2) pendidikan demokrasi bukan hanya untuk menyiapkan peserta didik dalam kehidupan mereka, tetapi sekolah sendiri harus menjadi sarana dalam praktik demokrasi yang perlu diadakan secara nyata. Pada kehidupan sekolah terdapat struktur yang sama dengan struktur masyarakat seperti adanya pemimpin, adanya masyarakat serta adanya aturan sehingga menjadi sarana dalam mempraktikkan kehidupan demokrasi.

Pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan *intellectual skill* serta *personal and social skill* (Khomarudin Hidayat, 2008: 5). Pendidikan demokrasi berorientasi pada pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis dan kreatif. Pendidikan menjadi salah satu upaya pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya generasi muda.

Pendidikan demokrasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Zamroni (2007: 66) pendidikan demokrasi mempunyai tujuan yaitu :

- 1) mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga memiliki sifat empati, respek, toleransi dan kepercayaan pada orang lain;
- 2) mengembangkan kesadaran selaku warga suatu bangsa;
- 3) meningkatkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional dan efisien;
- 4) meningkatkan kemampuan berkomunikasi diantara sesama warga.

Pendidikan sebagai sarana yang digunakan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, harus dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepribadian.

Menurut Darmaningtyas (1999: 171) bahwa pendidikan demokrasi adalah mengembangkan kepribadian dan watak individu agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan mengajarkan peserta didik agar menjadi masyarakat yang demokratis. Pendidikan harus mendasarkan pada prinsip kemanusiaan dan bertujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik, empati, toleransi dan memiliki pandangan sebagai warga negara.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas mengenai pengertian pendidikan demokrasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi adalah pendidikan untuk menjadikan warga negara mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Penulis mengambil teori mengenai pendidikan demokrasi yaitu sebagai upaya yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar menghayati dan mengamalkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai perannya di masyarakat. Pendidikan demokrasi diharapkan akan dapat berperan dalam masyarakat.

b) Pendidikan Demokrasi Di Sekolah

Sekolah merupakan sebuah masyarakat kecil (*mini-society*) sebagai tempat belajar dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari (Oemar Hamalik, 2009: 157). Sekolah sebagai lembaga pendidikan digunakan untuk mewujudkan norma, sikap dan nilai pada warga sekolah. Sekolah adalah sarana dalam menanamkan nilai karakter salah satunya yaitu demokratis.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat pelaksanaan pendidikan demokrasi secara formal yang dilaksanakan pada proses pembelajaran (H.A.R Tilaar, 2004: 59). Nilai-nilai demokrasi diharapkan tidak hanya akan berdampak pada kehidupan di kelas maupun sekolah, namun berdampak pada kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sekolah berperan penting dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Zamroni (2013: 23) pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah harus menekankan pada aspek, yaitu :

- 1) kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan maupun isi penting yang bermakna;

- 2) materi pendidikan demokrasi tidak hanya bersifat pengetahuan teoritis melainkan dipadukan *controversial issue* yang tengah merebak di masyarakat;
- 3) pelayanan dalam pendidikan demokrasi diberikan secara optimal kepada peserta didik;
- 4) dilaksanakannya pendidikan ekstrakurikuler dengan tujuan untuk memberikan kemampuan yang belum tercakup dalam pembelajaran intrakurikuler;
- 5) dikembangkannya partisipasi dalam pengelolaan sekolah, pengambilan keputusan bersama;
- 6) dilaksanakannya simulasi proses demokrasi disekolah seperti pada pemilihan ketua OSIS.

Pendidikan demokrasi di sekolah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan pada kurikulum pembelajaran yang relevan, salah satunya adalah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Eveline Siregar, 2011: 62). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji materi dengan mengaitkannya pada kondisi dan perkembangan masyarakat secara empiris. Salah satu tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah menjadikan suatu warga negara yang baik, sehingga penerapan pendidikan demokrasi tepat dilaksanakan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dilaksanakan pula melalui kultur sekolah yang merupakan suatu kebudayaan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah secara demokratis dan diperlukan adanya pengadaan kebiasaan, pola perilaku, peraturan sekolah, infrastruktur sekolah, kegiatan pembelajaran, interaksi antar warga sekolah dan program sekolah yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi (Siti Irene, 2009: 119).

Pendidikan demokrasi di sekolah dilaksanakan pada ruang kelas yang menyenangkan untuk belajar dan berupaya menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi (Nurul Zuriah, 2009: 19). Pada proses pembelajaran guru harus mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi tersebut, yaitu dengan menggunakan metode *cooperative learning*, *problem based learning* dan kerja kelompok. Pada proses pembelajaran juga harus terjadi dialog serta pengambilan keputusan yang mandiri agar dapat menarik peserta didik.

Berdasarkan pada pendapat para ahli mengenai pendidikan demokrasi di sekolah, maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah dilaksanakan pada kurikulum yaitu mengacu pada proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Penggunaan metode *cooperative learning*, *problem based learning* dan kerja kelompok akan dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Pada kegiatan sekolah peserta didik dilibatkan pada partisipasi yang menyangkut kegiatan sekolah.

3. Konsep Dasar Pembelajaran IPS

a) Pengertian Pembelajaran IPS

Ilmu pengetahuan Sosial adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Numan Sumantri, 2001: 44). Ilmu Pengetahuan Sosial berguna untuk mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang aktif. Ilmu Pengetahuan Sosial yang ada di sekolah memegang peranan penting dalam mempersiapkan peserta didik baik secara pengetahuan dan sikapnya.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdapat pada kurikulum 2013 untuk SMP/MTs merupakan mata pelajaran yang mengkaji isu-isu kemasyarakatan serta akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi (Dadan Supardan, 2015: 17). Unsur kajian dalam pembelajaran IPS meliputi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang terjadi dewasa ini. Proses pembelajaran IPS harus mampu membawa isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat dengan berbagai pendekatan ilmu sosial.

Pembelajaran IPS mencakup pada aspek pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap serta tindakan. Pembelajaran IPS dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai kajian akademik dan mata pelajaran (Sapriya, 2011: 12). Pembelajaran IPS sebagai kajian akademik bertujuan untuk mengkaji ilmu-ilmu sosial, sedangkan pembelajaran IPS sebagai mata pelajaran terdapat di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK sebagai mata pelajaran yang mengajarkan mengenai kajian ilmu sosial.

Pembelajaran IPS mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, dan sosial (Zubaedi, 2012: 287). Peserta didik harus mampu mengembangkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku warga negara dan warga dunia.

Pembelajaran IPS menjadi sarana dalam mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik sebagai warga negara.

Pembelajaran IPS menurut Trianto (2010: 56) dilaksanakan secara terpadu (*multidisipliner*) yang didasarkan pada; 1) proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir; 2) pembelajaran akan lebih bermakna; 3) memberikan peluang siswa mengembangkan kemampuan diri; 4) memperkuat kemampuan yang diperoleh dan 5) efisiensi waktu. Pembelajaran IPS terintegrasi dengan ilmu sosial lainnya yang saling mendukung yaitu pada geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah dan negara. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kehidupan masyarakat yang dinamis.

Menurut Supardi (2011: 184) tujuan pembelajaran IPS pada tingkat sekolah, yaitu:

- 1) menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama;
- 2) menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan;
- 3) menekankan reflektive inquiri;
- 4) mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya.

Melalui mata pelajaran IPS diharapkan peserta didik dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pada umumnya tujuan pembelajaran meliputi tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Abdul Ghofur, 2012: 80). Aspek kognitif menyangkut perilaku dalam proses berpikir dari hasil kerja otak, pada aspek afektif menyangkut perilaku yang dimunculkan untuk memilih keputusan serta aspek psikomotorik menyangkut perilaku yang mengacu pada hasil kerja fungsi tubuh manusia. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan interaksi yang saling mendukung.

Menurut Oemar Hamalik (2009: 57) bahwa proses pembelajaran harus mampu merespon kebutuhan masing-masing peserta didik. Hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran harus lebih bersifat dialogal (saling

dialog), saling membantu dan saling belajar. Proses pembelajaran tersebut akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Proses interaksi belajar mengajar adalah proses hubungan antara guru dengan peserta didik selama berlangsungnya pengajaran (Suryosubroto, 2002: 51). Proses interaksi tersebut harus saling menguntungkan diantara keduanya. Proses interaksi diantara keduanya harus menciptakan hubungan timbal balik yang sesuai dan baik. Sehingga dengan interaksi yang terjalin baik maka tujuan pembelajaran akan tercapai.

Menurut Soetomo (1993: 9) konsep interaksi dalam proses pembelajaran berbeda dengan konsep interaksi sosial pada umumnya. Apabila dalam interaksi sosial hanya menekankan pada kontak sosial dan komunikasi, sedangkan interaksi pada proses pembelajaran harus menunjukkan adanya hubungan yang bersifat edukatif yang mana diarahkan pada suatu tujuan tertentu yang mendidik dan adanya perubahan tingkah laku menuju kedewasaan.

Nana Sudjana (1987: 28) menjelaskan bahwa belajar mengajar adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, belajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seorang sebagai subjek yang menerima pelajaran sedangkan mengajar merujuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pengajar dengan memperhatikan konsep pada pembelajaran. Pada proses pembelajaran tersebut harus dapat terjalin interaksi yang baik diantara keduanya.

Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara aktif. Pembelajaran aktif sangat di perlukan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal bagi para peserta didik. Menurut Hisyam Zaini (2008: 23) pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik maupun berpartisipasi ketika proses pembelajaran secara aktif yang mana peserta didik yang mendominasi aktivitas pembelajaran tersebut.

Komponen dalam pembelajaran meliputi guru, siswa, sumber belajar, metode dan media pembelajaran (Wina Sanjaya, 2008: 15). Komponen tersebut harus dipenuhi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang baik. Masing-masing komponen mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling dihormati dan dihargai. Komponen tersebut harus saling melengkapi tugas dari masing-masing.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh beberapa pendapat para ahli diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pembelajaran IPS yaitu merupakan suatu kajian yang membahas mengenai fenomena serta isu-isu sosial dan cara penyelesaiannya menggunakan pendekatan ilmu sosial. Pembelajaran IPS disusun dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dengan menggunakan berbagai metode dan media yang sesuai.

b) Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS

Penanaman nilai karakter dalam pendidikan memberikan makna luas terhadap perkembangan pendidikan terutama di sekolah. Thomas Lickona (2012: 32) menyebutkan sekolah adalah sarana dalam upaya penanaman nilai yang akan berpengaruh pada perkembangan karakter peserta didik. Penanaman nilai memberikan arti penting bagi peningkatan kualitas pendidikan yang terintegrasi pada mata pelajaran, salah satunya pada pelajaran IPS.

Menurut Zamroni (2011: 108) ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang relevan dengan penerapan nilai. Pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Salah satunya pada nilai-nilai demokrasi, yang diterapkan dalam teori dan praktik.

Menurut Rohmat Mulyana (2011: 191) melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan nilai, etika dan moral diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan konsep dan prinsip untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nilai, etika dan moral tersebut diintegrasikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Peserta didik akan mempunyai daya saing global dalam menghadapi perkembangan zaman ini.

Peran penting dalam pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral (Huriah Rahmah, 2014: 107). Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan sebagai warga negara yang baik.

Pembentukan warga negara yang demokrasi terjadi pada proses pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian

bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda (Khomaruddin Hidayat, 2011: 10). Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter melalui cara-cara yang demokratis, partisipatif, kritis dan kreatif. Pendidikan menjadi milik bersama sebagai wadah untuk berdialog bersama.

Mekanisme sekolah yang demokratis adalah dengan membawa nilai-nilai demokrasi tersebut pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran (Dede Rosyada, 2007: 15-17). Kegiatan pembelajaran harus mengajarkan siswa mengenai nilai-nilai demokrasi. Tujuannya adalah agar terbentuk menjadi warga negara yang demokratis.

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga pendidikan menekankan pada adanya kebebasan dan keterbukaan (Binti Maunah, 2009: 220). Kebebasan dan keterbukaan tersebut harus tetap pada kontrol yang sesuai. Kebebasan disekolah merupakan hak individu masing-masing warga sekolah. Pendidikan harus mampu dalam memandang peserta didiknya dengan setara. Kesetaraan dapat dilihat pada kesetaraan pada latar belakang sosial, ekonomi, kelompok etnis, suku dan kultur.

Menurut Zubaedi (2005: 12) bahwa dalam pembelajaran juga harus mengajarkan komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan sosial. Proses interaksi yang terbentuk pada pembelajaran ini harus dapat terbangun antara guru dan peserta didik secara terbuka.

Guru harus menghidupkan kelas sebagai laboratorium demokrasi dimana situasi kelas secara berkesinambungan merupakan tempat latihan berbeda pendapat, berargumentasi, berlatih dan mengendalikan emosi, jujur, sportif, serta berlatih dan membiasakan diri dalam langkah pemecahan masalah serta proses pengambilan keputusan (Numan Sumantri. 2001: 185). Guru memberikan andil yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran akan berjalan secara demokratis apabila dalam pembelajaran saling menghormati hak dan kewajiban guru dan peserta didik.

Pembelajaran IPS yang demokratis memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran dengan metode diskusi. Proses pembelajaran dilakukan mulai

pada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Karakteristik pembelajaran IPS berlangsung dengan demokratis dapat ditunjukkan dengan adanya budaya partisipasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan bertanggung jawab (Siti Irene, 2011: 50). Kegiatan partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi pada pemecahan masalah di dalam pemberian materi.

Proses pembelajaran dengan siswa ikut berpartisipasi diharapkan akan menjadikan pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif. Partisipasi dilakukan secara sistematis. Hal ini berpengaruh pada keadaan kelas atau iklim kelas. Iklim kelas akan menghasilkan suasana kelas yang bersifat demokratis. Guru dapat membawa kontraversial isu kedalam kelas untuk berdiskusi bersama peserta didik. Proses pengajaran yang dilakukan oleh guru akan berpengaruh pada keadaan kelas (iklim kelas) tersebut.

Dalam pembelajaran akan melibatkan beberapa komponen yaitu berorientasi pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran:

a) Perencanaan Pembelajaran

Menurut Wina Sanjaya (2008: 28) bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. Adapun fungsi perencanaan pembelajaran antara lain fungsi kreatif, inovatif, selektif, komunikatif, produktif, pencapaian tujuan, akuratif dan kontrol.

Perencanaan pembelajaran harus dapat memahami kurikulum, menguasai bahan ajar, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan (Abdul Madjid, 2008: 20). Manfaat perencanaan pembelajaran adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat didalamnya, sebagai pedoman kerja, serta untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan.

Perencanaan pembelajaran sangat diperlukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. perencanaan pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan berpegang pada nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, partisipasi dan persamaan dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media dan metode yang digunakan serta alat evaluasi dalam pembelajaran.

b) Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Proses pembelajaran meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi. Adapun proses pembelajaran tersebut harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Oemar Hamalik, 2009: 124).

Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi tahap pra instruksional, tahap instruksional serta tahap evaluasi dan tindak lanjut (Suryosubroto, 2002: 36). Tahap pra instruksional adalah tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar. Tahap instruksional adalah tahap pemberian bahan pelajaran. Sedangkan tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional.

Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Peserta didik akan mendominasi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nilai-nilai demokrasi diterapkan pada proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode *Cooperative Learning*, *Projek Based Learning (PjBL)* dan *Problem Based Learning (PBL)* (Hisyam Zaini, 2008: 6).

Menurut Etin Solihatin & Raharjo (2009: 106) bahwa cooperative learning merupakan salah satu sikap maupun perilaku dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur bekerja diantara sesama dalam struktur bekerjasama yang teratur dalam kelompok terdiri dari dua atau lebih. Model pembelajaran ini berangkat dari asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat yaitu *getting better*. Model ini membantu siswa

dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan di masyarakat, sehingga bekerja bersama-sama diantara anggota kelompok akan meningkatkan motivasi dan produktivitas.

Konsep dalam metode pembelajaran *cooperative* para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang, siswa saling memberikan argumen dalam mengasah kemampuan mereka dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Nilai-nilai demokrasi menekankan pada prinsip partisipasi, toleransi, keanekaragaman dan tanggung jawab sehingga metode ini dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran.

Miftahul Huda (2013: 44) menjelaskan bahwa *Project Based Learning (PjBL)* merupakan sebuah model atau pendekatan inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. *Project Based Learning (PjBL)* berfokus pada konsep dan prinsip utama dari suatu disiplin membahas pada suatu kasus dan peserta didik mempunyai peran untuk menyelesaikannya Pembelajaran berbasis proyek ini berfokus pada kreatifitas berfikir, pemecahan masalah dan interaksi antar peserta didik untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru.

Pada metode ini nilai-nilai demokrasi ini dapat diaktualisasikan yaitu pada pembelajaran IPS. Karena pembelajaran IPS merupakan suatu pembelajaran yang membawa isu-isu sosial kedalam pembelajaran sehingga metode tersebut sangat tepat.

Problem Based Learning (PBL) diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah (Taufiq Amir, 2010: 56). Terdapat tiga elemen dasar dalam *Problem Based Learning (PBL)* adalah menganalisa masalah, meneliti isu yang diidentifikasi dan memanfaatkan pengetahuan dalam memahami lebih lanjut. *Problem Based Learning (PBL)* ini mempunyai ciri-ciri pembelajaran yaitu dengan pemberian masalah. *Problem Based Learning (PBL)* ini dapat membantu peserta didik membangun kecakapan sepanjang hidup dalam memecahkan masalah, kerjasama tim dan komunikasi. Sehingga nilai-nilai demokrasi dapat di terapkan pada metode pembelajaran ini. Metode ini juga mengedepankan pada kerjasama tim dalam pemecahan masalah.

c) Evaluasi pembelajaran

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto (2015: 3). Evaluasi pembelajaran merupakan suatu penilai akhir dari pelaksanaan pembelajaran. Nilai-nilai demokrasi dinilai menggunakan sikap dari pengaplikasian nilai tersebut. Proses evaluasi pembelajaran sangat penting untuk digunakan sebagai ukuran mengenai capaian suatu hasil. Penilaian berfungsi sebagai sebagai pengukur keberhasilan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dari sisi teoritik. Berikut penelitian relevan yang dapat mendukung penelitian mengenai “ Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMP N 15 Yogyakarta” yaitu :

1. Penelitian Skripsi Adisti Sulistyorini. 2014. *“Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Se-Kecamatan Depok”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila, materi pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila, strategi pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila, media pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila dan proses penilaian pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kategorisasi data, display data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila sangat penting dengan melihat beberapa komponen, yaitu (1) tujuan pengembangan agar siswa dapat mengetahui dan melakukan nilai-nilai demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari, (2) materi pengembangan secara konseptual dan dilanjutkan secara fakta dalam metode pembelajaran, (3) strategi pengembangan lebih mengarah kepada ceramah dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila, (4) guru lebih banyak menggunakan audio daripada membuat media dalam

pengembangan nilai-nilai demokrasi pancasila, (5) proses penilaian menggunakan nilai akademik dan nilai perilaku.

Relevansi dari penelitian Adisti Sulistyorini dengan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan penelitian terhadap penanaman nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada pembelajaran yang dikembangkan. Penelitian Adisti Sulistyorini berfokus pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan pada penelitian ini pembelajaran IPS.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan Sigit Avianto. 2013. "*Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, untuk mendeskripsikan upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, untuk mendeskripsikan upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan murid dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PKn yang dilakukan guru dan siswa pada Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Karanggede yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan, dan kepercayaan, 2) upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII smp muhammadiyah 8 karanggede yaitu guru memberikan kebebasan pada siswa untuk bertanya maupun mengeluarkan pendapat dalam proses pembelajaran, 3) upaya penanaman nilai demokrasi yang dilakukan murid dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 karanggede yaitu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran.

Relevansi dari penelitian Sigit Avian dengan penelitian ini adalah memfokuskan penelitian terhadap penanaman nilai-nilai demokrasi. Perbedaan penelitian

terebut dengan penelitian ini adalah pada pembelajaran. Penelitian Sigit Avian berfokus pada penanaman nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sedangkan pada penelitian ini dalam pembelajaran IPS.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Berti Damayanti. 2016. *“Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Di SMP Diponegoro Majenang Cilacap”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang; 2) Proses pembelajaran IPS yang berorientasi nilai-nilai demokrasi di SMP Diponegoro Majenang; 3) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang diantaranya nilai kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, sikap saling mempercayai, menyelesaikan permasalahan secara damai, toleransi, dan partisipasi; 2) Implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan memilih metode, materi, dan pemberian pemahaman yang mendukung penanaman nilai demokrasi. Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi sikap yang dilakukan dengan pengamatan dan berpedoman pada lembar penilaian sikap; 3) Faktor pendukung implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang diantaranya penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, interaksi antara guru dan siswa yang berjalan lancar, pemberian motivasi maupun penghargaan, serta kultur sekolah yang mendukung. Faktor penghambat implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Diponegoro

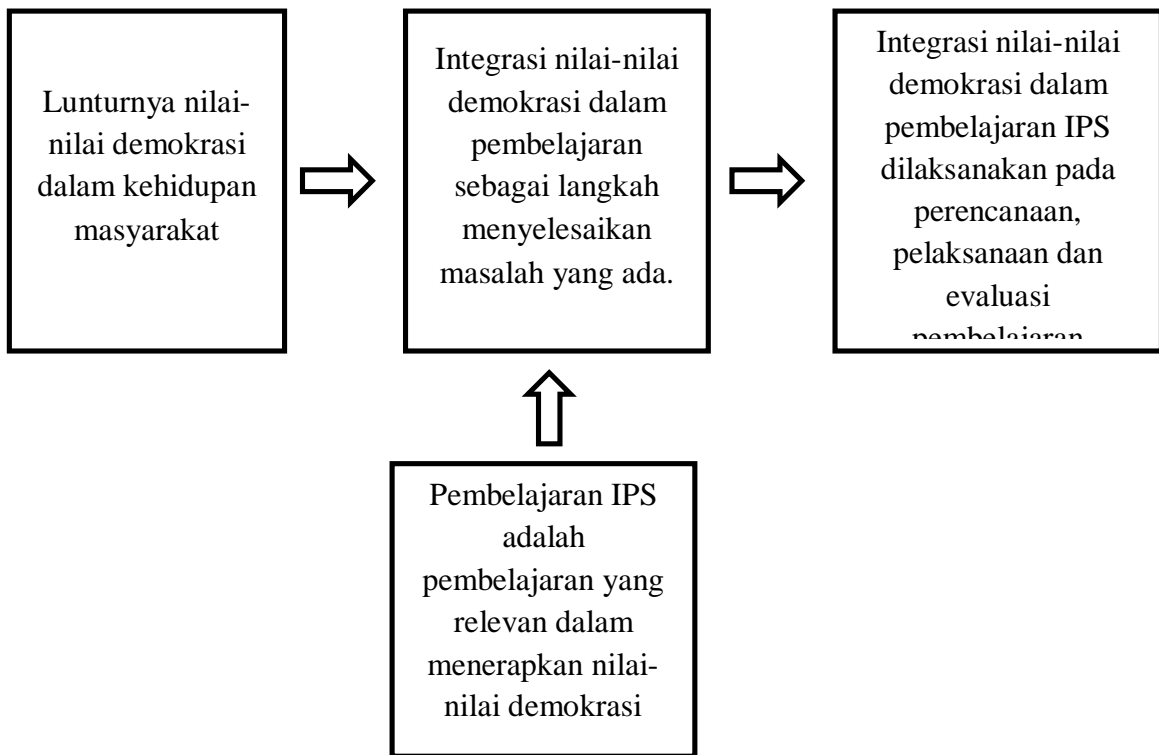
Majenang diantaranya siswa kurang percaya diri, keseriusan siswa rendah, penggunaan media yang terbatas, dan masih adanya tindakan bullying.

Relevansi dari penelitian Berti Damayanti dengan penelitian ini adalah memfokuskan penelitian terhadap penanaman demokrasi dalam pembelajaran IPS. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penanaman pendidikan. Penelitian Berti Damayanti berfokus pada pendidikan demokrasi dalam pembelajaran pendidikan IPS sedangkan pada penelitian ini adalah nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS.

C. Kerangka Pikir

Demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan sosial yang ditandai dengan interaksi yang bersifat terbuka. Masyarakat yang demokratis akan terwujud apabila masyarakat mengedepankan cita-cita dan nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Pelaksanaan demokrasi ini diterapkan melalui pendidikan. Hal ini sebagai sarana dalam mewujudkan dan mengembangkan masyarakat demokratis.

Nilai-nilai demokrasi dewasa ini perlu dihidupkan kembali. Hal ini karena munculnya pelanggaran nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai demokrasi harus dapat dihidupkan kembali. Salah satu upaya penerapan nilai-nilai demokrasi adalah pada suatu pembelajaran. Pembelajaran yang relevan dalam penerapan nilai demokrasi yaitu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan nilai-nilai demokrasi mempunyai kesamaan pada tujuan, materi, kompetensi, proses dan penilaian. Nilai-nilai demokrasi ini diterapkan pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun penerapan tersebut terdapat pada perencanaan pembelajaran, pada proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi teori diatas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

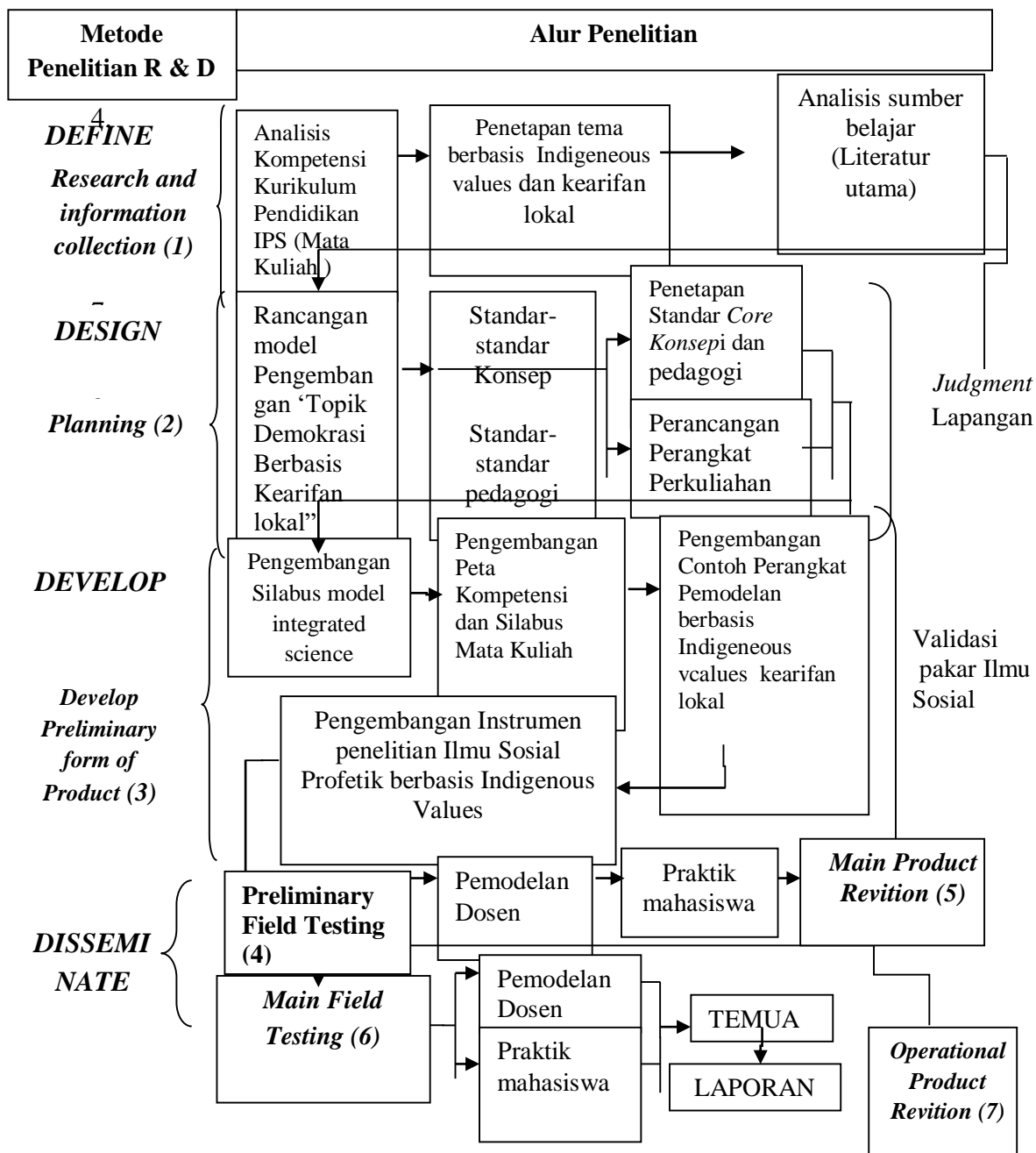
1. Bagaimana mengembangkan baha ajar IPS untuk topic nilsai- nilai demorasi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan kebenaran konsepsi ilmu pada aras akademik dan pada aras pedagogik?
2. Bagaimana efektivitas bahan ajar IPS dengan topic nilai-nilai demokrasio berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS dilihat dari sisi perspektif kultural?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode penelitian *Research and Development* dan alur penelitian yang dijelaskan pada Gambar 2. Fase *define* atau *research and information collection* (Borg dan Gall, 1983: 776) merupakan fase penelitian dan pengumpulan data awal berupa studi literatur, analisis kebutuhan dan studi lapangan. Fase *design* atau *planning* (Borg dan Gall, 1983: 777) merupakan rancangan produk yang akan dihasilkan, meliputi tujuan penggunaan produk, pengguna produk dan deskripsi komponen-komponen produk. Fase *develop* atau *develop preliminary form of product* (Borg dan Gall, 1983: 781) merupakan pengembangan produk awal. Fase *Disseminate* ada empat langkah pengembangan, yaitu *preliminary field testing* (Borg dan Gall, 1983: 782) yang merupakan uji coba lapangan awal, *main product revision* (Borg dan Gall, 1983: 782) atau revisi hasil uji coba, *main field testing* (Borg dan Gall, 1983: 783) atau uji coba lapangan utama serta *operational product revision* (Borg dan Gall, 1983: 784) atau penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan.

1. Desain Penelitian



Mengacu pada desain penelitian tersebut, prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam *research and development* (R & D). Tujuan utama R & D untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu program atau model dalam konteks ini adalah pengembangan model Ilmu Sosial Profetik berbasis Indigenous Values agar konsep keilmuan di FIS UNY menjadi merujuk pada suatu paradigma keilmuan sosial yang berbasiskan kearifan lokal sehingga lebih akurat untuk dipakai membahas berbagai problema sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tahapan-tahapan R & D diformulasikan menjadi model 4-D (*Four-D Models*)(Thiagarajan, 1975: 5) dan disesuaikan Borg dan Gall (1983: 775) yaitu:

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta beralamat di Kampus Karangmalang, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari-April 2017.

C. Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek ditentukan berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dalam penelitian adalah menggunakan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2015: 300) menjelaskan bahwa teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber daya, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Subyek penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Pihak pihak Ang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahn Pendidikan Politik dan Demokrasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat (Suharsimi, 2013: 199). Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Mendalam..

2. Pengamatan (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi *participant observation* dan *non participant observation* (Sugiyono, 2015: 204). Dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan obyek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian.

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS yaitu meliputi cara mengajar dosen dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, media yang digunakan, metode yang diterapkan, materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015: 329). Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen tertulis dan gambar yaitu silabus, RPP, interaksi antara peserta didik dan guru serta suasana pembelajaran.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2013: 203). Pada penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti itu sendiri.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam mendapatkan data yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Moleong (2006: 330) menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data sumber. Teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah mengecek kepercayaan sumber dari hasil informan yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2015: 338) meliputi :

3. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti.

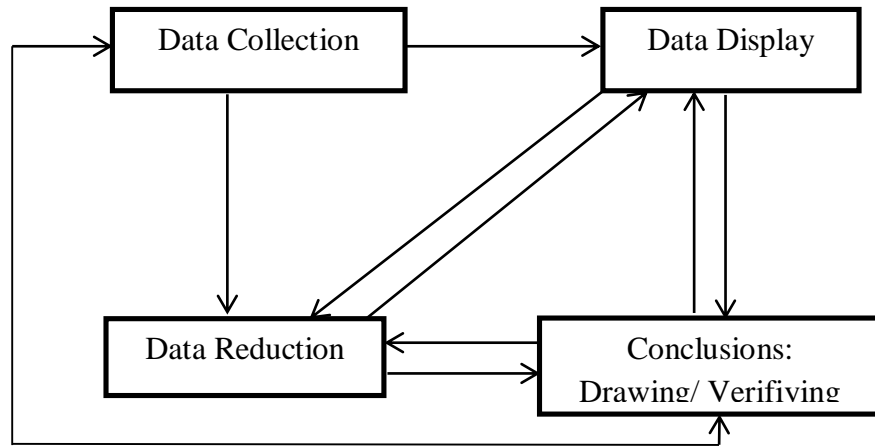
4. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian yang terkait dengan penjelasan dan pembahasan sebagaimana dirumsukan dalam rumusan masalah penelitian. Yakini bagaimana proses pengembangan bahan ajar IPS untuk topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal dan efektivitas bahan ajar IPS dengan topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS..

Terlebih dahulu akan dikemukakan proses pengembangan bahan ajar IPS dengan topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal. Tahap-tahap pengembangan bahan ajar tersebut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut; Pertama tahap define; kedua tahap desain; ketiga tahap development; keempat tahap dissemination.

B. Tahap define.

Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian awal serta melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di kelas yang mengambil mata kuliah Teori-Teori Sosial Indonesia pada tahun akademik 2017 -2018 semester 5 pada Jurusan Pendidikan IPS. Dari hasil pengkajian awal dan pengamatan yang telah dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa mahasiswa mendapatkan kesulitan untuk memperoleh bahan ajar IPS yang berkaitan dengan topik Nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal. Literatur dan bahan ajar yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi pada umumnya masih disajikan dan dinalisis dengan perspektif teori demokrasi sebagaimana dipahami dalam lensa akademik Barat.

Ada kebutuhan yang mendesak untuk memproduksi bahan ajar IPS khususnya dengan topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal. Arti penting hadirnya bahan ajar IPS yang berbasis pada kearifan lokal mengingat secara teoritis implementasi dan pelaksanaan demokrasi perlu mempertimbangkan kondisi lokal atau lebih tepatnya kebudayaan politik pada konteks masing-masing masyarakat. Implementasi demokrasi tidak menempuh jalur tunggal (Aleksis Tocquaveli, 2002). Serta pada sisi yang lain ada kecenderungan semakin melemahnya pemahaman mahasiswa pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai dampak dari adanya globalisasi informasi yang tidak seimbang dari belahan dunia Barat. Mempertimbangkan argumen sebagaimana dikemukakan di atas maka perlu diformulasikan dengan lebih rinci pengembangan bahan ajar dengan topik nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal.

C. Tahap Design.

Pada fase ini peneliti menentukan rancangan produk yang akan dihasilkan yakni meliputi tujuan dari produk berupa modul bahan ajar IPS dengan topik Nilai-Nilai Demokrasi Berbasis Kearifan lokal, komponen-komponen dari modul tersebut, karakteristik pengguna dari produk yang berupa modul.

Tujuan dari dihasilkannya produk berupa modul dengan topik Nilai-Nilai Demokrasi Berbasis Kearifan lokal adalah untuk mempermudah mahasiswa memahami Nilai-Nilai demokrasi sesuai dengan konteks dari kebudayaan politik masyarakat Indonesia. Tujuan lainnya adalah agar mahasiswa yang mempelajari demokrasi tidak larut dan tergerus nilai-nilai kearifan lokalnya. Tujuan ini perlu mendapatkan penekanan dikarenakan adanya fenomena yang mengundang keprihatinan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia semenjak bergulirnya reformasi tahun 1998, telah cenderung

mengikuti nilai-nilai demokrasi liberal yang dipertanyakan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila (kearifan lokal) yang hidup pada masyarakat Indonesia.

D. Development

Pada tahap ini peneliti melakukan uji coba secara terbatas pada produk yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya yakni tahap desain. Uji coba terbatas dilakukan pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Teori-Teori Sosial Indonesia Kelas A dan B Semester 5 Jurusan Pendidikan IPS. Dari uji coba terbatas yang telah dilakukan peneliti memperoleh berbagai masukan untuk memperbaiki produk. Diantara masukan penting pada tahap ini adalah

1. Perlu diperkaya dengan perspektif teori yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir Indonesia.
2. Perlu diperkaya dengan contoh-contoh kasus dan fenomena yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia.
3. Perlu diperbaiki sistematika dan urutan penyajian dari modul yang telah dirancang agar lebih mudah dicerna oleh mahasiswa.
4. Perlu perbaikan redaksi terkait dengan pola kalimat yang digunakan.
5. Perlu diberikan ilustrasi, bagan, skema, peta konsep agar modul lebih menarik perhatian mahasiswa untuk mempelajarinya.

Contoh Produk yang dihasilkan

**Modul
Nilai-Nilai Demokrasi
Belajar dari Dinamika Politik Lokal Yogyakarta**



**Oleh:
Dr. Nasiwan, dkk**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

Daftar Isi Modul

	Halaman
Pengantar	1
Politik Lokal dan otonomi Daerah	4
Urgensi Mempelajari Politik Lokal di Indonesia	5
Latar Historis Politik Lokal dan Otonomi Daerah	6
Latar Historis Politik Lokal dan Otonomi Daerah Zaman Kolonial Belanda	12
Politik Lokal pada Zaman Republik	17
Otonomi Daerah pada Zaman Otokratik (1960-1990)	19
Otonomi Daerah Paska tahun 1998	21
Relasi Pusat dan Daerah	24
Dua perspektif Relasi Pusat dan Daerah	29
Berbagai Kasus Studi Politik Lokal	30
Kasus Dinamika Politik Lokal di DIY (Kebudayaan Politik)	34
Kasus Pilkada Wali Kota Yogyakarta	74
Kasus DIY: Reformasi Sektor Pelayanan Publik	87
Histograsi Pengelolaan dan pelayanan Publik di DIY	107
Penutup	146
Daftar Pustaka	147

Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas selesainya penyusunan Modul Politik Lokal yang sederhana ini. Semoga dengan hadirnya tulisan yang sederhana ini dapat membantu mahasiswa Jurusan PIPS yang berminat untuk mengambil mata kuliah politik dan Demokrasi khususnya mata kuliah Politik lokal. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh suatu niat untuk menghadirkan suatu kegiatan pembelajaran pada mata kuliah politik lokal yang lebih berkualitas, yakni dengan menyediakan sumber belajar, berupa literatur yang terkait dengan kajian politik lokal dalam bentuk yang lebih sistematis serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa PIPS.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas kebijakan yang digulirkan oleh Dekan FIS yang melalui kebijakannya memberikan perhatian untuk memberikan dukungan dana bagi penyusunan Modul Politik Lokal dan Demokrasi. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada mahasiswa Pendidikan IPS yang megambil mata kuliah Teori Teori Sosial Indonesia melalui ruang kuliah dan suasana perkuliahan yang ada telah menginspirasi untuk hadirnya tulisan ini.

Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan diktat ini di masa mendatang, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada, selamat membaca dengan iringan doa semoga bermanfaat.

Yogyakarta November 2017

Nasiwan, dkk
Penulis

Pengantar diktat Politik lokal

“Pemunculan daerah-daerah ke atas permukaan dan kesadaran akan pentingnya daerah bolehlah dikatakan menjadi suatu gerak “ menemukan kembali Indonesia”, “*reinventing Indonesia*” yang hilang selama ini”. (Daniel Dhakidae, 2010:73). Pernyataan di awal kalimat yang penulis kutip dalam konteks pembicaraan dinamika politik lokal, dapat dimaknai betapa pentingnya daerah atau kehidupan politik di tingkat lokal. Munculnya kembali akan urgensi daerah (kehidupan politik di level lokal) menjadi momentum penting dari ikhtiar untuk menemukan kembali Indonesia.

Hakekat keindonesiaan dan kehidupan politik kebangsaan Indonesia menjadi hilang maknanya ketika kesadaran akan pentingnya daerah hilang, dari dokumen tertulis (konstitusi, Undang-undang) ,lebih parah lagi ketika diskurusus politik nasional sepi dari kesadaran untuk melakukan rekognisi politik lokal, ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengabaikan dan memarginalkan aspirasi-aspirasi masyarakat politik lokal.

Perkembangan politik lokal di indonesia menunjukkan suatu dinamika yang luar biasa khususnya semenjak bergulirnya era reformasi tahun 1998. Era reformasi memberikan momentum yang sangat baik bagi munculnya kembali tuntutan-tuntutan yang datang dari daerah-lokal. Momentum tersebut antara lain ditandai dengan disetujuinya UU NO 22 tahun 1999, yang kemudian disusul dengan UU No 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten serta pemerintah kota suatu Kewenangan serta oronomi yang lebih luas dibandingkan dengan era sebelumnya.

Beberapa hal penting yang menandai dimulainya suatu era baru otonomi daerah di Indonesia antara lain; *pertama*, diteruskannya berbagai urusan kepada daerah misalnya pendidikan dasar dan menengah kepada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintah Kota, urusan pariwisata dan kebudayaan, bidang kesehatan, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanian, kesenian, dll dalam kaitan ini pemerintah pusat hanya memegang beberapa bidang yang dianggap strategis antara lain bidang politik luar negeri, bidang ekonomi makro, bidang pertahanan bidang agama serta hukum.

Kedua, otonomi daerah ditandai dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung baik untuk memilih Gubernur, bupati maupun wali kota. Pada era sebelum era otonomi daerah pimpinan daerah cukup dipilih oleh DPRD. Perkembangan ini dapat dibaca sebagai suatu pertanda bahwa aspirasi rakyat secara prosedural demokrasi semakin mendapatkan tempat yang penting serta memungkinkan untuk hadirnya suatu figur pimpinan daerah yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat di daerah serta memahami kepentingan rakyat pada akhirnya rakyat di daerah menjadi memiliki peluang untuk semakin meningkatkan kesejahteraannya

Ketiga, era otonomi daerah juga ditandai dengan semakin banyaknya daerah baru yang lahir dari hasil pemekaran baik provinsi maupun pemekaran daerah kabupaten. Kesempatan ini tentu memberikan peluang untuk terjadinya mobilitas vertikal bagi elit lokal serta memberikan kesempatan untuk lahirnya elit-elit lokal baru dengan segala dinamikanya.

Keempat, era otonomi daerah juga telah mendorong untuk lahirnya partai lokal seperti dapat dibaca pada Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam. Melalui partai lokal tersebut telah lahir gubernur yang direruit dari tokoh lokal yang diusung oleh partai lokal

yakni Partai Aceh. Kehadiran partai lokal di Aceh dalam realitasnya telah ikut memberikan kontribusi untuk terwujudnya suatu kehidupan politik yang demokratis dan damai. Dengan hadirnya partai politik lokal di Aceh secara bertahap konflik bersenjata antara GAM dengan pasukan pemerintah secara bertahap dapat dihentikan serta telah mengembalikan para pendukung GAM pada pangkuan Negara Republik Indonesia.

Kelima, era otonomi daerah juga telah menimbulkan suatu situasi yang sering disebut sebagai *embeddedness government* dan *fragmented government*. Yakni suatu situasi pemerintahan yang kurang kohesif- terbelah antara pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya aktor politik yang berbeda induk partainya sehingga memberikan peluang untuk terjadinya perbedaan kebijakan antara kader-kader partai yang ditempatkan masing-masing partai di berbagai level pemerintahan (Kacung marijan, 2011).

Perubahan mendasar pada sistem politik nasional di Indonesia yakni sistem politik otoritarian menuju – mengalami transisi – menuju suatu sistem politik yang demokratis, dalam banyak segi juga telah mempengaruhi dinamika politik lokal di Indonesia, Perubahan sistem politik nasional kemudian dituangkan dalam bentuk amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia yakni UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen sejak tahun 1999-2004, bahkan belakangan setelah pemilu tahun 2009 berlangsung juga muncul berbagai aspirasi yang cukup kuat untuk kembali melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Perubahan pada format sistem politik nasional memiliki pengaruh dinamika dan penguatan politik lokal. Hal tersebut antara lain dengan dibentuknya lembaga Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan perwakilan aspirasi-aspirasi lokal atau daerah yang dalam supra struktur politik diakui sebagai bagian dari MPR. DPD dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada lembaga ini telah memberikan kontribusi pada pemberian akses serta iklim politik yang kondusif bagi akomodasi aspirasi-aspirasi lokal di Indonesia.

Dinamika politik lokal sebagaimana telah dikemukakan diatas perlu dipahami oleh para mahasiswa Jurusan PKN& Hukum dengan benar yang berangkat dari analisis yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan tuntutan untuk menjadi guru yang profesional yakni memiliki kompetensi akademik serta pedagogis. Kehadiran diktat yang sederhana ini semoga dapat memberikan kontribusi untuk hadirnya tenaga guru khususnya pada bidang studi PKN yang memiliki kompetensi akademik.

Urgensi mempelajari Politik lokal

Studi tentang politik lokal menjadi penting untuk kehidupan politik di Indonesia khususnya setelah bergulirnya era reformasi, antara lain pengakuan atau rekognisi akan hak-hak dan aspirasi –aspirasi masyarakat lokal itu merupakan bagian yang sangat penting – yang tidak terpisahkan – dari tuntutan reformasi politik tahun 1998. Aspirasi-aspirasi lokal yang kemudian secara formal dirumuskan dalam terminologi otonomi daerah itu berimpit dengan tuntutan reformasi politik. Mengapa demikian ? Penjelasan karena masyarakat lokal di Indonesia dalam kurun waktu yang panjang selama kurang lebih 30 tahun bahkan selama Negara Indonesia berdiri belum mendapatkan hak-hak politik dan ekonomi serta kulturalnya. Hal yang demikian dengan sangat jelas dapat dibaca pada kasus munculnya berbagai pemberontakan daerah

seperti Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, Munculnya Republik Maluku Selatan, aspirasi Riau Merdeka. Dengan demikian munculnya otonomi daerah oleh masyarakat lokal dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keniscayaan dari adanya reformasi politik.

Dengan perspektif lain dapat dinyatakan bahwa mempelajari dinamika otonomi daerah di Indonesia itu memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan dinamika politik lokal dan sebaliknya. Sedangkan persoalan pada rekognosi aspirasi-aspirasi politik lokal itu sendiri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari subtransaksi dari demokrasi itu sendiri khususnya penguatan demokrasai di tingkat lokal.

Persoalan-persoalan politik lokal di Indonesia sebagian besarnya adalah terkait dengan perjuangan untuk adanya pemenuhan akomodasi aspirasi –aspirasi lokal yang selama beberapa periode dasawarsa di Indonesia baik pada pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru, tidak dapat mendapatkan hak-hak politik, ekonomi dan kulturalnya.

Dari sisi pandang pemaknaan demokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat yang didalamnya terkandung makna bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat haruslah diperhatikan dalam proses –proses pengambilan keputusan politik, maka pemahaman yang memadai pada dinamika politik lokal di Indonesia memiliki urgensi bagi pemahaman yang baik serta memiliki kontribusi penting bagi pemahaman pada gagasan demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain pemahaman pada persoalan demokrasi di Indonesia menjadi tidak utuh dan membuka tergelincir pada pemahaman yang bias tanpa memasukan studi pada politik lokal itu sendiri.

Politik lokal dan Otonomi Daerah

Topik tentang politik lokal dan otonomi daerah adalah dua topik yang berbeda tetapi untuk konteks perkembangan politik di Indonesia kedua topik tersebut memiliki keterkaitan yang penting untuk dicermati khususnya ketika membicarakan tentang dinamika politik lokal di Indonesia.

Keterkaitan tersebut antara lain dapat dilihat dari berbagai prespektif sebagai berikut;

Pertama, adalah merupakan realitas politik bahwa dinamika politik lokal di Indonesia mengemuka seiring dengan dimulainya era otonomi daerah. Melalui isu otonomi daerah berbagai aktor lokal mendapatkan momentum untuk muncul sebagian berhasil mengeksiskan dirinya sebagai politisi lokal bahkan sebagian dapat melakukan mobilisasi menjadi elit politik nasional.

Kedua, isu-isu substansial yang dibicarakan –menajdi wacana- dalam berbagai dinamika dan gejolak politik lokal seringkali berisan dengan isu-isu yang diperjuangkan melalui instrumen otonomi daerah. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pengisian posisi elit lokal, pembagian alokasi keuangan pusat dan daerah, pembagian dan pengelolaan sumber daya alam seperti Gas, Minyak Bumi, Batu Bara, dll.

Ketiga, baik politik lokal maupun otonomi daerah, sama-sama memiliki tujuan atau setidaknya dipakai oleh para aktor politik menjadi instrumen –wacana untuk

memperjuangkan kepentingan dan aspirasi-aspirasi masyarakat lokal yang selama pemerintahan rezim Orde Baru merasa dimarginalkan.

Latar Historis Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Politik lokal merupakan subnasional atau subordinat yang mencakup kekuasaan politik, ekonomi dan sosial. Pada era Soekarno politik lokal tidak berkembang karena pemerintah bersifat sentralistik. Pada zaman Soeharto berusaha mengembangkan daerah, dan teritorial reform. Konsep rezim Soeharto adalah wawasan nusantara yang merupakan bentuk imperialisme baru. Fokusnya seharusnya pada pembangunan maritim dan pertanian, tetapi pada Era Orde Baru tidak ada, namun wawasan nusantara fokus pada darat yang merupakan control daerah (politik, ekonomi dan sosial) yang ditopang oleh organisasi teritorial. Contoh : Pangdam, Kodim dan Koramil. Untuk mengembangkan kekayaan pusat dilakukan dengan mengukut kekayaan daerah. Politik lokal cenderung pada desentralisasi.

Pentingnya mempelajari politik lokal yaitu dengan mengungkap politik lokal dalam kehidupan sehari-hari (kesehatan, pendidikan, birokrasi, dll) merupakan dampak dari bekerjanya politik lokal, menjadi penting karena langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Selain itu memahami politik lokal penting karena untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah bekerja dan bagaimana mengembangkan partisipasi dalam mengarahkan bekerjanya pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai Warga Negara.

Pendekatan dalam politik lokal ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Ekonomi Politik

Bahwa dalam pemerintahan lokal ada karakteristik ekonomi yang menyatakan ekonomi lebih penting daripada struktur politik dalam menentukan kebijakan daerah. Membahas politik lokal penting karena membangun daerah adalah membangun ekonomi.

Contoh : Para Kepala Daerah terpilih biasanya didukung oleh penguasa setempat.

2. Pendekatan sistem

Sistem politik lokal akan dibedah atau dikaji melalui berbagai komponen yang biasa digunakan untuk mengkaji sistem politik nasional, hanya saja komponen yang digunakan disesuaikan dengan politik lokal. Dalam pendekatan sistem terdapat tiga hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

1) Struktur

Struktur dalam suatu daerah dimungkinkan ada lembaga yang mengatur hubungan dengan daerah lain

2) Input

Input dapat berupa partisipasi masyarakat di tingkat lokal, partai politik lokal, LSM lokal dan media massa lokal.

3) Output

Output merupakan produk yang dihasilkan oleh suprastruktur politik.

Sejarah politik lokal di Indonesia

1. Masa Kolonial Belanda

Ditandai dengan desentralisasi Wet 1903, yang merupakan desentralisasi kewenangan. Belum ada kejelasan antara desentralisasi administratif (dekonsentrasi) atau *self government/self bestuur* kepada daerah (*gewesten*) atau bagian dari daerah (*gedeeiten van gewesten*). Kemudian pada tahun 1908 dikembangkan *Stadsgemeent* (territorial yang berstatus kota) seperti Jatinegara, Bogor, Bandung, Cirebon, Padang, Palembang, Surabaya.

2. Masa Penjajahan Jepang

Ditandai dengan adanya Maklumat *Osamu Seise* (UU) yang dibuat oleh *Saikosikikan* (Gubernur Jenderal)

- 1) Osamuseire Nomor 27 tahun 1942 tentang perubahan pemerintah daerah dibagi menjadi Syuu, Syi, Gun dan Ku
- 2) Osamuseire Nomor 28 tahun 1942 tentang Yogyakarta dan Surakarta dibentuk sebagai Kooti dan Si yang merupakan daerah otonom tapi dapat dibatalkan oleh Syuutyu serta dibentuk Sangi Kai (dewan)
- 3) Osamuseire Nomor 30 tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama daerah (kembali menggunakan karisidenan yang dikepalai Syuutyu perwira Jepang; Sityo untuk Si dan Ketyo untuk Ki.

Pada masa itu, kekuasaan menjadi sentralis dan hierarkis. Pada masa kedudukan kolonial Jepang daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 komando, yaitu;

- a. Sumatra di bawah Komando Panglima AD XXV di Bukittinggi
- b. Jawa dan Madura di bawah Komando Panglima AD XVI di Jakarta
- c. Daerah lain di bawah Komando Panglima AL di Makassar.

3. Masa Demokrasi parlementer

demokrasi parlementer (1950-1959) lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957

4. Masa Demokrasi Terpimpin

Pemerintah menetapkan Penetapan Presiden

5. Masa Orde Baru

Ruh pemerintahan masih sangat sentralistik, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Undang-Undang tersebut memainkan peranan penting dalam memperluas kekuasaan pusat kepada daerah. Penunjukkan Gubernur dengan latar belakang militer sangat menguntungkan bisnis.

6. Masa Paska Orde Baru

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah membuka peluang besar untuk mewujudkan politik lokal. Kabupaten/Kota menjadi titik berat, otonomi daerah juga diberlakukan untuk daerah khusus. Kecamatan tidak lagi menjadi wilayah administratif, tetapi merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Pada masa orde baru menjadi titik tolak bagi berkembangnya politik lokal.

Tanggung jawab Gubernur (Kepala Daerah), yaitu

- Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD dan Presiden
- Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban member laporan kepada Presiden melalui Mendagri dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

Pada masa paska Orde Baru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan diperkenalkannya

Pilkada maupun pemekaran daerah yang kemudian melalui Yudicial Review sehingga diperbolehkan calon Independent.

Paradigma Baru Hubungan Pusat dan daerah

No.	Kategori relasi	Paradigma	
		Lama	Baru
1.	Tujuan/sasaran	Persatuan, kesatuan, stabilitas, pembangunan	Demokrasi dan kesejahteraan dalam rangka keutuhan bangsa
2.	Tekanan	- Sentralisasi kekuasaan - Desentralisasi administrasi - Desentrasi politik	- Distribusi kekuasaan - Desentralisasi Politik
3.	Sifat Hubungan	- Hirarkis - Dominatif	- Partnership - Komplementer
4.	Kekuasaan Pusat	Tidak terbatas dan tidak terkontrol	Terbatas dan terkontrol
5.	Kedaulatan	Pada negara (manipulasi kedaulatan rakyat)	Pada rakyat
6.	Orientasi otonomi	Otinomi Pemda	Otonomi masyarakat lokal
7.	Skala Otonomi	Seragam	Fleksibel/kondisional
8.	Titik Berat	Kab./Kota	propinsi
9.	Cakupan Kekuasaan dan kewajiban	“belas kasihan” pusat	Kesepakatan wakil-wakil rakyat pusat dan daerah
10.	Peran masyarakat	Pasif dan mobilized	Aktif dan partisipatif
11.	Rekrutmen Elit	Tidak langsung dan tertutup	Langsung dan terbuka
12.	Instrumen Kebijakan • Jumlah Kebijakan • Proses pembuatan • Cakupan	Tunggal Sepihak searah	Banyak Bersama/dialog Dua arh dan beragam
13.	Ekonomi	Eksplotatif (eksploitasi daerah)	Distributif (keadilan)

14.	Sistem Bagi hasil	Terbatas	banyak
15	Komponen Bagi Hasil	Terbats	banyak

Latar Historis Otonomi dan Desentralisasi Masa Kolonial Belanda

Pembahasan berikut ini akan secara lebih rinci menjelaskan latar historis otonomi daerah di Indonesia serta kaitannya dengan dinamika politik lokal. Wacana tentang desentralisasi – semacam politik akomodasi dan rekognisi – pada aspirasi-aspirasi lokal memiliki sejarah yang panjang lebih dari satu abad. Dimulai sejak rancangan *Decentralisatie Wet*, diperdebatkan di parlemen Belanda, dua dasawasa sebelum akhirnya disyahkan pada tahun 1903 dengan nama resmi “ *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsh-Indie* ” hingga awal abad ke duapuluh satu yakni lahirnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2010:58-59).

Lahirnya *Decentralisatie Wet* tahun 1903, didahului oleh suatu peristiwa politik pada tahun 1814, --yang secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi-- pada tahun tersebut terjadi re-institusionalisasi kekuasaan berlangsung di Negeri Belanda. *Bataafse Republiek* yang mengambil alih kekuasaan dari *Republiek der Nederlanden* melalui suatu pemberontakan dilikuidasi serta diganti oleh *koninkrijk der Nederlanden* berbentuk monarki –konstitusional. Kekuasaan raja yang tersisa adalah sebagai kepala negara bukan lagi sebagai kepala pemerintahan. Namun untuk kekuasaan di negeri-negeri jajahan di seberang lautan termasuk Hindia Belanda, tidak termasuk dalam kendali undang-Undang Dasar.

Dalam ketentuan *Grondwet* tahun 1818 yang kemudian diamandemen pada tahun 1848, dinyatakan bahwa raja memegang kekuasaan tertinggi atas tanah jajahan di Hindia Belanda. Kekuasaan pemerintah atas tanah jajahan dipegang oleh Gubernur

Jenderal bermarkas di Batavia (Jakarta). Gubernur Jenderal berada dibawah supervisi raja, yang berfungsi sebagai pengawas tertinggi atas jalannya pemerintahan di tanah jajahan. Menteri Koloni sebagai punggawa raja tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Semua ini disebabkan karenanya buruknya sistem komunikasi antara Belanda dan tanah jajahannya, sehingga informasi dan pengetahuan tentang keadaan tanah jajahan selalu datang terlambat dan kurang lengkap. Akibatnya setiap intervensi pusat kekuasaan di Negeri Belanda terhadap kebijakan pejabat pemerintahan di Tanah Hindia Belanda tidak mungkin dilakukan. Kenyataan tersebut membuat Hindia Belanda terdesentralisasi secara teknis, kendati tidak secara yuridis, dari kendali raja Belanda dan menteri kolonialnya. Namun sepanjang paruh pertama abad ke 19, Hindia Belanda tidak terbantahkan menjadi sebuah negeri yang diperintah dengan *model sentralisme*.

Hal tersebut diperkuat oleh adanya Regerings Releemend (RR) 1854, dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal adalah penguasa tunggal dan tertinggi di pusat pemerintahan negeri koloni. Pasal 1 RR menyatakan bahwa pelaksana pemerintahan umum di Hindia Belanda adalah Gubernur Jenderal atas nama raja dan semua penduduk di tanah jajahan tanpa kecuali wajib mengakui, menghormati, dan mentaati Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda di Hindia Belanda.

Kekuasaan sentral Gubernur Jenderal yang lain tercantum dalam pasal 20, 27,41-42, dan 49. Secara berturut-turut dimaklumkan bahwa Gubernur Jenderal (sebagai pembuat ordonansi) adalah pemegang kekuasaan legislatif sekaligus pelaksana eksekutif, berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat tinggi dalam jajaran pemerintahan kolonial dan berkedudukan sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut di Hindia Belanda. Pada pasal 111 RR 1854 dinyatakan bahwa dilarang

mencampuri urusan ketatanegaraan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Gubernur Jenderal. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan yang terpusat ditangan Gubernur Jendeal amat besar dan sulit dikontrol. Status Raad van Indie (Dewan Hindia) yang semula berbagi kekuasaan dalam ihwal legislasi, menurut RR 1854 didegradasi hanya tinggal menjadi penasehat saja.

Demikianlah kenyataanya dalam sejarah kolonial, cita-cita demokrasi dengan hak-hak asasi warga negara tidak segera dapat direalisasikan. Ketentuan yang ada pada RR 1854 khususnya pasal 1 didukung oleh situasi kehidupan politik pada paruh pertama aad 19, yang cenderung terjadinya refeodaliasasi dan paternalistik, maka terjadinya pengukuhan suatu model pemerintahan yang *sentralistik yang anomalik*, yakni sentralistik yang menyimpang dari garis kebijakan yang mendasar. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2010:59).

Disebut dengan sentralisasi yang anomalik dikarenakan pada RR 1854, sekalipun pada pasal 1 membenarkan sentralisasi kendali pemerintahan di tangan pengusa tunggal yang bernama Gubernur Jenderal, RR pada Bab V, pasal-pasalny jelas-jelas mengisyaratkan upaya mewujudkan suatu *rechtsstaat* di negeri Kolonial Hindia Belanda dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan(*machtenscheiding*) yang dapat dijadikan pangkal perlawanan terhadap pengumpulan kekuasaan di tangan eksekutif.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1856, Menteri Koloni Meier, memerintahkan Gubernur Jenderal Pahud gagasan-gagasan yang berkembang di kalangan ressiden dan anggota Raad van Indie tentang perlunya segera membentuk organisasi pemerintahan lokal yang otonom, guna mengokomodasi dan melayani

kepentingan penduduk golongan Eropa yang berniat menetap dan membangun kehidupan di tanah Koloni. Namun gubernur Jenderal dalam hasil kajiannya menyimpulkan bahwa kehadiran organisasi pemerintahan lokal belum diperlukan dan kepentingan golongan Eropa lebih baik ditangani oleh Gubernur Jenderal. Perkembangan tersebut telah membawa pada suatu kondisi sentralisasi kekuasaan pemerintahan di negeri jajahan tetap dipertahankan ketimbang mendesentralisasi kekuasaan pemerintah.

Pada tahun 1880, Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge, memberanikan diri menulis surat kepada Menteri Koloni Baron van Goldstein, yang menyatakan bahwa masyarakat belum cukup matang untuk suatu *bestuurhervorming*, bukan saja karena penduduk dari kalangan bumi putra yang belum terpelajar tetapi juga karena orang Eropa yang lebih terpelajar umumnya sibuk mencari harta kekayaan dan tidak punya waktu mengurus kepentingan lain apapun.

Perkembangan penting terjadi, angin kencang perubahan berhembus setelah ditemukannya kapal api serta dibukanya terusan Suez, sehingga perjalanan dari Eropa ke tanah Hindia dapat lebih dipercepat. Faktor lain juga mulai tumbuhnya minat di kalangan akademisi untuk mempelajari budaya non Eropa mulai digalakan juga mulai tumbuhnya minat orang Eropa untuk mencari nafkah di negeri Koloni yang kemudian membuat *gemeenten* (komunitas) di beberapa kota, juga semakin bertambah. Ditambah lagi dengan adanya tuntutan orang Eropa dan Belanda yang ingin menetap dan mencari nafkah di tanah Hindia Belanda yang disebut *Nederlandse Burgerij* semakin bertambah. Maka akhirnya model pemerintahan yang sentralistik anomalik tidak dapat dipertahankan lagi, kemudian mengantarkan lahirnya *Desentralisatie Wet* tahun 1903.

Desentralisatie Wet 1903 terdiri dari tiga pasal dimaksudkan untuk mengamandemen RR 1854. Tiga pasal tersebut masing-masing dicantumkan sebagai Pasal 68a menyatakan (bahwa untuk daerah-daerah yang telah dinyatakan sebagai daerah yang telah tersentralisasi akan dialokasikan sejumlah dana tersendiri). Pasal 68b (bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran tersebut akan berada dibawah pengawasan suatu badan penguasa keuangan dan pengaturan anggaran belanja akan diserahkan kepada suatu raad, serta Pasal 68c (bahwa dewan di daerah berwenang mengajukan perkara apapun demi kepentingan daerah kepada Gubernur Jenderal dan juga untuk menarik pajak atas objek tertentu sebagai pendapatan daerah). (Soetandyo Wignjosoebroto, 2010:62).

Pada tahun 1905 keluar maklumat bernama *Locale raaden Ordonantie*, yang antarlain menyatakan bahwa tanpa dilengkapinya suatu raad tidak mungkin suatu daerah menyanggah status daerah terdesentralisasi. Terbentuknya raad adalah prasyarat dimungkinkannya realisasi desentralisasi finansial. Alhasil setelah berjalan tiga puluh tahun kemudian, pada tahun 1926-1928, telah terbentuk local raden di gewesten yang terorganisasi sebagai provinsi (dengan melebur beberapa karisidenan dan locale raden di afdeling van gewesten yang terorganisasi sebagai regentschap (kabupaten).

Namun upaya panjang untuk melahirkan suatu pemerintahan yang terdesentralisasi (otonom), pupus seketika ketika Bala Tentara Jepang datang antara tahun 1942-1945), sistem pemerintahanpun kembali kepada sistem yang *tersentralisasi* demi mendukung kepentingan mobilisasi militer Jepang dalam Perang Dunia ke 2. Tentara Pendudukan Jepang kemudian membagi Jawa kedalam 17 Karisidenan (syuu) persis seperti model sebelum diundangkannya *Bestuur Ordonantie 1922*.

Undang-undang pertama yang terkait dengan masalah desentralisasi yang diundangkan pada tahun 1903, dalam proses kelahirnya dipengaruhi oleh semangat demokrasi liberal yang dikobarkan oleh revolusi rakyat Perancis—walaupun dalam prakteknya untuk wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia), prinsip-prinsip desentralisasi tidak bisa dipraktekan, hingga datang krisis ekonomi dan persoalan rumit yang mengikutinya sejak periode 1880-an-1903, yang memaksa diberlakukannya desentralisasi, yang sejalan dengan pandangan demokrasi liberal. Sementara itu konsep yang mendasari model desentralisasi di era Republik Indonesia khususnya kurun waktu 1960-2000, lebih cenderung berpaham kolektivisme-patrimonial daripada individualisme-liberal. Walaupun harus segera ditambahkan bahwa prinsip dan praktek otonomi daerah beserta implikasinya, di Indonesia untuk kurun waktu setelah era reformasi telah memberikan kesan yang kuat bahwa telah lahir kecenderungan baru yakni kehidupan politik di tingkat lokal yang semakin hari semakin didominasi oleh politik transaksional, politik uang.

Paham Demokrasi Liberal lebih mengedepankan peran sentral para warga dengan identitas sebagai individu-individu yang memiliki kebebasan dan diasumsikan sebagai *causa prima* kehidupan masyarakat dan negara. Sedangkan dalam pandangan paham komuna-patrimonia mengasumsikan kehadiran masyarakat dan negara beserta segala kekuasaan dan kewenangannya sebagai kesatuan supraorganik yang eksistensinya secara kodrati lebih dahulu ada daripada eksistensi sel-selnya yang individual.

Jika ditarik semacam benangmerah pemahaman tentang desentralisasi pada masa kolonial dengan desentralisasi pada masa republik, dapat dinyatakan bahwa

desentralisasi pada masa kolonial dipengaruhi oleh politik liberal yang merupakan respon pejabat pusat atas menguatnya tuntutan warga yang menyadari hak-hak konstitusionalnya sebagai warga. Sementara itu pada masa republik, desentralisasi pertama-tama merupakan hasil prakarsa elit di tingkat pusat – dikarenakan kebijakan yang dianggap rasional atau keterpaksaan yang tidak terelakkan untuk berbagai kekuasaan dengan daerah- masyarakat lokal. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2010:59).

Otonomi Daerah pada masa Republik

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, pada periode singkat pendudukan Tentara Jepang 1943-1945, sistem pemerintahan di Indonesia kembali tersentralisasi, namun sistem tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun –tahun awal berdirinya Republik Indonesia passka Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hubungan antara Pusat dan daerah kiranya dapat digambarkan sebagai suatu hubungan yang anti sentralisasi. Khususnya sentralisasi model komando sebagaimana dipraktikan pemerintah pendudukan Jepang.

Pada awal berdirinya Republik Inbdonesia, dimalkumkan dua undang-undang., yakni UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KNID) dan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Brhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU No.1 tahun 1945 diterbitkan pada tanggal 23 November 1945 adalah merupakan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.Sedangkan Undang-Undang No. 22 tghahun 1948, merupakan Undang-Undang pengganti dari UU No.1 tahun 1945, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat kebebasan.

Pada dasawarsa berikutnya di bawah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 ditandai dengan penekanan lebih jauh kearah desentralisasi, sebagaimana telah ditekankan oleh UU No. 22 tahun 1948, sedangkan UU No. 1 tahun 1945 lebih menekankan pada aspek dekonsentrasi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 merupakan realisasi amanah Pasal 18 dan 20 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia akan dibagi atas “daerah besar” dan “daerah kecil” dengan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Undang-Undang ini didasari motivasi untuk membentuk badan legislasi daerah (KNID) menyusul terbentuknya badan legislasi di tingkat nasional, yang diberi nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Karena UU NO.1 tahun 1945, dianggap tidak bisa membangun suatu sistem pemerintahan daerah yang memadai, sering terjadi rivalitas antara kepala daerah dengan KNID, maka lahirlah UU NO. 22 tahun 1948 untuk menyempurnakan UU No. 1 tahun 1945. Penyempurnaan yang ditekankan oleh UU No. 22 tahun 1948 adalah terkait dengan upaya pengembangan badan legislatif yang lebih kuat, kekuasaan diletakan pada badan legislatif di daerah yang mampu menampung aspirasi rakyat. Pejabat eksekutif dan para birokrat di daerah hanyalah pelaksana keputusan yang diambil badan-badan legislatif.

Undang-Undang terakhir di era Transisi, paska kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1957. Undang-undang ini dapat dikatakan lebih lengkap dan terperinci. Masalah kedaulatan rakyat dalam undang-undang semakin diakui. Misalnya terlihat dalam pemilihan kepala daerah. Terkait dengan pemilihan kepala daerah dalam Undang-

Undang sebelumnya diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 ini tidak lepas dari kelemahan, diantara titik kelemahannya terletak pada bahwa desentralisasi politik dan pemerintahan yang termaktub dalam Undang-Undang ini tidak diikuti oleh desentralisasi finansial yang memadai sehingga kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diharapkan dalam semangat Undang- Undang ini tidak dapat diwujudkan secara maksimal. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2010:66).

Otonomi Daerah pada masa Orde Pemerintahan Otokratik (1960-1990-an)

Pada periode pemerintahan otokratik yang panjang antara 1960-1990-an, sentralisasi kekuasaan terkumpul pada satu tangan yakni di tangan presiden yang kerap kali menggunakan alasan demi kepentingan bangsa. Dengan alasan itu pula desentralisasi dan otonomi daerah tidak lagi diteruskan dan diperbincangkan secara luas.

Pemerintahan yang bersifat otokratik dimulai dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berkaitan dengan lahirnya dekrit Presieden maka UU No.1 tahun 1957 yang merujuk kepada UUD sementara tahun 1950, dinyatakan tidak berlaku dengan alasan “demi hukum”. Sebagai penggantinya lahirlah Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan UUD 1945. Seiring dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, terjadi proses resntralisasi kembali kepala daerah. Menurut subtansi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, kepada daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah, sebagaimana presiden sebagai penguasa tunggal di pusat.

Senralisasi kekuasaan dengan dalih keniscayaan demokrasi terpimpin memperoleh pembenaran dalam bentuk Undang-Undang ketika Presiden Soekarno memaklumkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960. Penpres tersebut dipakai untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Sekretariat Daerah yang keanggotannya diseleksi dan diangkat oleh pemerintah. Seleksi dilakukan dengan menyingkirkan orang-orang dari partai politik yang selama pemerintahan berposisi dengan Presiden Soekarno. Dan pada sisi lain menunjuk orang-orang dari golongan fungsional non partai dan tokoh-tokoh dari daerah yang digolongkan sebagai “utusan daerah”. Kemudian dengan kondisi parlemen yang telah bersih dari orang-orang partai, lahirlah UU No. 18 tahun 1965.

Undang-Undang No. 18 tahun 1965 berusaha mengakomodasi UU No. 1 tahun 1957 dan substansi dari penetapan presiden yang terkait dengan pengaturan pemerintahan daerah. Merujuk pada UU No. 18 tahun 1965, kepemimpinan di daerah tetap berbentuk tunggal, berstatus sebagai pegawai negeri, dipilih dan diangkat oleh pemerintah pusat untuk calon yang diusulkan atau tidak diajukan DPRD (yang telah dibersihkan dari unsur anti revolusi).Sedangkan bantuan finansial dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan asli daerah sangat dimungkinkan agar otonomi yang riil dan luas bagi daerah dapat direalisasikan. Namun bersamaan dengan itu tidak semua desentralisasi politik dan kekuasaan dialihkan dari tangan kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat.

Mencermati isi UU No. 18 Tahun 1965, bahwa kepala daerah sudah berstatus sebagai pegawai negeri dan kontrol pusat atas organ-organ daerah asih tetap besar, apapun yang dijanjikan oleh Undang-Undang tersebut lebih merupakan suatu proses

penguatan sentralisasi kekuasaan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Proses penguatan sentralisasi kekuasaan terus berlangsung sekalipun pada tahun 1966 Rezim Soekarno tumbang. Baru pada tahun 1974 keluar UU No. 5 tahun 1974.

Pada dasarnya UU No.18 Tahun 1965 dengan UU No. Tahun 1974, tidak terlampaui jauh berbeda. Kedua Undang-Undang tersebut bermaksud meminimalkan potensi daerah yang mencoba membuat gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas daerah dan jalannya roda pembangunan.

UU No. 5 Tahun 1974, mendefinisikan otonomi daerah tidak hanya sebagai hak dan wewenang, tetapi juga kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Frasa “sesuai dengan undang-undang yang berlaku” dapat dibaca maknanya sesuai dengan kehendak penguasa yang ada di pusat. Mengapa? Diakrenakan mayoritas anggota DPR yang berwenang membuat undang-undang pada masa itu adalah dari Golongan Karya yang dibina dan dikontrol oleh Presiden. Sementara yang dimaksud dengan “daerah” adalah organ-organ dan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu jika ditinjau dari perspektif struktural, sesungguhnya tidak peristiwa desentralisasi dan otonomi daerah yang signifikan, yang terjadi adalah proses desentralisasi semu atau bentuk “otonom elite pemerintah daerah” yang dikontrol oleh pemerintah pusat. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012:67-68).

Otonomi masa Reformasi, paska 1998

Pada masa paska bergulirnya gerakan reformasi politik Tahun 1998, kehidupan politik di Indonesia khususnya yang terkait dengan aras politik pada tingkat lokal, ditandai dengan suatu perkembangan baru. Perkembangan baru tersebut pada intinya

ada kecenderungan dan dorongan yang kuat dari berbagai kalangan untuk agar pemerintah pusat melakukan desentralisasi politik. Asas pemerintahan yang sentralistik berbalik menjadi asas pemerintahan yang desentralistik. Secara formal kecenderungan tersebut ditandai dengan disyahkannya dua undang-undang. Yakni UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 23 Tahun tentang Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 diandingkan dengan UU No. 5 tahun 1974, dilihat dari paradigma yang digunakannya, adalah dapat dinyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1974, menggunakan menganut paham monisme kebenaran yang mengandalkan “kesatuan dan keseragaman” dalam mengelola kehidupan nasional. Sedangkan UU No. 22 tahun 1999 mendasarkan diri pada asas keragaman dalam bingkai persatuan. Undang-undang ini juga mengurangi kewenangan eksekutif serta mengalihkan pertanggungjawabannya kerjanya dari yang bersifat vertikal ke Pemerintah Pusat menjadi pertanggungjawaban yang bersifat horisontal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999, tidak berusia panjang, karena berbagai kelemahan dan keterbatasan undang-undang ini serta mempertimbangkan “kepentingan politik nasional” seiring dinamika perkembangan masyarakat Indonesia maka undang-undang pemerintah daerah yang lahir di era reformasi ini direvisi dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Beberapa hal penting yang melatgarbelakangi lahirnya UU No. 32 Tahun 2004, antara lain adanya tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal skop dan aspek yang diotonomikan kepada Pemerintah Daerah. Juga perdebatan lokus dimana otonomi akan diberikan apakah pada level Pemerintah di

tingkat Provinsi ataukah pada level Pemerintahan Kabupaten. Serta pada beberapa aspek ada semacam resentralisasi kembali dalam batas tertentu. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012:68-69).

Dari pemaparan tentang dinamika perjalanan pasang surut selama lebih dari satu abad otonomi daerah-desentralisasi politik, sejak 1903- paska reformasi politik Tahun 1998 dikaitkan dengan aspirasi-aspirasi politik lokal di Indonesia dapat diberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, dari perjalanan satu abad lebih sejak era kolonialisme Belanda hingga era paska reformasi politik, nampak adanya berbagai pertimbangan yang rumit dibalik pemeberian otonomi pada masyarakat politik lokal di Indonesia. Berbagai pertimbangan yang kompleks tersebut telah membawa pelaksanaan otonomi politik di Indonesia belum pernah berjalan secara tuntas. Gejala seperti itu kiranya tidak berlebihan disebut sebagai otonomi politik setengah hati. Hal tersebut dapat dicermati dari seringnya berganti aturan undang-undang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, ada lebih dari 15 undang-undang yang pernah dibuat untuk mengatur masalah otonomi politik.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan otonomi politik- desentralisasi pemerintahan ada semacam kecenderungan bgerulannya pola dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi kemudian kembali muncul dorongan pemerintah pusat untuk kembali melakukan resentralisasi pada periode selanjutnya.

Ketiga, ada keengganan bagi kalangan elit politik di Indonesia – elit pemerintah pusat—untuk memberikan otonomi politik-desntralisasi pemerintahan – kepada

masyarakat di level lokal, khususnya otonomisasi yang terkait dengan masalah kewenangan politik dan otonomisasi keuangan.

Keempat, baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada era reformasi politik sekarang ini ada kecenderungan bahwa lahirnya berbagai aturan yang terkait dengan otonomi politik- sesentralisasi politik pada umumnya bersifat reaksioner untuk menjawab tekanan dari berbagai pihak, khususnya tekanan dari masyarakat politik di level lokal.

Kelima, akumulasi dari berbagai kecenderungan dan pola yang diperlihatkan oleh elit politik di Indonesia (pemerintah pusat) selama lebih dari sat abad telah mengantarkan lahirnya suatu kondisi kehidupan politik masyarakat lokal (baik di provinsi, kabupaten) yang kurang stabil dengan tingkat kemakmuran yang tidak merata. Ada semacam perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Inilah yang antarlain dalam sejarah Indonesia telah menimbulkan berbagai dinamika dan gejolak politik lokal di indonesia, seperti gejolak di Aceh dengan munculnya GAM, di Papua dengan lebhirnya Gerakan Papus Merdeka.

Relasi Pusat dan lokal (daerah)

Relasi antara pusat dan lokal di Indonesia selama kurun waktu yang panjang yakni sejak Indonesia merdeka pada tanggal 18 agustus 1945 sampai dengan hadirnya era reformasi tahun 1998, dikelola dengan menggunakan instrumen besar Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI), instrumen ini dimaknai oleh pusat bahwa untuk kepentingan dana tas nama dan demi mempertahankan Negara Kesatuan republik Indonesia maka kepentingan politik lokal atau daerah haruslah tunduk dan dan bersedia ditempatkan sebagai sub ordinasi dari kepentingan politik pusat (pemerintah pusat).

Pemerintah pusat (jakarta) diasumsikan sebagai pemilik original dari berbagai sumber-sumber kekuasaan, sumber-sumber ekonomi penting sampai pada sumber-sumber budaya (cultural resourcess), sedangkan daerah- lokal diposisikan sebagai pihak yang menerima sisa (residu) dari berbagai sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks relasi pusat dan lokal, hadirnya era reformasi politik tahun 1998 dimakanai oleh masyarakat lokal sebagai momentum untuk memperbaiki relasi pusat dan lokal yang lebih adil., relasi yang lebih equal, relasi yang lebih mencerminkan pada rekognisi dan akomodasi aspirasi-aspirasi kepentingan lokal. Rekaman atas perjuangan untuk adanya rekognisi dan akomodasi pada aspirasai-aspirasi lokal ebagaiannya dapat dibvaca pada dua dokumen penting hasil kesepakatan antara berbagai kekuatan politik (partai politik) yang berhasil menenpatkan wakilnya di DPR yakni UU NO 32 tahun 1999 dan UU NO 34 tahun 2004.

Menarik untuk dicermati oleh detail tentang perkembangan perjuangan aspirasi-aspirasi lokal pada dua dokumen penting yakni UU N0 32 tahun 1999 dan UU No 34 tahun 2004 serta situasi dan dinamika politik yang menyertai kelhairan dua undang-undang tersebut.

Dua dokumnen undag-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah di Indonesia tersebut pada satu sisi dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan dan keberhasilan dari oerjuangan masyarakat lokal serta pada sisi lain juga dapat dibaca sebagai terjadinya semacam tawar-menawar antara pusat dan daerah, terutama yang terkiat dengan distrubusi sumbr-sumber kekuasaan ekonomi dan politik. Indikasi adanya tawar-menawar antara kepentingan pusat dan daerah dapat dibaca adanya

perbedaan antara UU no 32 tahun 1999 dan UU 34 tahun 2004, khususnya yang terkait dengan lokus dimana otonomi itu akan diberikan apakah pada pemerintah daerah di level kabupaten ataukah pada Pemerintah Provinsi serta pada cakupan aspek-aspek apa yang akan didekonomikan pada pemerintah daerah. Adanya tawar-menawar itu oleh sebagian pengamat dibaca sebagai adanya gejala otonomi setengah hati.

Otonomi setengah hati, dimaknai bahwa pada sisi pemerintah pusat karena desakan politik yang sangat kuat maka tidak mungkin mengelak dari tuntutan adanya otonomi daerah namun pada sisi yang lain otonomi yang akan diberikan pada daerah masih ada semacam pertimbangan untuk memberikan otonomi pada bidang-bidang yang secara potensial tidak memiliki urgensi ekonomi yang strategis. Bidang-bidang yang secara ekonomi memiliki makna strategis tetap disisakan ada pada penguasaan pemerintah pusat.

Relasi pusat dan daerah di Indonesia setelah keluarnya dua dokumen penting yakni UU NO 22 tahun 1999 dan UU NO 34 tahun 2004, walaupun sudah menunjukkan adanya perkembangan yang positif bagi pengakuan aspirasi-aspirasi kepentingan lokal namun dalam banyak hal relasi antara pusat dan lokal, masih menempatkan pusat dalam posisi yang powerful dalam sesai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandangan Kritis pada Otonomi Daerah

Setelah satu dasawarsa Otonomi berlangsung yang antara lain ditandai dengan dilaksanakannya Pemilihan kepala daerah secara langsung, diarahkannya berbagai urusan menjadi kewenangan pemerintah daerah, ada beberapa pandangan kritis perlu disampaikan pada perjalanan otonomi daerah;

Pertama, setelah berlangsung sekitar satu dasawarsa otonomi daerah ada sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif era otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik di tingkat lokal bahkan berbagai aktor lokal telah memiliki akses untuk ikut merumuskan kepentingan lokal. Sedangkan dari sisi negatifnya era otonomi daerah juga telah menghadirkan perkembangan politik di tingkat lokal yang tidak diharapkan dari bergulirnya era otonomi daerah. Hal tersebut antarlain semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, serta munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah.

Kedua, setelah eksperimen selama kurang lebih satu dasawarsa erbagai kalangan mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya usulan agar Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat perlu ditinjau ulang agar Kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan alasan pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan politik biaya tinggi dan maraknya politik uang di masyarakat lokal. Serta telah menimbulkan terjadinya semacam pem, belahan dan fragmentasi sosial di masyarakat lokal dikarenakan sering kali terjadi peristiwa politik. Hal tersebut juga telah mengurs enegeri masyarakat untuk urusan politik sementara itu urusan ekonomi menjadi terabaikan.

Ketiga, legitimasi politik dan stabilitas politik yang diharapkan datang setelah bergulirnya era otonomi daerah ternyata juga elum sepenuhnya daapt diciptakan. Bahkan dalam batas tertentu era otonomi daerah telah memberikan semacam dorongan dan suasana terjadinya dinamika kehidupan politik ditingakt lokal yang berpeluang

menjurus ke arah distabilitas politik dan menimbulkan konflik horisantal maupun konflik vertikal.

Keempat, keserjahteraan masyarakat di tingkat lokal belum dapat diwujudkan setelah berlangsungnya era otonomi daerah. Belum terlihat adanya kemajuan yang berarti di banding dengan era sebelum adanya otonomi daerah. Sering muncul ungkapan era otonomi daerah dan reformasi politik di Indonesia benar telah membawa perubahan kesejahteraan tetapi umumnya masih terbatas pada elit politiknya.

Kelima, secara umum dari sisi perspektif yang kritis, otonomi daerah masih dinilai gagal menghadirkan kehidupan politik di tingkat lokal yang lebih demokratis secara substansial yakni kehidupan demokratis yang diiringi dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Alih-alih menghadirkan kehidupan yang secara kualitatif lebih demokratis dan sejahtera, era otonomi daerah dan gegap gempita politik lokal dengan segala ritual politik yang tidak terhitung jumlahnya malah telah menimbulkan situasi involusi demokrasi.

Pandangan –pandangan kritis tentang kehidupan politik, lebih khusus lagi tentang dinamika politik lokal sebagaimana dikemukakan diatas nampaknya sejalan dengan kecenderungan yang sedang terjadi pada level yang lebih global, yakni sedang terjadi semacam “penghinatan” terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Kini bangsa-bangsa, di seluruh dunia berkiprah dan berpusar dalam paradigma dan ideal-ideal demokrasi. Namun situasinya sangat berbeda antara peluang demokrasi baru pada tahun 1940-an hingga tahun 1960-an. Sepanjang masa itu, negara-negara kampium demokrasi terasa masih terus memancarkan sinarnya ke seluruh dunia. Kala

itu demokrasi baru seperti di Indonesia punya deretan mercusuar tempatnya terbantu melihat arah dan cakrawala. Akan tetapi sejak tahun 1990-an,-- justru tidak lama setelah Uni Sovyet dan Tembok Berlin runtuh serta terbitnya buku *The End of history and Last Man*, karya Francis Fukuyama—kekuatan kegelapan kembali menunjukkan taringnya dan bergerak serempak menggerogoti negara-negara kampiun demokrasi dari dalam (Mochtar Pabottinggi, 2012:6).

Di Amerika misalnya kuku-kuku kapitalisme korporat dan apa yang disebut oleh Chalmers Johnson, dengan istilah the Military-industrial complex, secara tidak terbendung mulai mengintervensi mekanisme dan proses-proses inti dalam sistem kenegaraan demi memarginalkan para pembayar pajak dan menjarah dunia. Secara sangat kasar kekuatan-kekuatan kegelapan telah mengkhianati prinsip-prinsip Bapak pendiri bangsanya sendiri dalam The Declaration of independence. Kritik keras ditujukan pada demokrasi mengingat betapa parahya ketimpangan antara yang kaya dan miskin, betapa merajalelanya the one percent supremacist, dalam penentuan kebijakan-kebijakan negara di ketiga cabang pemerintahan (legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). The criminalization of transparency dissents, and whistleblowers. Itu semua bermuara pada kenyataan bahwa telah tergadainya demokrasi kepada penawar tertinggi “ *Democracy is sold to the highest bidder*”. (Mochtar Pabottinggi, 2012:6).

Dua Perspektif Relasi Pusat dan Daerah

- **Bagi negara-negara yang disepakati dalam konstitusi mengambil bentuk**

1. Negara kesatuan (Unitaris State)

Kekuasaan (power) berada di pusat (sentral) Government kemudian diberikan kepada lokal government., sehingga daerah merupakan residu. Di dalam konstitusi kekuasaan ada pada pemerintah pusat (Central Government).

2. Bentuk kekuasaan federalis

Dalam konstitusi kekuasaan ada pada negara bagian , sisanya diberikan sesuai perjanjian pemerintah federal.

Masalah distribusi pemerintahan pusat ke daerah:

1. Dalam negara kesatuan ada kesenjangan distribusi
2. Adanya ketidakadilan di dalam distribusi
3. Daerah-daerah tidak bisa berkembang secara optimal
4. Adanya ketimpangan penduduk

Hal-hal yang mempengaruhi relasi pusat dan daerah (dinamika politik loka)

1. Faktor historis (masa colonial, orde lama,orde baru), berupa peminggiran masyarakat lokal menggunakan Undang-Undang
 2. Peminggiran hak ulayat adat dengan dikeluarkannya sertifikat BPN
 3. Perubahan dan pergeseran kekuatan politik nasional (*role of game baru*) melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 23 tahun 1999
 4. Masyarakat menjadi miskin karena struktur UU
- Pergeseran relasi antara pusat dan daerah

Semenjak reformasi 1998 ada aspirasi kuat untuk mengakhiri dominasi dengan lahirnya otonomi daerah bersama semangat desentralisasi. Ada tinjauan ulang mengenai alokasi dana umum untuk daerah.

Berbagai Kasus Studi dinamika Politik Lokal

- **Perbedaan relasi pemerintah pusat dan daerah antara Thailand dan Indonesia**

Thailand	Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Didukung militer, teknokrat, ✓ Persaingan aktor di pusat dan lokal ✓ Ada aktor (bisnismen) ✓ Bersifat Gradual (bertahap) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soeharto didukung oleh pengusaha ✓ Bersifat Jumping (mendadak)

Dari table tersebut Nampak bahwa di Thailand dikerjakan secara bertahap (gradual). Hal ini akan berjalan lancar sepanjang menguntungkan gradual politik. Perlu ditegaskan pula bahwa dinamika politik hubungan pusat dan daerah di Thailand sangat dipengaruhi sekali oleh sejarah politik dan jatuh-bangunnya demokrasi di Thailand.

- **Sentralisasi kekuasaan**

Sentralisasi tidak sama dengan otoriter. Sentralisasi dapat berjalan tanpa otoriter sepanjang disepakati oleh parlemen eksekutif serta suara rakyat didengarkan sesuai konteks ruang dan waktu. Sentralisasi bisa terjadi pada negara dengan sistem serikat ataupun unitaris. Sentralisasi tidak dapat dipaketkan dengan sistem pemerintahan. Yang menjadi persoalan pembahasan dalam politik lokal ialah sentralisasi yang menyangkut sumber kekuasaan

otoriter dan *economic resoursife* Perdebatan pada lokal menyangkut dua hal yaitu *otoritative* dan *economic resoursive*.

- Perbandingan politik lokal sebelum tahun 1998 dan setelah tahun 1998 :

a. Sebelum tahun 1998

Sebelum tahun 1998 menghasilkan orang elit lokal sebagai hasil kolaborasi dengan patron pusat. Terdapat *sedogoverment*. Pelemahan elit lokal ditentukan oleh patron politik lokal dapat dibaca melalui otonomi daerah. Dengan adanya reformasi tidak secara otomatis membawa kesejahteraan rakyat.

b. Setelah tahun 1998

Sejak reformasi bergulir regulasi pemimpin daerah mnyebabkan munculnya kelembagaan baru (DPD), partai lokal daerah, ambudsmen dan pilkada langsung.

Terdapat berbagai macam problem lembaga baru, yaitu:

1. Lembaga baru merupakan jawaban yang reaksioner dan parsial terhadap tuntutan-tuntutan yang sesaat baik parlemen, adhoc, komisi negara, KPU dan lain-lain.
2. Setelah dibentuk lembaga sering diikuti support anggaran yang memadai dan tidak terencana dengan baik sehingga fungsinya mandul.
3. Lembaga itu tidak didukung oleh SDM yang memadai
4. Ada *over lapping* (tumpang tindih) dengan lembaga yang baru.
5. Tumbuhnya kabupaten atau provinsi baru, hanya karena pertimbangan elit.
6. Lahirnya lembaga-lembaga baru tingkat lokal

7. Pemekaran wilayah yang sulit dikendalikan.

Terjadinya problem kelembagaan pada era transisi karena adanya kondisi kebelengguan yang tidak mengerti masa lalu dan menggunakan magle vulkow (ada politik pengetahuan yang dating dari luar, misalkan dari Amerika yang liberal sehingga tidak sesuai dengan Indonesia.

Problem DPD

1. Kekuasaan sangat minim
2. Tidak punya instrument
3. Tidak punya anggaran

Problem Pilkada

1. Konflik horizontal
2. Menimbulkan politik uang (money politic)
3. Menimbulkan politi kartel
4. Menimbulkan *high cost* politik

Politik Lokal : Dua perspektif Unitaris dan Federalis

Hak-hak masyarakat politik lokal atau yang mengatasnamakan aspirasi politik lokal, mempunyai pengjelasan yang berbeda dilihat dari sudut pandang dari perspektif unitaris dan federalis. Dari sudut pandang federalis maka negara bagian (kehidupan masyarakat politik pada level lokal) diposisikan sebagai komunitas yang original memiliki hak-hak politik. Demikian juga pemerintahan di tingkat lokal, kepentingan

ekonomi, hak-hak kultural juga diakui dari asal muasalnya (aslinya) dimiliki oleh masyarakat di tingkat lokal. Sedangkan pemerintah pusat diposisikan menerima residu (sisa) dari kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah pusat (central govermen).

Sedangkan dalam perspektif unitaris memiliki pandangan bahwa kekuasaan itu pada mulanya berasal dari pemerintah Pusat, kemudian dengan pertimbangan tertentu kekuasaan tersebut diserahkan atau didelegasikan kepada pemerintah daerah (masyarakat lokal) melalui berbagai model ada dengan model desentralisasi, dekonsentrasi, medebewin. Dalam pandangan unitaris masyarakat politik pada level lokal diposisikan menerima sisa kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat. Pemerintah Pusat berada dalam posisi yang powerful.

Dua perspektif tersebut dalam perjalanannya terlembaga dalam bentuk Negara Kesatuan (Unitaris state) dan negara serikat (federalis state). Kedua sistem tersebut tidak ada yang sempurna, dalam penerapannya seringkali dipengaruhi oleh latarbelakang historis dan latar belakang sosial, budaya, etnis dari masyarakat yang akan menggunakan sistem tersebut.

Negara Indonesia dari sisi formal, sebagai tercantum dalam konstitusi negara Republik Indonesia, telah memilih desain Negara Kesatuan. Ini maknanya kekuasaan itu pada dasarnya ada di pemerintah pusat. Walaupun dalam perjalanannya dijumpai suatu perkembangan yang secara isinya (ruhnya) mengarah kepada sistem federalis – minimal mengadopsi prinsip-prinsip—negara federalis. Hal tersebut gejalanya nampak jelas semenjak reformasi politik bergulir sejak tahun 1998.

Transformasi Kebudayaan Politik dan Dinamika Politik Lokal: Kasus Kotagede, Yogyakarta

Pengantar

“ Dan
Kotagede
Masih Tetap “Sedakep”
Sambil Tersenyum Sejuta Makna
Ketika Budaya Serba Boleh
Terus Mengguyur, Mengelupaskan, Merontokkan,
Dan Menghayutkan Lumut-Lumut Tradisi Islami
Yang Semakin Tak Kuasa Menempel...¹

Kutipan Iklan layanan masyarakat yang mirip puisi ini, mengisaratkan adanya sesuatu yang telah dan sedang berubah pada masyarakat Kotagede. Menghadapi perubahan tersebut ada sebahagian elemen masyarakat yang merasa gelisah, mempertanyakan mengapa perubahan yang terjadi malah mengelupaskan tradisi-budaya yang Islami, yang sudah ada sebelumnya. Kebudayaan yang Islami nampaknya harus berkompetisi dengan budaya baru yang disebut dengan budaya serba boleh (permisif).

Uraian serta pembahasan berikutnya akan mencoba mencermati dialektika antara berbagai subkultur budaya yang ada dan berkembang di Kotagede. Pada uraian berikut ini akan dikemukakan suatu analisis dari suatu study kasus di Kotagede. Study kasus ini diperlukan untuk dapat melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih kecil, yakni pada level unit analisisnya komunitas tingkat Kecamatan. Pemilihan lokasi Kotagede mengingat telah ada study yang dilakukan oleh Mitsuo Nakamura, dalam konteks kepentingan penelitian ini yaitu proposisi Nakamura tentang

¹ Iklan Layanan Masyarakat dipersembahkan oleh Panitia Penerbitan Brosur Lebaran AMM Kotagede, No.39/1421 H :111.

transformasi kebudayaan yang lebih bersifat indeogonis. Transformasi kebudayaan yang berpijak pada prinsip-prinsip nilai yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Implikasi dari masyarakat yang melakukan transformasi budaya dengan model indeogonis, adalah memungkinkan tumbuh menjadi suatu masyarakat yang memiliki kemandirian, mampu menjaga jarak dari kooptasi pihak pemerintah baik kooptasi politik, ekonomi, juga budaya.

Pembahasan pada uraian bab ini, difokuskan untuk mencermati perkembangan kontemporer masyarakat Kotagede, khususnya perkembangan gerakan Islam Modern Muhammadiyah, yang dalam perjalanannya telah mampu membentuk suatu komunitas dengan sub kultur santri modernis. Hasil pencermatan itu akan dipakai untuk menguji apakah proposisi yang dikemukakan oleh Mitsuo Nakamura masih memiliki signifikansi, ataukah sudah perlu revisi dan penjelasan.

A. Pendahuluan

Kotagede tempat penelitian (study kasus) ini dilakukan, merupakan kota yang penting (ideal) dilihat dari tipologi kota kerajaan Islam. Kotagede memiliki posisi yang penting karena kota ini antara lain pernah menjadi Ibukota Kerajaan Mataram Islam.² Di Kotagede ini, menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Mitsuo Nakamura³ (1983), ditemukan adanya transformasi kebudayaan yang lebih merupakan penjelmaan

² Gelar yang diberikan kepada raja Mataram yang mengindikasikan sebagai sebuah Kerajaan Islam antara lain dapat dibaca pada Gelar yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, yang dinobatkan menjadi Raja Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 1755, dengan gelar "*Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengkubowono Senapati Ing Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*". Sedangkan hari jadi kota Yogyakarta diperingati tanggal 7 Oktober, yang diambil dari tanggal saat pertama kali Keraton ditempati oleh raja hari Kamis tanggal 7 Oktober 1916. Sumber buku Profil Yogyakarta.

³ Mitsuo Nakamura, *bulan Sabit Muncut dari balik Pohon Beringin*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1983:15.

dari dalam bukan sebagai impor ideologi baru yang sudah sempurna dari lain tempat yang sangat dipengaruhi oleh munculnya gerakan pemurnian Islam (Muhammadiyah). Disamping itu di Kotagedhe juga ditemukan interaksi antara berbagai subkultur kebudayaan, yakni antara subkultur santri, subkultur tradisional(priyayi) dan subkultur abangan.⁴

Masalah transformasi kebudayaan di Kotagede, semenjak diteliti oleh Mitsuo Nakamura tahun 1970-1972, masalah tersebut belum pernah secara khusus diteliti ulang. Disisi lain telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan mendasar dalam masyarakat Indonesia, termasuk juga di masyarakat Kotagede. Oleh karenanya sangat penting dan menarik untuk dilakukan penelitian ulang atas konsep transformasi yang telah dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura.

Menurut Mukti Ali,⁵ dari hasil penelitian di Kotagedhe, Mitsuo Nakamura, lebih tidak memandang Islam sebagai simbol solidaritas politik, ia lebih melihatnya, memahami keadaan intelektual, relevansi etis dan pentingnya amalan ritus Islam sebagaimana yang mereka (ummat Islam) lakukan dalam konteks kehidupan yang sebenarnya di Kotagedhe. Islam bukan agama yang pudar, Islamisi Jawa bukan peristiwa yang paripurna, tetapi suatu proses yang terus berlangsung. (kasus Muhammadiyah, menunjukkan sebahagian proses berlanjutnya Islamisasi di Jawa. Islam merupakan bagian integral tradisi agama Jawa. Pertanyaanya seberapa luas (pengaruh) orang-orang luas dan mengapa Islam masih bertahan?.

Perspektif Mitsuo Nakamura, sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Ali, bahwa Islam di Jawa bukanlah simbol solidaritas politik, tidak sejalan dengan Harry J Benda,

⁴ Mitsuo Nakamura, Ibid, 1983:222.

⁵ Mukti Ali, Kata pengantar, dalam Mitsuo Nakamura, Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, Gajah Mada University Press, 1983:vii.

yang justru memiliki pandangan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangat tipis. Islam adalah suatu *way of life* dan agama; dan meskipun di Indonesia proses pengislaman dari dulu senantiasa merupakan suatu proses setahap demi setahap, kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.⁶ Namun kedua sarjana ini sama-sama sependapat bahwa sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik di Indonesia.⁷

Dalam pencermatan Mukti Ali, Mitsuo Nakamura, setelah mengamati Kotagedhe, ia sampai pada kesimpulan, bahwa Islam Ortodoks dalam bentuk pergerakan reformasi, Muhammadiyah, telah muncul dari dalam Islam Jawa Tradisional lebih sebagai transformasi intern, daripada sebagai ideologi baru yang diimpor dan yang telah, sedang dan akan membawa perubahan-perubahan yang mendalam dalam aspek-aspek sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik kehidupan orang Jawa.⁸

Pandangan yang agak berbeda tentang Islam di Jawa dikemukakan oleh Benda, yang menyatakan bahwa di sebagian besar Pulau Jawa, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebahagian tradisi penduduk asli, sebahagian tradisi Hindu-Budha, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kekakuan doktrinernya. Dan memang Islam Jawa dalam waktu yang cukup panjang lebih penting dalam arti politik daripada religius. Sekurang-kurangnya pada mulanya dia tidak menimbulkan perubahan yang radikal dalam kehidupan agama dan sosial di Pulau Jawa. Hal ini berbeda dengan perkembangan Islam yang ada di

⁶ Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980:32.

⁷ Harry J Benda, *Ibid*, 1980:33.

⁸ Mukti Ali, *Ibid*, 1983:viii.

Minangkabau, yang nampak lebih murni, agresif dan kurang toleran.⁹ Menurutny sesungguhnya adalah sufisme atau mistisme Islam, bukannya ortodoksi Islam, yang meluaskan pengaruhnya di Jawa. Dan sekurang-kurangnya di Indonesia Islam tidak membangun suatu masyarakat yang terpisah, dan memisahkan orang-orang Islam dan Hindu secara tegas. Daya Hidup yang langgeng dari Islam Jawa yang sinkretis, berhubungan dengan tegaknya hegemoni Mataram Islam atas musuh-musuhnya di pesisir yang lebih dinamis, agresif, urban.¹⁰

Berkaitan dengan kajian Islam di Indonesia, ada dua pandangan (yang menjadi pusat perhatiannya). Pertama memfokuskan pada melemahnya kekuatan politik ummat Islam. Yang kedua, memperhatikan tentang pertumbuhan jumlah pemeluk yang *serius* dalam arti sosiologis. Bagaimana menerangkan hubungan antara susutnya kekuatan politik ummat Islam dan bertambah besarnya reformasi sosial kaum muslimin. Mitsuo Nakamura memberikan jawaban, bahwa Islam adalah suatu agama, suatu kepercayaan bagi pemeluknya dan bukan suatu tanda pengelompokkan politik. Politik sebenarnya adalah hanyalah merupakan perhatian sampingan bagi kehidupan sehari-hari kebanyakan kaum Muslimin.¹¹

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

Apakah teori transformasi kebudayaan di Kotagede yang dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura, masih memiliki signifikansi setelah Masyarakat Indonesia mengalami perubahan mendasar diberbagai aspek kehidupan?

⁹ Harry J Benda, Ibid, 1980:30.

¹⁰ Harry J Benda, Ibid, 1980:31.

¹¹ Mukti Ali, kata pengantar, dalam *buku Matahari Terbit dari balik Pohon Beringin*, UGM Press, Yogyakarta, 1985.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Mitsuo Nakamura, sekitar tahun 1970 sampai 1972 di Kotagedhe, Yogyakarta. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan dialektika kebudayaan antara subkultur santri (Islam reformis Muhammadiyah) dengan sub kultur tradisional dan pengaruh budaya Barat.

Penelitian ini memiliki manfaat dan sumbangan bagi pengembangan serta pemahaman lebih mendalam tentang teori-teori perubahan kebudayaan di Indonesia. Apakah transformasi kebudayaan yang terjadi di Indonesia itu bersifat continue, lebih merupakan proses dari dalam ataukah transformasi kebudayaan yang berlangsung di Indonesia itu adalah merupakan impor dari budaya dan ideologi luar. Disamping itu juga memiliki manfaat untuk menemukan model transformasi kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Yakni menemukan varian model transformasi kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

B. Kerangka teori (kerangka konseptual)

Menurut perspektif teori yang dikemukakan oleh Mitsuo Nakamura, diprediksikan bahwa dalam proses transformasi kebudayaan di Kotagedhe, subkultur budaya santri (Islam reformis yang dibawa oleh gerakan Muhammadiyah) akan mengambil posisi penting dalam proses transformasi kebudayaan tersebut, dibandingkan dengan pengaruh subkultur tradisional dan abangan.¹² Namun sebagaimana dikemukakan oleh Munir Mulkan¹³ dari temuan penelitian karya disertasinya secara nasional telah terjadi proses priyayinisasi kaum santri (proses profesionalisasi) dalam komunitas Muhammadiyah. Sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru, yang telah

¹² Mitsuo Nakamura, *Ibid*, 1983:224.

¹³ Abdul Munir Mulkan, *Teologi Petani: Respon Masyarakat Petani terhadap Islam Murni*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Unisa no. 41/xxii/iv/2000, UII, Yogyakarta.

menyebabkan adanya perubahan besar komposisi anggota Muhammadiyah menjadi didominasi oleh kaum profesional dan pegawai negeri, padahal sebelumnya anggota Muhammadiyah didominasi oleh kaum pedagang. Perubahan komposisi anggota Muhammadiyah antara lain telah mengakibatkan melemahnya pengaruh gerakan pembaharuan Islam, dalam perubahan budaya masyarakat, dikarenakan merosotnya kekautan ekonomi para pendukung gerakan Muhammadiyah, karena banyak anak keturunan pendukung gerakan ini tidak meneruskan pekerjaan dagang dari orang tuanya. Dengan banyaknya anak-anak dari keluarga Muhammadiyah yang beralih profesi dan tidak lagi meneruskan kegiatan perdagangan orang tua mereka, telah menyebabkan gerakan Muhammadiyah ini sangat tergantung dengan Pemerintah dalam hal dukungan dana. Hal ini terjadi karena dukungan keuangan dari anggota yang kebanyakan pegawai negeri tidak dapat diandalkan untuk mensupport kebutuhan dana gerakan Muhammadiyah.

Disamping itu di dalam tubuh gerakan Muhammadiyah telah muncul pula pembangkangan terselubung pada syari'ah (tarjih), yang dirumuskan oleh gerakan pemurnian Muhammadiyah.

Sementara itu menurut pandangan Kuntowijoyo, menyatakan bahwa perkembangan kesadaran keagamaan umat yang merupakan bagian dari kebudayaan tidak merupakan evolusi yang lurus, artinya yang kemudian tidak menggantikan yang lebih dulu, tetapi tumpang tindih (overlapping). Perkembangan kesadaran umat ditentukan oleh mobilitas sosial, tidak oleh kekuasaan politik.¹⁴

¹⁴ Kuntowijoyo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, 21, Juli 2001:20.

Perkembangan kesadaran ummat Islam yang merupakan bagian dari kebudayaan tersebut memasuki abad ke-20, mengikuti klasifikasi Kuntowijoyo berada pada periode Ilmu. Periode Ilmu ini ditandai dengan berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan, di Kampung Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah mengadopsi ilmu-ilmu modern sepenuhnya antara lain dengan mendirikan sekolah.¹⁵ Sekolah-sekolah Muhammadiyah menyebabkan dan mendorong adanya *mobilitas sosial*. Mula-mula *mobilitas sosial* itu hanya melahirkan elit terpelajar, yang terdiri dari para guru, pegawai negeri, pegawai perusahaan, namun pada akhir tahun 1980-an mobilitas itu meskipun tidak terkait dengan Muhammadiyah telah melahirkan elite baru, yaitu kaum profesional yang terdiri dari eksekutif, akademisi, pegawai tinggi, intelektual. Peristiwa yang merupakan hasil evolusi sosial yang panjang itu secara resmi ditandai dengan munculnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) pada tahun 1990, organisasi Islam non-politik dan non-sektarian.¹⁶ Akhirnya menurut Kuntowijoyo, Ketika umat Islam mengalami mobilitas sosial, berubahlah alam pikirannya. Mobilitas sosial pasti disertai mobilitas kultural, cepat atau lambat.¹⁷ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sejarah termasuk didalamnya juga perubahan kebudayaan dalam periode Ideologi dan ilmu yang terpenting adalah adanya mobilitas sosial khususnya mobilitas vertikal (*vertical social mobility*), serta adanya pribadi kreatif (*creative personality*) dan minoritas kreatif (*creative minority*).¹⁸

¹⁵ Lihat, Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Ibid*, 2001:15.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Ibid*, 2001:3.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Ibid*, 2001:8.

Pandangan Kuntowijoyo tentang perkembangan kesadaran masyarakat sejalan dengan pandangan van Peursen,¹⁹ ketika ia berbicara tentang suatu *model kebudayaan yang bertahap tiga* : Tahap mitologis, ontologis dan fungsional. Ketiga tahap tersebut tidak sebagai urutan anak tangga, dimana anak tangga yang berikutnya lebih tinggi daripada anak tangga yang sebelumnya, melainkan bahwa ketiga anak tangga itu juga dimana progresi itu ada, masing-masing mengandung unsur-unsur tahap-tahap lainnya, biarpun di dalam imbalan dan bentuk penjelmaan yang berbeda-beda.

Bagi van Peursen , Bila kebudayaan dipandang sebagai sekolah umat manusia , maka dapat juga dinamakan “pendidikan terus-menerus”, pendidikan di sekolah ini tak ada tamatnya dan sepanjang sejarah hubungan antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan itu diatur oleh rencana-rencana baru. kebudayaan adalah ibarat titik yang belum tamat, atau ceritera yang belum selesai, kebudayaan mempunyai gerak pasang-surut antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan itu, ketegangan antara imanensi dan transendensi.²⁰

Kiranya perlu dikemukakan bahwa pengertian kebudayaan yang dipakai dalam penelitiannya merujuk pada perspektif pengertian kebudayaan sebagaimana dianut oleh C.A. van Peusen. Dalam konteks ini, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang. Kebudayaan tidak lagi diartikan sebagai segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani. Dalam perspektif Peursen, kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, sebagai sebuah proses, “learning process” yang terus-menerus sifatnya.²¹ Serta

¹⁹ Soejatmoko, Prakata, dalam C.A. van Peursen, *Strategi kebudayaan*, Kanisius ,Yogyakarta, 1976:6, lihat juga, C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, 17-19.

²⁰ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1976:24.

²¹ C.A. van Peursen, *Ibid*,1976:10.

perspektif yang dikemukakan oleh James F. Barnes, kebudayaan diartikan sebagai cara hidup (the way of life) suatu masyarakat, yaitu kompleksitas kepercayaan dan perilaku masyarakat yang diungkapkan dalam berbagai bidang.²²

Dengan mempertimbangkan perspektif teori sebagaimana dikemukakan di atas transformasi kebudayaan di Kotagede, ada kemungkinan tidak lagi sebagaimana dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura. Akan tetapi transformasi kebudayaan di Kotagede akan dipengaruhi oleh dialektika antara perubahan di dalam intern subkultur santri berhadapan dengan subkultur abangan dan budaya barat.

C. Dinamika Budaya Politik Lokal Berbasis Indegenous Values

Pertanyaan sentral yang ingin dijawab dalam penelitian di Kotagedhe ini, adalah apakah transformasi budaya yang berlangsung di Kotagedhe, seperti diprediksikan oleh Mitsuo Nakamura. Dimana ia membuat proposisi bahwa nilai serta etos kerja yang ada pada sub kultur santri modern, akan mampu memimpin perubahan dimasa mendatang. Prediksi Mitsuo Nakamura tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta etos yang ada pada masyarakat sub kultur santri Modern, adalah bersifat indeogonis. Suatu nilai-nilai yang diturunkan dari keyakinan agama, (tauhid) dari gerakan Islam modernis (Muhammadiyah). Bukan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang dicangkok dari budaya non Islam. Dengan kondisi yang demikian maka masyarakat subkultur santri modern akan mampu leading memimpin perubahan serta menghadapi perubahan kedepan, dibandingkan dengan subkultur masyarakat tradisional dan Priyayi.

²² James F. Barnes, (et.al) *The World of Politics A Concise Introduction*, New York, St, Martin's Press Inc, 1980:33.

Untuk keperluan pengujian teori transformasi budaya sebagaimana dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura, telah dilakukan study dokumentasi yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat Kotagede, serta wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Kotagede. Dengan kombinasi antara kajian yang bersifat dokumenter dan pencarian data primer diharapkan akan dihasilkan suatu temuan penelitian yang akurat.

Namun masyarakat Kotagede, sebagai sebuah komunitas dalam kenyataannya tidaklah steril terhadap pengaruh perkembangan yang terjadi diluar teritori Kotagede. Masyarakat Kotagede sebagaimana masyarakat pada umumnya juga dalam masalah budaya telah dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi diluar masyarakat Kotagede baik perkembangan ditingkat regional maupun perkembangan di tingkat nasional. Dengan asumsi seperti itu, maka dalam rangka mencermati perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kotagede, kiranya sangat penting juga dikemukakan perkembangan yang terjadi secara nasional, khususnya yang dialami oleh Muhammadiyah. Hal yang demikian perlu dikemukakan mengingat masyarakat Kotagede, diasumsikan secara budaya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah. Dengan kata lain perkembangan yang terjadi di Muhammadiyah kurang lebih juga akan terjadi di masyarakat Kotagede yang sebahagian besar ada dalam pengaruh kebudayaan subkultur santri modern.

(1). Perkembangan Orientasi kultural Muhammadiyah

Strategi kebudayaan yang merupakan landasan gerak/kiprah Muhammadiyah didasarkan pada doktrin da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kata lain doktrin da'wah amar ma'ruf nahi munkar yang melekat pada Muhammadiyah, dalam praksis-historisnya, diimplementasikan melalui empat mekanisme kerja strategi kebudayaan. *Pertama*, dimensi ijtihad dan tajdid dengan landasan pokok al-Quran dan as-sunnah

sehingga Muhammadiyah berwatak non-madzab. *Kedua*, aktualisasi cita-cita perjuangan melalui sistem organisasi sehingga Muhammadiyah mengangkat kepentingan dan keselamatan pribadi ke wajah kepentingan sosial. *Ketiga*, corak anti-keamanan terhadap lembaga keagamaan yang terlalu bersifat kaku sehingga Muhammadiyah lebih memusatkan pemikiran keagamaannya pada wilayah praksis-sosial. *Keempat*, adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman sehingga membuat Muhammadiyah lincah dalam memperjuangkan aspirasi dan mempertahankan prinsip dasar perjuangannya dalam berbagai era perubahan sosial di Indonesia.²³

Sejak awal sebenarnya Muhammadiyah menggunakan strategi kultural (kebudayaan),²⁴ hanya saja dalam perkembangannya, karena tuntutan zaman, mereka juga mengadopsi strategi struktural dan mengabaikan strategi awalnya. Pilihan untuk merubah strategi adalah hal yang wajar dapat dianggap sebagai sebuah dinamika dalam organisasi.

Menurut temuan penelitian Suwarno, perjalanan sejarah Muhammadiyah yang panjang sejak masa kolonial Belanda hingga akhir masa Orde Baru (1912-1998) dapat dipetakan dalam 4 periode orientasi sebagai berikut;

1. Orientasi Religius-Kultural (1912-1937)
2. Orientasi Politis/Struktural (1937-1971)

²³ Lihat, artikel “Strategi Kebudayaan Muhammadiyah” yang disarikan dari makalah tim Majelis Tarjih di Munas Banda Aceh, dalam Suara Muhammadiyah, No. 15/80/1995, 1-15 Agustus 1995, hal 16. Lihat juga M Amien Abdullah, “Religiositas Kebudayaan: Sumbangan Muhammadiyah dalam pembangunan Bangsa”, dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43, hal 109-116.

²⁴ Pada intinya strategi kultural bermakna usaha memperjuangkan agar Islam tampil sebagai sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan strategi struktural berusaha mengartikulasikan Islam dalam bentuk simbol-simbol politik yang formal seperti memperjuangkan berdirinya negara Islam, penerapan syariat Islam, berdirinya partai Islam. Lihat, Kuntowijoyo, “Tiga Strategi Pergerakan Islam: Struktural, Kultural, dan Mobilitas Sosial”, dalam Nurhadi M. Muswir (ed) Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah (Almanak Muhammadiyah Tahun 1997M/1417-1418H) Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah, 1996:25-34.

3. Orientasi Sosial-Kultural (1971-1995)
4. Orientasi Politis-Kultural (1995-1998).²⁵

Seelanjutnya dikemukakan bahwa pada periode 1912-1937, Muhammadiyah berorientasi religius-kultural, maksudnya strategi dasar yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah kultural tetapi ruang gerak orientasinya lebih pada bidang keagamaan (religius). Kemudian Muhammadiyah berorientasi politis/struktural dalam periode 1937-1971, maknanya organisasi ini mengadopsi strategi politis/struktural sebagai strategi dasarnya, baik dengan mengindahkan ataupun menafikan strategi kultural sebagai basis strategi awalnya. Dalam periode 1971-1995, Muhammadiyah kembali menggunakan strategi dasar kultural namun orientasi ruang gerakannya lebih menjangkau bidang-kawasan sosial-kemasyarakatan. Sedangkan pada periode 1995-1998, Muhammadiyah tetap bertumpu pada strategi kultural tetapi ada kecenderungan berorientasi politis dalam ruang gerakannya.²⁶

Muhammadiyah pada periode 1995-1998, ketika dipimpin oleh Dr. Amien Rais, dengan tetap menggunakan doktrin amar ma'ruf nahi munkar, dengan lebih menitikberatkan pada nahi munkarnya, memiliki kecenderungan berorientasi politik. Idiom yang dikenalkan oleh Amien Rais, politik adi-hulung (high politics dalam melakukan kritik kepada pemerintahan Orde Baru, yang saat banyak mengidap penyakit, yang kemudian terumuskan dalam penyakit KKN. Muhammadiyah setelah era reformasi tepatnya melalui Mukhtamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, telah melakukan perubahan penting, melalui salah satu keputusan Mukhtamar telah mengganti tujuan Muhammadiyah dari "masyarakat utama" menjadi mewujudkan masyarakat Islam yang

²⁵ Suwarno, Muhammadiyah, Islam dan Runtuhnya Orde Baru (Study tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998), Tesis pada Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2000:35.

²⁶ Suwarno, *ibid*, 2000:35-36.

sebenarnya, demikian juga dasarnya berubah dari Pancasila menjadi berasaskan Islam.²⁷ Hal ini berarti mengembalikan tujuan dan asas Muhammadiyah kepada tujuan dan asas yang dipakai sebelum tahun 1985, yakni sebelum adanya kewajiban mencantumkan asas tunggal Pancasila oleh Pemerintahan Orde Baru kepada seluruh Ormas Keagamaan termasuk kepada Muhammadiyah.²⁸

Walaupun sejak berdirinya Muhammadiyah sudah memiliki orientasi yang bersifat kultural, namun Muhammadiyah secara organisatoris kering dengan kebudayaan spiritual. Kebudayaan spiritual dalam pandangan gerakan Muhammadiyah karena pertimbangan tertentu sengaja dihilangkan, dalam Muhammadiyah tidak ada puji-pujian, brjenjen, manakiban, kebudayaan spiritual sengaja dihilangkan dari komunitas Muhammadiyah, sehingga agama terasa kering bagi masyarakat yang menghendaki paguyuban. Hal tersebut dikarenakan Muhammadiyah lebih menekankan Islam sebagai agama substantif.²⁹ Padahal budaya spiritual dan budaya lokal merupakan bagian dari memuliakan hidup, budaya spiritual secara tidak langsung juga bisa membentuk solidaritas. Sementara itu upacara siklus kehidupan seperti lahir, khitan, menikah, haji, dan mati, demikian juga siklus tahunan kolektif seperti ruwatan, nyadran, sudah lama hilang dari komunitas Muhammadiyah, sebahagian karena purifikasi sebahagian karena urbanisasi. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan involusi dalam gerakan Muhammadiyah, hal terjadi karena adanya ekspansi aqidah kepada sesuatu yang sebenarnya bukan aqidah. Memang untuk kebutuhan masyarakat

²⁷ Jurnal Pengajian Ramadhan 1412 H MPK-SDI PP Muhammadiyah, hal 1.

²⁸ Undang-Undang yang mewajibkan semua Ormas Kemasyarakatan mencantumkan asas Pancasila ialah UU. No.8 tahun 1985.

²⁹ Kuntowijoyo, "Islam dan Budaya Lokal, Strategi Dakwah Muhammadiyah dan Persoalan Kebudayaan local", dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas. (editor), LPPI UMY, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000:291, 296.

industri strategi Muhammadiyah masih memiliki relevansi, tetapi tidak pasca industri yang membutuhkan agama yang substantif sekaligus simbolis.³⁰

Namun demikian, bukan berarti dalam komunitas Muhammadiyah sama sekali tidak hidup budaya spiritual. Sebagaimana telah disinggung pada awal uraian ini, seperti temuan penelitian dari Munir Mulkan bahwa dilingkungan Muhammadiyah sudah mulai ada pembangkangan terselubung, terhadap keputusan tarjih, termasuk didalamnya dalam mengadopsi budaya spiritual, yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh perserikatan Muhammadiyah. Temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan juga membuktikan bahwa di Kecamatan Kotagede, muncul gejala MUJA (Muhammadiyah Jawa), di Kelurahan Prenggan maupun Purbayan, da'wah Muhammadiyah tetap masih mentolerir, kebudayaan lokal dan spiritual, seperti misalnya Yasinan, salematan untuk peringatan kematian, nyadran, pasang kijing.

Dalam konteks pembahasan Kotagede, kiranya penting untuk dikemukakan bahwa dalam perkembangannya Kotagede itu, kini perlu dibedakan antara Kotagede secara teritorial administrasi dan Kotagede secara kultural. Kecamatan Kotagede secara administratif mencakup tiga kelurahan yakni Kelurahan Purbayan, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Rejowinangun. Adapun wilayah Kotagede secara kultural meliputi Kelurahan Purbayan dan Prenggan.

(2). Sejarah Singkat dan Perilaku Manusia Kotagede

Kalau Kotagede dirunut secara historis, diawali sejak Mataram berdiri sekitar 400 tahun yang lalu, Islam sebagai agama merupakan 'benang merah' dan *mainstream*

³⁰ Kuntowijoyo, Ibid, 2000:298.

nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku manusia Kotagedhe dan tercermin dalam produk budayanya. Namun Islam sebagai nilai dan norma akan teranyam dengan sub sistem budaya lain yang juga hidup pada setiap masa.³¹

Untuk memahami perilaku manusia Kotagedhe paling tidak ada dua hal penting yang perlu diperhatikan; Pertama faktor historis yang berupa peristiwa-peristiwa penting di Kotagedhe yang mempengaruhi dinamika perilaku manusia Kotagedhe dan kedua, faktor internal yang muncul dari karakter manusia dan masyarakat Kotagedhe sendiri.

Faktor historis yang penting untuk diperhatikan pertama adalah pada masa Mataram awal yang periodenya kira-kira 100 tahun antara masa hidup Panembahan Senapati (1640-an) sampai ke masa Sultan Agung (1730-an) merupakan masa Islam yang teranyam dengan unsur Hindu dan animisme, dinamisme. Penejelasanya adalah bahwa Mataram Kotagedhe merupakan mata rantai Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Sehingga perilaku manusia Kotagedhe pada masa itu wajar kalau dipengaruhi oleh unsur tersebut. Arsitektur yang dibangun pada masa itu, seperti masjid, kompleks makam, keraton, beteng dan sebagainya, serta tata kota Kotagedhe yang masih dikenal sekarang ini, masih jelas warna hindunya. Hal yang juga menonjol ialah kesukaan para senapati dan raja Mataram menyimpan Jimat dan pusaka, yang sesungguhnya merupakan tradisi animisme.³²

Perilaku manusia Kotagedhe pada masa itu dipengaruhi oleh para penguasa dimana raja dan abdi dalem, menduduki posisi elit dalam stratifikasi sosial pada masa

³¹ Achmad Charris Zubair, "Tinjauan Etika tentang Perilaku Manusia Kotagedhe", Brosur, No.39/1421H/2000 M:31.

³² Achmad Charris Zubair, "Tinjauan Etika tentang Perilaku Manusia Kotagedhe", Brosur, No.39/1421 H/2000M:31.

itu. Perlu dicatat bahwa mainsteamnya Islam, tetapi nilai, norma dan perilaku dan produk budaya pada masa itu teranyam dari berbagai unsur.

Peristiwa penting kedua adalah dipindahkannya ibukota Mataram dari Kotagedhe ke Kerto kemudian ke Plered oleh Sultan Agung pada dasawarsa abad 17. Kotagedhe ditinggal oleh raja, bangsawan tinggi, yang disisakan hanya abdi dalem setingkat patuh, bekel, lurah yang relatif rendah. Pada masa ini sebenarnya merupakan the turning point potensi ekonomi dan budaya manusia Kotagedhe yang tadinya berorientasi pada keraton berubah keorientasi pasar³³ dalam arti luas. Sejak saat itu manusia Kotagedhe mengalami dinamika, menjadi lebih berwatak ekonomi dan demokratis, sejak saat itulah potensi Kotagedhe sebagai kota perniagaan mulai tumbuh.

Peristiwa penting ketiga ialah pasca perjanjian Giyanti 1755 yang memecah Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kotagedhe terkena dampak dari pembagaian yang aneh ini. Kotagedhe Surakarta adalah enclave di tengah-tengah wilayah Yogyakarta, sementara itu Kotagedhe Yogyakarta ada sendiri. Dengan kondisi ini abdi dalem menjadi terpecah-pecah ada yang pro Surakarta dan ada yang pro Yogyakarta, dan bersamaan dengan itu Kotagedhe juga banyak menerima pendatang dari daerah lain, seperti Bantul, Sleman bahkan Gunung Kidul.

Peristiwa penting keempat ialah adanya Kebangkitan Nasional pada awal abad 20. Munculnya gerakan-gerakan baru yang bersifat nasionalis, Islamis bahkan juga Marxis, yang mengantarkan lahirnya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Syarikat Islam yang kemudian berkembang menjadi SI putih dan SI Merah (PKI) juga mempengaruhi Kotagedhe. Pada awal abad 20 di Kotagedhe terjadi kebangkitan ekonomi, hal tersebut

³³ Penggunaan nama 'pasar' mendapatkan makna yang penting antara lain dapat dilihat juga secara fenomenal, karena nama 'pasar' juga dipakai untuk gelar pendiri mataram panembahan Senopati, yang sebelumnya mempunyai gelar "ngabei loring pasar"

antaratlain dikarenakan adanya semacam konsensi ayng diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang memberikan hak monopoli kepada dua kemopak di Kotagedhe yakni kelompok Kalang diberi konsensi untuk berdagang berlian, candu, dan pegadaian. Sementara itu kelompok lain mendapatkan konsensi mori, dan lawe untuk batik serta berlian.

Peristiwa penting kelima, adalah periode 1950-an menjelang 1965, dimana Kota gedhe menjadi kota buruh yang miskin. Juragan tidak lagi nampak jaya, sementara para profesional banyak yang tidak tinggal di Kotagedhe. Pada masa itu kesenian-kesenian rakyat bermunculan seperti ketoprak, yang identik dengan PKI. Serta dari kalangan nasionalis muncul keroncong dan wayang serta srandul. Sedangkan pasca 1965, perilaku manusssssia Kotagedhe menunjukkan perilaku pasca Gestapu orang banyak yang pergi ke masjid, perilaku yang kelihatan haruslah sealim mungkin.³⁴

Peristiwa penting keenam, yakni era 1990-an sampai sekarang, era kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi serta informasi, globalisasi ditambah dengan adanya kemelut kultural dan krisis ekonomi. Pada era ini manusia Kotagedhe walaupun disatu sisi banyak yang sukses dalam perniagaan dan profesional, namun lebih banyak lagi yang terpinggirkan, mengaalami frustasi dan krisis kepercayaan.

Sedangkan faktor internal yang ikut menajdi faktor yang mempengaruhi perilaku manusia Kotagedhe adalah realitas masyarakat Kotagedhe yang bercorak demokratis, geneologis, pribumi serta hidup berkembang melalui pengalaman budaya yang panjang sejak Mataram hingga kini. Dengan ungkapan lain manusia Kotagedhe memiliki kekhasan budaya karena mereka dapat berkembang dengan tetap memiliki pijakan pada

³⁴ Ibid, Achamd Charris Zubair, 2000:34.

nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan, etos kerja, yang bersifat indeogonis, tidak tercerabut dari akar nilai asli yang mungkin sekali merupakan *local genius*.³⁵

Kecamatan Kotagedhe adalah merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kotamadya Dati II Yogyakarta sampai tahun 1998. Kotagedhe memiliki luas 3.07 Km². Kecamatan Kotagedhe memiliki tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Prenggan, Purbayan, dan Rejowinangun, dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 40 dan Rukun Tangga sebanyak 161. Masing-masing Kelurahan rincianannya adalah, Prenggan memiliki 13 RW terdiri dari 58 RT, Purbayan memiliki 14 RW terdiri dari 58 RT serta Rejowinangun 13 RW terdiri dari 45 RT.

Untuk Pemilu 7 Juni 1999, hasil perolehan suara di Kotagedhe adalah sebagai berikut; PDIP berhasil mengumpulkan suara PAN : 5.026 (33,0%), PDIP: 4.703 (30,9%), Golkar: 1.807 (11,9%), PPP: (8,2%), PKB : 920 (6,0%), PK: 446 (2,95) PBB:262(1,7%) PKP: 120 (0,8%). Dengan jumlah pemilih keseluruhan di Kecamatan Kotagedhe 15.240 orang. Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 27.055 pada tahun 1999. dengan jumlah Umat Islam 27.444, dengan jumlah Masjid 33.

Sedangkan data untuk Pemilu tahun-tahun sebelumnya di Kota Madya Yogyakarta (dimana Kotagedhe termasuk didalamnya) adalah sebagai berikut; Pada Pemilu 1987 Golkar keluar sebagai pemenang dengan memperoleh dukungan suara 114.367, PDI beerada diurutan kedua dengan dukungan suara 58.885 sedangkan PPP berada diurutan ketiga dengan dukungan suara 43.339 suara. Untuk Pemilu 1992 Golkar masih tetap sebagai pemenang Pemilu walaupun menalami penurunan dukungan Golkar (100.400) PDI (69.631). Sedangkan untuk Pemilu tahun 1999 hasilnya ialah PDIP

³⁵ Berasal dari wawancara mendalam dengan bapak Achmad Charris Zubair, Ketua Pusdok Kotagedhe, bulan September 2000, di rumah beliau yang masih nampak sekali nuansa yang khas Kotagehde, di rumahnya ada Gamelan, ada patung, ada perpustakaan, ada lukisan, ada nuansa Islamis.

berada di urutan Pertama dengan dukungan suara (97.972) PAN di urutan Kedua dengan dukungan suara (59.108) Partai Golkar di urutan ketiga dengan dukungan suara (27.438), PPP di urutan keempat dengan dukungan suara (12.430) PKB di urutan kelima dengan dukungan suara (11.290), PBB di urutan keenam dengan dukungan suara (4.746) dan PK berada di urutan ketujuh dengan dukungan suara (4.467).³⁶

Daari data diatas dapat diketahui bahwa pada Pemilu tahun 1999 terjadi perubahan dukungan suara paada partai politik yang telah mengakibatkan adanya perubahan kontelasi politik di Kota Madya Yogyakarta, demikian juga di Kotagedhe. Golkar yang sepanjang Pemilu Orde Baru dari tahun 1971 sampai 1997 selalu memenangkan Pemilu, pada Pemilu 1999 ia tergeser berada pada tempat ketiga, sedangkan tempat pertama sebagai pemenang digantikan oleh PDIP partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, Partai ini tidak sama dengan PDI yang dipimpin oleh Budi Harjono. Tempat kedua direbut oleh PAN. Setelah Pemilu 1999 berlangsung perubahan yang penting juga terjadi di dalam elit eksekutif di Kotamadya Yogyakarta, dimana untuk pertama kalinya Wali Kota dipegang oleh wakil dri PAN Zuhdi Heriyanto dan Syukri Fadholi sebagai wakil Wali Kota dari PPP. Sebelumnya posisi wali kota selalu dipegang oleh wakil dari Golkar atau ABRI.

Dengan uraian diatas kiranya dapat dibuat pernyataan bahwa capaian yang dihasilkan oleh sub kultur santri pada tahun 1999, mengalami kemajuan yang sangat berarti, terutama jika dilihat dari keberhasilan elit –tokoh dari sub kultur ini, meraih dukungan dari masyarakat Kota madya untuk menduduki posisi puncak sebagai wali Kota, Zuhdi Heriyanto, yang secara budaya ia berasal dari keluarga Muhammadiyah

³⁶ Data dalam tulisan ini diperoleh dari Laporan Team Sukses Pemilu 1999 Partai Keadilan DPD Kota Madya Yogyakarta.

Kota gedhe. Demikian juga dengan Syukri Fadholi juga berasal dari keluarga Muhammadiyah. Dengan kemenangan PAN di Kotagedhe serta keberhasilan mendudukkan wakilnya diposisi puncak elit lokal di Kota Madya, kiranya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa subkultur santri modernis di Kotagedhe hingga dekade 1990-an, masih tetap memimpin perubahan masyarakat, transformasi masyarakat, di era yang disebut era reformasi. *Dari sisi ini berarti pula prediksi Mitsuo Nakamura, yang menyatakan bahwa subkultur santri di Kotagede memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan kedepan masih dapat dipertahankan, masih berlaku.* Walaupun ada beberapa pandangan dari Mitsuo Nakamura yang kini pada akhir abad ke-20 sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan adanya perubahan yang mendasar pada konfigurasi politik nasional. Misalnya masalah politik bagi Islam (Muhammadiyah) adalah bukan menjadi persoalan yang utama, hanya masalah pinggiran. Pernyataan tersebut kini setelah era reformasi sudah tidak dapat dipertahankan, mengingat banyak dari kader Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik melalui Partai Amanah Nasional (PAN). Pernyataan Mitsuo Nakamura tersebut memiliki kebenaran untuk konteks tahun 1970-an, mengingat pada tahun 1971 Muhammadiyah melalui Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang, menetapkan Muhammadiyah kembali ke gerakan kultural.³⁷

(3). Afiliasi Politik Masyarakat Kota Gedhe

³⁷ Muhammadiyah melalui Mukhtamar ke-38 tersebut kembali sebagai gerakan cultural, hal ini diambil mengingat pada periode sebelumnya yakni 1937-1971, Muhammadiyah aktif terlibat dalam gerakan politik, dinilai membereikan dampak negatif pada perserikatan Muhammadiyah, misalnya menelantarkan bidang pendidikan, social, da'wah.

Dari 14 kecamatan yang merupakan bagian dari daerah tingkat II Kota Madya Yogyakarta, hanyalah di Kotagedhe satu-satunya kecamatan yang perolehan suaranya tidak dimenangkan oleh PDIP. Di Kecamatan ini perolehan suara terbanyak diraih oleh PAN sebanyak 5026 disusul oleh PDIP 4703, kemudian Golkar 1800 suara, PPP 1249 suara, PKB 1200 suara, PK 446 suara, PBB 262 suara.

Di Kecamatan Kotagedhe yang dimenangkan oleh PAN, ternyata dari 3 Kelurahan yang ada hanya disatu kelurahan yang dimenangkan oleh PAN sementara itu di 2 kelurahan lainnya dimenangkan oleh PDIP. Dengan rincian sebagai berikut; PDIP di kelurahan Rejowiangnun meraih 1760 suara sedangkan PAN meraih 1362 suara. Kemudian di Kelurahan Prenggan PDIP meraih 1771 suara, PAN meraih 1656 suara. Dan satu-satunya kelurahan yang dimenangkan oleh PAN adalah di kelurahan Purbayan di sini PAN berhasil meraih 2008 suara sementara itu PDIP meraih ditempat kedua 1172.

Dari data diatas dapat dipertanyakan lebih lanjut PAN yang ditingkat kecamatan Kotagedhe berhasil meraih pengumpulan suara terbanyak berada pada ranking satu, ternyata mendapatkan dukungan yang paling kuat berasal dari pemilih yang berdomisili di Kelurahan Purbayan, dssan kurang mendapatkan dukungan yang kuat di dua kelurahan lainnya. Sementara itu di kelurahan Prenggan dan Rejowinangun perolehan suara dimenangkan oleh PDIP. Mengapa muncul kenyataan yang demikian?

Hal tersebut jika dikonvermasi dengan hasil Pemilu tahun 1955 ternyata ditemukan bahwa di daerah yang sekarang (pemilu 1999) dimenangkan oleh PDIP pada Pemilu 1955 di dua kelurahan tersebut dimenangkan oleh dan PNI. Di kelurahan Rejowianangun di dunun Basen dan Bumen pada tahun 1950-an itu sangat dipengaruhi

oleh PKI bahkan menjadi semacam Pusat latihan Nasional PKI.³⁸ Sedangkan di kelurahan Purbayan pada Pemilu 1955 suara banyak diberikan kepada partai-partai Islam Masyumi dan NU.

Darimanakah suara partai-partai Islam seperti (PAN:5026, PPP:1249, PKB:1200, PBB:262, dan PK:446)? Karena pada Pemilu tahun 1955 ada dusun-dusun yang dimenangkan oleh NU, PNI, Masyumi dan PKI. Jawabannya ialah karena adanya faktor migrasi penduduk ke daerah Kotagedhe, karena adanya da'wah Islam yang terus menerus baik dari lapisan bawah maupun lapisan atas, baik yang berumur muda maupun yang berumur tua. Kedua, karena adanya mobilitas penduduk sebagai akibat dari adanya pendidikan, ketiga karena adanya perubahan struktur sosial. Ketiga faktor ini memungkinkan partai-partai yang berbasis Islam seperti PAN, PPP, PK. memiliki dukungan pada jenis penduduk seperti dimiliki oleh Kotagedhe. Perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat Kotagedhe baik pendidikan, kesadaran agamanya, pekerjaan, komposisi penduduknya, membawa implikasi pada pilihan politik yang mereka jatuhkan. Banyak masyarakat Kotagedhe tidak lagi bersifat pragmatis dalam memilih partai politik seperti terjadi pada Pemilu tahun 1955, dimana kondisi ekonomi morat – marit, dengan komposisi penduduk yang banyak buruhnya, maka sangat memungkinkan untuk didekati oleh PKI.

(4). Sekilas Kondisi Perkembangan Muhammadiyah di Kotagedhe

Untuk mengetahui informasi yang lebih umum dalam konteks wilayah Kotagede, disamping melakukan pengamatan umum suasana Kotagede, juga mencari informasi

³⁸ Dalam Pemilu tahun 1955, PKI meraih suara mayoritas di Yogyakarta, dengan merebut 14 kursi dari 45 kursi DPRD, sisanya diraih oleh PNI 8 kursi, Masyumi 6 kursi, Gerindo 6 kursi, Nu 4 kursi partai Katolik 2 kursi Pir 2 kursi, PPKI 2 kursi, PRN 1 kursi, dan Parkondo 1 kursi. Suber buku Profil Yogyakarta, hal 143.

dari pelaku sejarah yakni aktivis Muhammadiyah Kotagede. Wawancara dimulai dari data yang bersifat dasar, yakni jumlah seluruh ranting yang ada di Cabang Kota Gedhe,³⁹ seluruhnya ada 15 Ranting. 15 Ranting ini terdiri dari 11 ranting yang memang secara resmi ada dalam lingkup administrasi kecamatan Kota gedhe dan 4 ranting yang berada di wilayah Kecamatan Bangun Tapan akan tetapi peminannya dititipkan di Cabang Kotagede. Adapun jumlah anggota Muhammadiyah yang resmi menjadi anggota Muhammadiyah sampai dengan Januari 2001 ada 1846 anggota. Dilihat dari jenis pekerjaannya anggota Muhammadiyah di Kotagede dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yakni;

1. pedagang (pengusaha) wiraswasta kurang lebih 25%
2. PNS, kerja dipemerintah sekitar 40%
3. dan Buruh diperusahaan serta di kerajinan industri sekitar 30%.

Ketiga jenis kelompok ini mempunyai kontribusi pada muhamadaiyah sesuai dengan posisiinya masing-masing. Artinya yang pengusaha memberikan kontribusi melalui sumbangan dananya, sedangkan yang Guru, Dosen, PNS memberikan kontribusi pada Muhammadiyah melalui peranya sebagai organisastoris atau pengurus yang menggerakkan roda organisasi. Sedanmgkan kelompok buruh berperan dalam amal usaha Muhammadiyah.

Menurut pengamatan Bapak Syamsu Hadi yang juga sekaligus Ketua Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (Kp3), semacam Koperasi yang melakukan pembinaan, membantu permodalan, pemasaran para pengusaha di Kotagede. Dikemukakan bahwa pada umumnya pengusaha dari kalangan muhammadiyah untuk

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsu Hadi, Ketua Cabang Muhammadiyah Kotagedhe, hari Selasa, tanggal 17 Januari 2001, di rumah beliau.

kelas menengah keatas memiliki kemampuan untuk bertahan tidak mengalami gulung tikar. Sedangkan mengalami proses gulung tikar pada umumnya adalah pengusaha yang kecil yakni yang memiliki karyawan dibawah 12 orang. Dalam pengamatan juga dinyatakan bahwa dari kalangan Muhammadiyah biasanya tetap ada anak yang meneruskan usahanya, sekalipun tidak berkembang secara besar tetapi minimal masih dapat bertahan hidup. Jadi walaupun secara nasional ada kecenderungan dari kalangan keluarga santri, termasuk dari kalangan keluarga Muhammadiyah yang berprofesi pedagang untuk beberapa waktu semenjak tahun 1970-an sampai sekarang menginvestasikan dananya untuk sekolah anak-anaknya, sehingga banyak usaha yang tidak diteruskan oleh anak keturunan dari keluarga muhammadiyah, di Kotagede kecenderungan seperti ini tidaklah demikian. (Ketua Cabang Muhammadiyah Kotagede, ketika penelitian ini dilakukan adalah seorang pengusaha) walaupun ada peralihan jenis pekerjaan dari pedagang ke PNS tetapi tetap saja ada generasi muda yang bermiat untuk meneruskan usaha orang tuanya.

Walaupun secara nasional bahkan juga di tingkat daerah Yogyakarta muhamadiyah secara umum dikendalikan oleh para PNS untuk Kota Gehe sendiri tidaklah demikian, peran pengusaha dan pedang tetaplah terdepan. Kemampuan dan peran penting pengusaha yang ditunjukkan dengan adanya sikap yang independen antara lain ditunjukkan ketegasannya ketika ada kasus kristenisasi di salah satu daerah cabang yang akan mendirikan tempat Ibadah berupa gereja pada tahun 2000, para pengurus Cabang Kotagedhe merasa tidak puas kalau pengurusnya hanya sampai ketingkat kandep departemen agama, para pengurus Cabang Kotagedhe ini langsung menghadap Sri Sultan Hamengkubowono IX, dan akhirnya memang tempat Ibadah itu tidak jadi didirikan. Fakta lain yang menunjukkan kemampuan peran kaum pedang ini adalah

kemampuannya untuk membangun masjid dengan anggaran dana kurang lebih 1 milyar rupiah. Dengan kata lain sikap lambat, birokratis, berbelit-belit serta tidak independen takut mengambil resiko, yang mulai menimpa sebagian aktivis Muhammadiyah secara nasional tidak menjangkiti para pengurus Muhammadiyah di kota Gedhe.

Untuk konteks Kotagedhe, hampir seluruh pedagang dan pengusaha untuk golongan menengah keatas adalah berasal dari warga Muhammadiyah,⁴⁰ sub kultur lainnya Abangan dan Muslim Tradisional kecil sekali yang dapat memegang atau menguasai perdagangan di kota gedhe. Dan yang juga istimewa sampai hari ini tidak ada satupun toko di kota gedhe yang langsung dimiliki oleh pedagang China.

Namun pengamatan yang kami lakukan pada tahun 2001, pakaian yang dikenakan oleh para pedagang yang berjualan di Pasar Kota Gedhe, pada umumnya menunjukkan pakaian yang dikenakan oleh orang pada umumnya, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan pakaian Muslimah (kerudung), hanya satu, dua dari pedagang yang menggunakan pakaian kerudung. Ada apa dengan pakaian kerudung ini? Apakah dapat diartikan bahwa keterikatan pedagang ini pada Muhammadiyah (yang kebanyakan adalah dari kalangan wanita) itu hanya pinggiran atukah memang benar-benar sebagai kader Muhammadiyah? Atukah memang begitu karakteristik anggota Muhammadiyah dari segmen pedagang, bersifat lebih lentur dalam berbagai hal termasuk dalam masalah pakaian sehari-hari.

Gejala lain yang juga dapat ditangkap ialah tumbuhnya sikap individualis dikalangan komunitas Muhammadiyah Kotagede (walaupun tidaklah semua orang bersikap sama). Namun menurut beberapa orang yang kami lakukan wawancara sikap

⁴⁰ Jumlah pedagang dari kalangan keluarga Muhammadiyah yang bergabung dalam KP3 saat penelitian ini dilakukan berjumlah 117 keluarga.

individualis ini nampak dalam masyarakat Kotagede, dalam hubungan kemasyarakatannya. Apakah sifat ini sebagai pengaruh dari sikap profesional yang dipegang oleh sebagian besar anggota Muhammadiyah di daerah ini, yang sebagian besar adalah terdiri dari para pedagang ataukah karena sebab lain? Hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi. Namun bukan dari bagian dari penelitiannya untuk mengkajinya secara serius.

Masalah pendidikan. Muhammadiyah Kotagede memiliki 4 sekolah dasar, satu mahad Islami, satu pondok Pesantren. Satu Madrasah tsanawiyah dan satu SMU. Sedangkan masjid yang ada dibawah pengaruh Muhammadiyah ada 42 Masjid diseluruh kota gedhe. Pelaksanaan ritual yang ada di 42 Masjid ini sesuai dengan keputusan tarjih, misalnya dalam pelaksanaan ibadah Sholat jum'at, pelaksanaan sholat subuh. Dalam ibadah yang mencolok sudah sesuai dengan keputusan tarjih, tetapi untuk beberapa tempat masih ada yang tetap mempertahankan tahlilan, yasinan, sholatn tarwihya 23 rakat ketika bulam Ramadhan.

Bapak Syamsu Hadi setuju dengan pernyataan bahwa komunitas dari subkultur Islam modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah di Kotagedhe, dapat memimpin perubahan budaya baik dibidang ekonomi, pendidikan dibanding dengan sub kultur abangan dan Islam tradisonal. Dan mencita-citakan hal yang demikian itu, untuk lebih sempurna dimasa mendatang.

Ketika ditanya mengapa Muhammadiyah di Kotagede mampu memimpin perubahan jawabnya adalah karena adanya homogenitas masyarakat Kotagedhe dan adanya ukhuwah islamiyah. (ikut pengajian Muhammadiyah adalah merupakan suatu kebutuhan tidak hanya sebagai kewajiban agama saja). Hal itulah yang antara lain menyebabkan, perpindahan dari Muhammadiyah ke Nu tidak ada. Tetapi kalau dari

muhamadiyah ke Islam yang lebih murni (salafi, jamah tablig, tarbiyah) ada tetapi tetap sebagai anggota Muhammadiyah tidak menimbulkan konflik. Sedangkan perpindahan dari abangan ke Muhammadiyah banyak sekali terutama pada masa setelah gestapu G 30 S PKI tahun 1965.

4.1 Sekilas Kondisi Perkembangan Muhammadiyah di Dusun Basen

Dalam rangka menguji ulang teori yang dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura, telah melakukan peninjauan lapangan dan wawancara dengan aktivis Muhammadiyah di Kotagede. Wawancara tersebut untuk mengetahui dari sumber pertama, bagaimanakah perubahan serta perkembangan yang terjadi pada masyarakat Basen umumnya serta khususnya perubahan atau kemajuan yang telah dicapai oleh gerakan Muhammadiyah Ranting Basen. Wawancara tersebut terutama untuk mengetahui bagaimanakah persaingan antara subkultur santri (Muhammadiyah) dengan Tradisional dan abangan. Dilihat dari kualitas pendidikannya, tingkat pengamalan keagamaannya, jenis pekerjaannya, serta komposisi penduduk di Dusun Basen, kelurahan Purbayan itu didominasi oleh sub kultur apa. Hal-hal tersebut dipandang perlu untuk dicermati, untuk dapat menguji dengan cermat teori transformasi yang telah dirumuskan oleh Mitsuo Nakamura, hampir tiga puluh tahun yang lalu.

Dari pengamatan secara umum kondisi Kotagede, serta wawancara dengan interve, disuatu Dusun yang menurut informasi dari penelitian Mitsuo Nakamura, Kampung Basen pada masa sebelumnya khususnya tahun 1950-an, adalah merupakan basis dukungan bagi paham Komunisme.

Temuan-temuan dari hasil wawancara sebagai berikut;⁴¹

1. Aktivitas Muhamadiyah di dusun Basen harus dijalankan dengan hati-hati sekali bahkan aktivitas baru dapat dijalankan dengan menggunakan bendera Muhammadiyah baru semenjak tahun 1985-an.
2. Dari jumlah anggota resmi Muhammadiyah jumlahnya terjadi peningkatan walaupun secara perlahan-perlahan, sekarang tahun 2000 ada 125 anggota. Ranting Basen meliputi tiga kampung (Basen, Bumen, Sukowaten)
3. Dari sisi fisik bangunan masjid terjadi peningkatan baik dari sisi besarnya maupu kualitasnya.
4. Telah memiliki TPA Aisyah yang jelas-jelas menggunakan bendera Muhammadiyah.
5. Perolehan suara dalam Pemilu 1999 PDIP menempati pada urutan pertama, partai-partai Islam seperti PPP, PAN, berada dibawah perolehan Golkar.
6. Menurut sejarahnya kampung Basen ini adalah merupakan daerah basis PKI yang kuat di Kotagede, pada tahun 1960-an pendukung PKI di daerah ini hampir mencapai dua pertiga jumlah penduduk dikampung ini. Mengapa demikian ini berkaitan dengan kondisi daerah ini kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai buruh.
7. Dari sub kultur abangan banyak yang sudah masuk sub kultur Islam sedangkan dari sub kultur Islam (Muhamadiyah) tidak ada yang berpindah ke sub kultur abangan.

4.2 Sekilas Kondisi Muhammadiyah di Kelurahan Prenggan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sukadi Ketua Ranting Muhammadiyah Basen, Kotagedhe tanggal 17 Desember 2000, dirumah beliau.

Sekilas Kondisi Muhammadiyah Kelurahan Prenggan, Kecamatan Koagedhe,⁴² Ketua Ranting Kelurahan Prenggan Kotagedhe, dijabat oleh H Zamawi, untuk periode yang kedua, setelah sebelumnya dipilih menjadi ketua pada periode 1996-2001, sekarang menjabat untuk periode 2001-2005. Bapak Zamawi merupakan orang kelahiran Kotagedhe, walaupun berasal dari Kelurahan lain, ia dilahirkan pada tanggal 18 Nopember 1954, bersamaan dengan lahirnya tanggalnya sama dengan kelahiran gerakan Muhammadiyah. Menurut pengakuannya ia dilahirkan dari keluarga yang belum merupakan bagaian dari gerakan Muhammadiyah, pengalamannya bergabung dengan Muhammadiyah, adalah ketika ikut menjadi anggota Iktan Pelajar Muhammadiyah sewaktu sekolah di SMA (sebentar hanya dalam waktu satu tahun). Kemudian ia bergabung menjadi anggota Muhammadiyah secara resmi ketika mulai bergabung dalam pengajina ahad pagi di tengalendo, dan sampai sekarang ia masih dipercaya sebagai sekretaris pengajian tersebut sampai dengan tahun 2001. Ia sempat kuliah di UGM mengambil jurusan Tehnik Kimia tetapi tidak selesai, karena ia lebih menekuni bidang bisnis jasa yaitu Radio PT DI Kota Perak, yang kini ia telah menjadi pimpinan di radio tersebut yakni sebagai Direksi. Sedangkan istrinya juga berasal dari keluarga biasa bukan aktivis Muhammadiyah, tetapi istrinya lebih memiliki keterikatan dengan muhammadiyah kaena ia pernah kuliah di IKIP Muhammadiyah (kini berubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan) mengambil jurusan Bimbingan Konseling. Kini istrinya menjadi salah seorang sekretaris aisyiah Cabang Kotagedhe. Bapak Zamawi dan Ibu sudah menunaikan ibadah Haji pada tahun 1996, sebagaimana terlihat digambar yang dipajang diruang tamu berdekatan dengan gambar Ka'bah. Ia mempunyai dua orang

⁴² Wawancara dengan Ketua Ranting Muhammadiyah Kelurahan Prenggan H. Zamawi, tanggal 23 September 2000, dirumah beliau.

anak yang semuanya sekolah di sekolah milik Muhammadiyah, yang perempuan sekolah di Muhammadiyah I (Muhi) Yogyakarta, yang terkenal favorit di kota ini, sedangkan anaknya yang laki-laki sekolah di SMP 7 Muhammadiyah.

Sewaktu kami mau melakukan wawancara terdengar musik pop dan irama dangdut dari dalam rumah, ini menunjukkan pemahaman keluarga ini terhadap Islam termasuk golongan moderat, karena pada era ini sudah mulai timbul pemahaman disebagain kalangan Islam bahwa musik termasuk yang diharamkan. Dan pada ahri itu bapak Zamawi juga baru saja melakukan yasinan disalah satu rumah penduduk, yang kelaurganya meninggal pada hari yang keseribu, sehingga sekaligus memasang kijing (batu nizan). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa bapak Zamawi ini menganut pendekatan yang lebih lentur dalam menjalankan da'wah Muhammadiyah di Kelurahan Prenggan. Hal ini nampak dari sikap komprominya dengan adat dan kebiasaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran yang dipahami dalam tarjih Muhammadiyah.

Menurut pengakuan bapak Zamawi, penduduk yang ada di Kelurahan Prenggan sekitar 90% adalah ada dalam pengaruh da'wah Muhammadiyah, walaupun yang benar-benar Muhamamdiyah dalam artian ibadah dan aqidahnya sesuai dengan tarjih baru sekitar 20%. Anggota lain kebanyakan adalah masih dalam taraf transisi, Bapak Zamawi menyebutnya sebagai MUJO, singkatan dari Muhammadiyah Jowo. Artinya walaupun mereka sudah merasa menjadi anggota Muhamadiyah tetapi masih melakukan kebiasaan yang merupakan baggiaan dari kepercayaan orang Jawa. Sesuai dengan laporan yang dibuat dalam Laporan Musyawarah Ranting Prenggan bulan Mei 2001, anggota resmi Muhammadiyah yang memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah adalah 219 orang.

Dari wawancara ini akhirnya ditemukan jawaban mengapa di Kelurahan Prenggan ini, partai yang menang bukan berasal dari partai Islam ataupun partai yang berbasis Islam, tetapi malah PDIP yakni meraih suara 1771 sedangkan PAN hanya meraih 1656 suara berarti ada selisih suara 115. Kemenangan PDIP ini di daerah basis Muhammadiyah adalah merupakan fenomena yang menarik untuk diamati, mengundang pertanyaan lanjut lainnya. Mempertimbangkan dalam asumsi teori politik ada pernyataan yang berbunyi “no political phenomenon just happens”, tidak ada fenomena politik yang bersifat kebetulan. Dengan demikian kemenangan PDIP di daerah yang merupakan basis Muhammadiyah dapat diartikan memiliki sebab-sebab tertentu, ada faktor-faktor yang menyebabkan mengapa para pemilih lebih banyak memilih partai non Islam seperti PDIP. Ada independent variable yang menyebabkan kemenangan PDIP di Kelurahan Prenggan.

Salah satu faktor yang ditemukan sewaktu melakukan wawancara ialah karena masih besarnya penduduk Kelurahan Prenggan yang awam dalam beragama Islam sekalipun mereka telah merasa menjadi anggota Muhammadiyah, yakni yang disebut kelompok MUJO. Kelompok MUJO ini dalam istilah antropologinya sering disebut dengan “sinkretisme” ataupun the religion of Java. Penduduk dari kelompok ini dapat ditafsirkan akan memiliki kecenderungan untuk memilih partai yang lebih sesuai dengan pemahamannya. Atau bahkan memiliki pemahaman bahwa memilih partai adalah bukan merupakan bagian dari Islam, wilayah yang terpisah dari ajaran Islam Pengajian di Majelis Ta’lim Muhammadiyah akan tetapi pilihan partainya tidak jadi masalah kalau memilih PDIP ataupun Golkar.

Namun data lain yang menunjukkan bahwa PAN dapat keluar sebagai pemenang urutan kedua setelah PDIP dan bukan partai lain seperti Golkar ataupun PPP sebagai

pemenang urutan kedua, dapat dibaca bahwa da'wah Muhammadiyah telah memiliki pengaruh yang signifikan kepada penduduk di Kelurahan Prenggan untuk memilih PAN, sebagai partai politik yang didirikan oleh mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Amien Rais. Padahal pada Pemilu-pemilu sebelumnya Golkar dan PPP mendapatkan dukungan suara yang banyak di daerah ini.

Bapak Zamawi juga memiliki kebanggaan dengan prestasi rantingnya yang telah berhasil mengadakan Musyawarah Ranting di Kaliurang, dengan sisa saldo sebesar 4.638.900 rupiah. Namun disisi lain ia juga mengeluh tentang mulai ada gejala menurunnya semangat “ghiroh” dalam kegiatan keislaman yang diadakan oleh Muhammadiyah.

4.3 Sekilas Kondisi Muhammadiyah di Kelurahan Purbayan

Pada waktu aku ikut sholat magrib di Masjid Nurul Huda,⁴³ Kelurahan Purbayan, Imam Sholat bapak Drs. Marsuki- salah seorang tokoh Penggerak Muhammadiyah Dusun Purbayan—menjadi Imam dengan mengeraskan bacaan Bismillah, yang seharusnya menurut keputusan tarjih harusnya tidak dikeraskan. Ketika sholat ditanya soal ini beliau menjawab, hal tersebut tidak menjadi persoalan, menurut beliau mau menggunakan bismillah silahkan, tidak menggunakan juga silahkan. Demikian juga tentang pemberantasan TBC (Tahayul, Bi'ah, dan Khurafat) juga menyatakan bahwa di Kelurahan Purbayan, gerakannya dilakukan dengan cara evolusioner. Dengan cara pelan-pelan, mengingat masih ada sebahagian generasi tua yang belum dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan lama, yang sebenarnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah.

⁴³ Obsevasi dilakukan Bulan September tahun 2000.

Yang menarik juga ialah setelah sholat Magrib diadakan pengajian alqur'an (semacam Iqro) bagi orang-orang yang sudah sepuh mungkin karena waktu mudanya belum sempat belajar alqur'an. Sedangkan yang untuk anak-anak diadakan pada sore harinya. Data ini dapat dibaca bahwa proses da'wah di Kelurahan Purbayan berlangsung baik pada level orang tua maupun pada level anak mudanya. Untuk anak muda juga telah terjadi perkembangan yang menarik yaitu dengan berdirinya BPM (Barisan Pemuda Masjid) yang dengan sigap melakukan gebrakan untuk memberantas kemaksiatan dan tindakan kriminal lainnya. Gebrakan itu secara fenomenal ditandai dengan pemasangan poster di jalan menuju ke Masjid Nurul Huda. Tidak jauh dari masjid ini, di sebelah baratnya kejalan menuju gedung TK Aisyiah juga di pasang tulisan semacam pamlet yang berisi ungkapan tidak setuju dengan perjudian Toto "tolak Totor: FRMS yes. Disebelahnya digambar pedang bersilang dengan tulisan di bawahnya "Komando Jihad" tulisan itu tertera di tembok tempat pemakaman dusun Purbayan.

Pemandangan di atas mengisyaratkan adanya dinamika yang terus bergejolak di Kelurahan Purbayan. Artinya proses da'wah serta tranformasi masyarakat terus berlangsung hingga kini. Di dusun ini pula lahirnya metode membaca alqur'an Iqro⁴⁴ yang dicetuskan oleh Asad Humam, yang sangat populer tersebut. Fakta lain yang juga menarik dikemukakan ialah dipasangnya poster, yang membawa pesan memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Bapak Hery acmadi dari PAN dan Syukri Fadholi dari

⁴⁴Metode membaca iqra adalah suatu metode untuk membaca alquran, yang dirancang lebih praktis serta mudah dicerna oleh anak-anak jika dibandingkan dengan metode bagdadi yang ada sebelumnya. Dalam metode iqra, orang belajar membaca alquran dibuat bertahap menjadi 6 jilid, yang setiap jilidnya secara normal dapat diselesaikan dalam waktu 2 sampai 3 bulan, dalam buku tersebut juga disertakan lagu-lagu Islam untuk anak-anak serta doa-doa sehari-hari. Dengan demikian anak-anak yang mengaji dengan metode iqro dalam waktu 1 sampai 2 tahun sudah bisa membaca al quran. Metode ini sangat digemari oleh anak-anak, sehingga timbulah pula apa yang disebut TPA Taman Pendidikan Alquran, Angkatan Muda Masjid dan Mushola (AMM) tadarus di Kotagede. Kini penyebaran Iqro sudah merata diseluruh Indonesia.

PPP sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kodya Yogyakarta.⁴⁵ Kedua orang ini memang berasal dari Kotagede dan ia berasal dari partai yang memiliki basis dukungan besar di Kelurahan Purbayan.

Tentang pertanyaan mengapa di Kelurahan Purbayan PAN mendapatkan perolehan suara melebihi PDIP padahal, di kelurahan ini terdapat dusun yang pada Pemilu 1955 adalah pendukung PKI, yaitu di dusun Basen dan Bumen. Tentang hal ini ada beberapa kemungkinan penjelasan;

1. .Karena yang memilih pada Pemilu 1999 adalah generasi baru yang sudah mengalami sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat Kotagedhe pada umumnya yang sangat dipengaruhi oleh gerakan Islam Muhammadiyah. Sedangkan generasi tua sudah banyak meninggal dunia.
2. Adanya transformasi pemahaman pada masyarakat kelurahan purbayan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pilihan partai politiknya.
3. Dikarenakan adanya perubahan struktur sosial masyarakat Kotagedhe, yang berarti juga adanya perubahan jenis pekerjaan. Perubahan jenis pekerjaan ini, ialah jika pada pemilu 1955 kebanyakan pekerjaan penduduk yang tinggal di dusun Basen dan Bumen adalah buruh miskin, dan hal ini sangat mudah didekati oleh propaganda PKI, sedangkan sekarang ini banyak masyarakat pendatang, yang bukan kelas buruh lagi.

⁴⁵ Sebenarnya jumlah kursi yang dimiliki oleh Fraksi Amanah Nasional (FAN), fraksi dari mana Zuhdi Heryanto dicalonkan menjadi walikota hanya 9 orang dan Fraksi Persatuan Islam yang mencalonkan Syukri Fadholi menjadi Wakil Walikota hanya memiliki 4 kursi, berarti koalisi antara FAN dan FPI hanya berjumlah 13 orang, jumlah ini masih dibawah jumlah kursi yang dimiliki oleh Fraksi PDIP yaitu 15 kursi, akan tetapi calon dari FPDIP kalah dalam pemilihan walikota dikarenakan adanya perpecahan didalam intern FPDIP, tentang siapa calon yang akan dimajukan sebagai walikota apakah calon yang mendapatkan rekomendasi DP ataukah calon yang disepakati oleh DPD. Karena persoalan ini tidak terpecahkan sampai waktu pemilihan walikota tiba maka menjadi tidak solid, bahkan ada beberapa anggota FPDIP yang tidak menghadiri Sidang DPRD Kota sewaktu acara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dan karena itulah calon dari FPDIP dikalahkan oleh koalisi FAN dan FPI.

Berkaitan dengan afiliasi politik masyarakat Kelurahan Prenggan, Kotagedhe, ada pertanyaan penting yang perlu diperhatikan, Faktor apakah yang menyebabkan kemenangan PAN di kelurahan Purbayan? Serta Faktor apakah yang menyebabkan kemenangan PAN di Kootagedhe? Apakah karena faktor muhammadiyah ataukah karena faktor Islam atau bahkan karena faktor siapa yang menjadi tokoh suatu partai politik. Mengingat masyarakat Kotagedhe adalah masyarakat yang geneologis dan parternalistik.

Untuk Kelurahan Purbayan, lokasi dimana Partai Amanat Nasional memenangkan pemilihan pada Pemilu tahun 1999, di Kota Gedhe, menurut pengakuan dari ketua ranting PAN kelurahan Prubayan, Bapak Muntahar, lebih banyak ditentukan oleh faktor siapa tokoh-figur yang ada di daerah tersebut yang dapat diterima dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pilihan masyarakat pada partai tidak terlalu ditentukan oleh apa itu program partai. Pilihan masyarakat kelurahan Purbayan pada Partai Amanat Nasional lebih ditentukan karena tokoh (Muhammadiyah) yang selama ini aktif mengerakan pengajian memilih PAN. Sedangkan mengapa tokoh Muhammdiyah memilih PAN juga lebih dikarenakan tokoh seeekaligus mantan ketua Muhammadiyah Amien Rais menjadi Ketua PAN.⁴⁶

Data diatas menunjukkan bahwa kemenangan PAN di kecamatan Kotagede dan khususnya di Kelurahan Purbayan, tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan figur (tokoh) serta simbol (ideologi). Kenyataan ini memperkuat kebenaran teori-teori yang ada selama ini bahwa di negara-negara berkembang pilihan orang pada suatu partai

⁴⁶ Wawancara dengan ketua Ranting PAN Kelurahan Purbsayan Bapak Muntahar bulan September 2001.

politik tidaklah ditentukan oleh apakah program suatu partai politik itu baik atau tidak tetapi lebih ditentukan siapa tokoh partai dan simbol atau ideologi partai tersebut.⁴⁷

Ada perbedaan antara wilayah Kotagedhe dalam arti kultural dan Kotagedhe dalam arti administrasi. Kotagedhe dalam arti kultural adalah Purbayan, Prenggan, dan Jagalan. Padahal sekarang Jagalan sudah masuk wilayah Kecamatan Bangun Tapan, masuk wilayah Kabupaten Bantul. Wilayah yang sekarang yaitu Purbayan, Prenggan dan Rejowinangun, tiga kelurahan ini tidak semuanya termasuk dalam wilayah kultural Kecamatan Kotagedhe. Hal tersebut perlu diklarifikasi dalam membuat analisa agar tidak terjadi kesalahan.

5. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kotagedhe

Perkembangan desa (kelurahan) di kecamatan Kotagede, menurut sensus penduduk tahun 2000, antara tahun 1997 sampai tahun 1999, tidak mengalami perkembangan berarti. Selama tiga tahun tersebut perkembangan tingkat kemajuan desa di wilayah Kotagede yang meliputi Prenggan, Purbayan, dan Rejowinangun, menurut ukuran pihak pemerintah dalam hal ini badan statistika, tetap berada pada posisi Swakarsa Madya.⁴⁸ Kondisi tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat seperti tercermin di Kotagede juga dialami oleh desa-desa lain, pada wilayah Kabupaten Kota Madya Yogyakarta. Hanya ada satu desa yakni desa Gunungketur di wilayah kecamatan Pakualaman yang mampu meningkatkan posisinya dari desa dengan status Swakarsa Madya menjadi desa Swakarsa Lanjut. Malahan ada beberapa desa yang mengalami

⁴⁷ Dr. Indra Samego dalam suatu wawancara di TVRI juga menyatakan persetujuan pada kebenaran teori bahwa di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang pilihan orang pada partai politik bukannya ditentukan oleh program partai politik, tetapi lebih ditentukan oleh simbol baik agama maupun ras serta tokoh (figure) dari suatu partai politik.

⁴⁸ Lihat, Kota Yogyakarta dalam Angka, 1999, BPS, hal 19-20.

penurunan status dari desa Swakarsa Madya menjadi desa dengan status Swakarsa Mula, hal ini dialami oleh desa, yakni desa ngupasan dan Prawirodirjan di Kecamatan Godomanan serta desa Pakuncen di Kecamatan Wirobrajan. Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kotagedhe yang pada umumnya stagnan dan malah sebahagian menurun dapat dibaca sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Nampaknya di Kotagedepun ikut terpengaruh oleh krisis yang terjadi di Indonesia tersebut.

Sementara itu, penggunaan tanah di Kotagede, luas tanah Kotagede adalah 307 Km², tanah seluas itu tidak ada yang kosong. Perincian pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut; untuk perumahan seluas 218.434 m², untuk jasa 8.560 m², untuk perusahaan 16.579 m², untuk industri 10.646 m², untuk pertanian 22.503 m², lain-lain 30.279 m². Dari angka-angka tersebut nampak bahwa pemanfaatan tanah di Kotagede untuk bidang jasa, industri dan perusahaan, memanfaatkan tanah yang cukup luas jika dibandingkan pemanfaatan tanah untuk bidang pertanian.⁴⁹ Pasaar Kotagede sendiri memiliki luas 4.158.00 m², dengan jumlah pedagang yang terdaftar secara resmi 767 pedagang. Untuk industri di Kotagede terdapat 13 buah industri terdiri dari 3 buah industri besar dan 10 industri sedang. Dari 13 industri tersebut 6 buah industri berusaha dibidang kerajinan karet dan 7 buah dibidang perhiasan imitasi.⁵⁰ Sedangkan untuk industri kecil tidak terdaftar secara pasti berapa jumlahnya, tetapi pengamatan dilapangan jumlah industri kecil dikotagede jumlahnya sanat banyak, terutama dari kerajinan perak.

⁴⁹ Yogyakarta dalam angka, 1999, hal 24.

⁵⁰ Yogyakarta dalam angka, 1999, hal 139- 140.

Data kependudukan, jumlah penduduk Kotamadya Yogyakarta dari tahun 1997 ke tahun 1998, mengalami pertambahan yakni dari 478.752 menjadi 483.760. Sedangkan untuk Kotagede, pada tahun 1999 jumlah penduduknya ialah 27.055 terdiri dari 13.576 laki-laki dan 33.479 perempuan. Dari jumlah tersebut penduduk yang berdomisili di Kotagede semuanya adalah Warga Negara Indonesia, tidak tercatat ada warga negara asing atau keturunan China.

Dari jumlah sebanyak 27.055 penduduk yang berdomisili di Kotagede, jika dirinci menurut agama yang dipeluk adalah sebagai berikut; Islam sebanyak 25.737 orang, Katolik 675 orang, Kristen 626 orang, Hindu 14 orang, Budha 3 orang. Sedangkan rincian tempat ibadah adalah msjid sebanyak 34 buah, Mushola 30 buah, gereja 2 buah, Pura dan Wihara tidak ada.

Dari data kependudukan diatas nampak bahwa sebahagian besar penduduk Kotagede adalah menyatakan dirinya sebagai orang Islam, walaupun dalam kenyataannya masih ada penduduk yang tetap mempertahankan adat jawa disamping melakukan perintah ajaran Islam.

Indikator lain yang dapat dijadikan alat bantu untuk menganalisis ialah banyaknya jemaah haji dikaitkan dengan jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan serta umur. Pada tahun 1999-2000, ada 64 orang yang menunaikan ibadah Haji ke mekah. Dari jumlah 64 orang tersebut kebanyakan adalah dari kalangan pedagang yakni sebanyak 26 orang, Pegawai Negeri Sipil 16 orang, Swasta 8 orang, Ibu rumah tangga 12 orang, pelajar 1 orang, Petani tidak ada, BUMN tidak ada. Sedangkan dilihat dari kelompok umur, yang paling banyak menunaikan ibadah haji adalah penduduk yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 21 orang, berikutnya kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 16 orang, dan di urutan ketiga adalah kelompok umur 31-40 tahun sebanyak

12 orang. Sedangkan untuk kelompok umur diatas 70 tahun hanya 2 orang dan kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 6 orang. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa orang yang menunaikan ibadah haji sebahagian terbesar adalah dari kelompok umur usia produktif yakni antara 30 sampai 60 tahun. Yakni sebanyak 49 orang dari 64 orang yang menunaikan ibadah haji. Dan separuh lebih dari penduduk yang memnunaikan ibadah haji adalah dari kalangan pedagang dan swasta, yakni sebanyak 34 orang dari 64 orang.

Dari komposisi penduduk yang menunaikan ibadah haji, sebagai ddikemukakan diatas, dan jika ibadah haji dapat diasumsikan sebagai cermin tingkat kemakmuran dan secara relatif tingkat kesadaran keberislaman seseorang, maka dapat ditarik temuan bahwa, penduduk Kotagede yang sebahagian besar Islam, segmen penduduk yang tingkat keberagamaannya tinggi dalam arti dapat menunaikan rukun Islam secara lengkap adalah dari kalangan Pedagang dan swasta. Data ini juga mengkorfirmasi pernyataan ketua cabang Muhammdiyah Kotagede bahwa di Koagede eyang menjadi inti penggerak dawa'h di Muhammadiyah adalah dari kalangan pedagang, baru kemudian disusul oleh kalangan PNS. Yang juga menarik ialah bahwa yang terbanyak adalah penduduk yang menunaikan ibadah haji adalah dari kalangan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas, yakni berjumlah 26 orang, sedangkan dari kalangan penduduk yang berpendidikan S1 sebanyak 12 orang, dari D3 sebanyak 10 orang, dari S2 sebanyak 4 orang dan dari S3 sebanyak 1 orang. Dari angka ini menunjukkan bahwa di Kotagede penduduk yang memiliki kesadaran agama tinggi serta memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi memadai adalah kebanyakan dari kalangan penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas, yang berarti pula mereka kebanyakan adalah dari penduduk yang berusha di bidang perdagangan.

6. Sisi lain Kondisi Moralitas Masyarakat Kotagede

“Harus diakui –entah benar atau tidak – dimata orang luar Kotagede memiliki citra sebagai kota dengan tingkat religiusitas yang kuat (sebut saja kota santri). Atau sebutan lain, jika kita menyebutkan asal kita Kotagede orang akan langsung mengatakan, “Kotagede yang Muhammadiyahnya kuat, ya”, bahkan ada yang menganalogikan Kotagede dengan Kauman Yogyakarta.

Mungkin itulah yang selalu ada dalam benak orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Kotagede, atau mungkin mengenalnya hanya sekejap mata. Sebuah kota tua yang masyarakatnya hidup dalam religiusitas Islam yang tinggi. Memang kita bis berbangga atas citra tersebut. Namun sungguh ironis, kenyataan yang ada tidaklah seindah sebutan yang disandangnya. Tidak sedikit masyarakat Kotagede yang gemar dengan hal-hal yang tidak Islami. Remang-remang Kotagede memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk menikmati kehidupan malam sepuas-puasnya. Minuman keras tidak asing lagi bagi sebagian warga Kotagede. Perjudianpun masih mewarnai kehidupan masyarakat Kotagede, dalam bentuk apapun dan dalam berbagi acara yang melibatkan banyak orang. Prostitusi masih terus bersemi walaupun tidak seterbuka dulu, namun perbuatan maksiat tersebut tetap marak. Perselingkuhan dan seks pra nikah pun selalu menjadi perbincangan umum sepanjang waktu. Semua jenis kemaksiatan itu sudah berlangsung sejak sulu dan akan terus berlangsung, meski mengalami perubahan bentuk, kualitas, kuantitas, mapun frekuensinya”.⁵¹

Kutipan kalimat di atas adalah berasal dari pengantar redaksi laporan utama buletin Brosur, dengan judul “Wajah Klasik Kotagede”. Nuansa pengantar dari redaksi itu nampak sekali nada adanya gugatan terhadap kondisi moralitas sebahagian masyarakat Kotagede yang menyimpang dari ajaran Islam. Gugatan moral yang disampaikan melalui buletin Brosur, yang terbit setiap hari idul Fitri tersebut dapat dibaca bahwa di Kotagede sebagaimana daerah-daerah lain, masyarakatnya tidaklah

⁵¹ Buletin Brosur Lebaran no.39/1421 H/2000M, hal 10. Buletin Brosur Lebaran ini adalah merupakan bagaian dari program Angkatan Muda Muhamadiyah Kotagede, yang dikelola oleh kader-kader muda Muhammadiyah Kotagede. Buletin Brosur ini sudah berusia lama yakni terbit seejak tahun 1961, Dalam Brosur tersebut berisi antara lain Laporan utama yang untuk tiap edisi berisi tema yang berbeda0beda seusai dengan perkembangan yang ada, mozaik pendapat, Liputan khusus, suplemen, sosok, lembar budaya, agenda Muhammadiyah, naskh kotbah Idul Fitri, serta rubrik “dari untuk” met lebaran idul fitri mohom maaf lahir batin, yang diisi oleh warga Kotagede. Yang jumlahnya untuk lebaran idul fitri1421 H mencapai 3264 orang yang ikut terdaftar memberikan ucapan dalam brosur tersebut.

seindah citra yang disandanginya sebagai kota santri. Berarti pula sampai akahir abad ke-20 masih terjadi kompetisi dan persaingan antara subkultur santri dan subkultur abangan di Kotagede. Namun disisi lain hal tersebut juga dapat dibaca bahwa didalam masyarakat Kotagede, untuk setiap samannya selalu muncul generasi (baca generasi muda) yang memiliki perhatian untuk pencerahan dan pembaharuan masyarakat, serta berusaha menjaga agar masyarakat tetap dalam naungan ajaran Islam.

Menanggapi perubahan budaya yang terjadi Kotagede, yang seolah-olah ada kesan merusak citra Kotagede sebagai Kota dengan masyarakat yang kuat religiusitasnya, tokoh masyarakat Kotagede memberikan pendapat yang beragam. Misalnya H. Bashori Anwar, memiliki pandangan bahwa berdasarkan pengamatannya, Kotagede sudah banyak perubahan dalam pandangan hidup dan moralitas semenjak gerakan Muhammadiyah tumbuh dan berkembang di kota ini. Kotagede dulunya boleh dibilang gudangnya maksiat. Prostitusi, ciu, dan judi begitu mudah ditemui di pojok-pojok kota. Orang tanpa malu lagi terlihat keluar masuk lokalisasi-lokalisasi yang tersebar kurang lebih 18 tempat di penjuru Kotagede. Ditambahkannya dulu ketika ada orang menanggapi gamelan, masih harus dilengkapi dengan 3 syarat, yang bisa menjadikan pertunjukan itu lengkap, yaitu *gamelan, ledhek dan ciu*. Namun sekarang, jarang terlihat lagi walaupun ada, pastilah lebih tertutup krena malu pada orang lain.⁵²

Sementara itu dari sebahagian kalangan angkatan muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede (AMM) sebagaimana tercermin dari bultin Brosur Lebaran, menggugat dan mengkritik keras adanya fenomena budaya serba boleh. Kriktik tersebut kini (sewaktu peneliti) mengadakan observasi lapangan, protes tersebut

⁵² Wawancara H.Bashori Anwar, dimuat di Bultin Brosur Lebaran, 1421 H. hal 15-16.

telah menjadi semacam gerakan moral, misalnya dengan berdirinya (FSRMY) Forum Sillahturohim Remaja Masjid Yogyakarta. Melalui FSRMY ini generasi muda Islam, yang tidak setuju dengan berbagai tindak kemaksiatan telah melakukan langkah-langkah cukup radikal, misalnya dengan memasang sepanduk dipertigaan jalan, serta telah menangkap dan mengadili anggota masyarakat yang sering membuat keseresahan (mencuri montor, sepeda dll). Peristiwa tersebut hampir menjadi perkelahian masa dikarenakan, orang yang ditangkap itu ternyata adalah seorang preman yang juga memiliki jaringan cukup luas, sehingga hampir terjadi bentrok antara pemuda Kelurahan Purbayan dengan geng pemuda yang diadili oleh pemuda Islam dari FSRMY.⁵³

Pandangan yang nampaknya lebih netral, menanggapi budaya serba boleh, yang belakangan muncul di Kotagede, dikemukakan oleh Drs. Charis Zubair, menurutnya, perubahan masyarakat Kotagede yang sudah terjadi dan akan selalu terjadi, dimana Kotagede merupakan sebuah tempat berdirinya kerajaan Mataram yang menganut ajaran Islam sekaligus didasari nilai-nilai Jawa. Ia menegaskan bahwa perilaku yang terjadi di masyarakat Kotagede sebetulnya perubahan yang sesuai pada zamannya. Dan perubahan tersebut merupakan dinamika yang tidak terelakan.⁵⁴

Dari pemaparan di atas, yang mencoba mencermati sisi lain kondisi moralitas masyarakat Kotagede, dapat ditarik beberapa pemahaman, yaitu bahwa di Kotagede, sampai sekarang (permualan abad ke-21) saat penelitian ini dilakukan masih terus t terjadi proses perubahan budaya (transformasi kebudayaan), berbagai macam jenis

⁵³ Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber dan wawancara dengan salah seorang pengurus FSRMY, di Kelurahan Purbayan, bulan September 2001.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Charis Zubair bulan September 2001, di rumah Beliau, kampung Boharen, Kotagede.

budaya bersaing untuk mencari dukungan di masyarakat. Dalam persaingan tersebut nampaknya kekuatan dari subkultur Islam, yang antara lain diwakili oleh generasi mudanya yang tergabung di dalam AMM, FSRMY, telah dan sedang berusaha untuk memenangkan persaingan tersebut.

Kesimpulan

Transformasi kebudayaan yang terjadi pada perkembangan terakhir di Kotagede, khususnya dari sub kultur santri modernis menunjukkan adanya perubahan format ketika harus berhadapan dengan subkultur abangan dan tradisional. Subkultur santri modernis kini tidak sepenuhnya menunjukkan kemandirian atau sikap oposan pada pemerintah, hal ini dikarenakan setelah era reformasi telah terjadi perubahan struktur politik secara mendasar, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Pada tingkat nasional setelah era reformasi, simbol-simbol yang mencerminkan aspirasi ummat Islam diizinkan untuk muncul, bahkan elit Islam dari kalangan Muhammadiyah, Prof.Dr. Amien Rais, kini telah memasuki elit kekuasaan politik, dengan memegang posisi sebagai ketua MPR RI. Demikian juga di tingkat lokal seorang kader Muhammadiyah dari PAN dan PPP, telah berhasil menduduki kursi Wali Kota Yogyakarta, (Heri Zuhdianto dan Sukri Fadholi) untuk pertama kalinya dalam sejarah Kota Yogyakarta ada kader Muhammadiyah dapat memegang posisi top leader di Kota Madya Yogyakarta. Kemudian diteruskan oleh Wali Kota Berikutnya Harry Suyuti(2011-2016) juga dari lingkungan keluarga besar Muhammadiyah.

Transformasi kebudayaan yang terjadi di Kotagede, khususnya yang diilhami dan digerakan oleh subkultur Islam Modernis, mulai nampak gejala untuk tidak sepenuhnya memakai standar nilai yang diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah, mulai

muncul model dawah dengan menggunakan simbol-simbol serta tradisi yang di masyarakat Kotagede. Di masyarakat Kotagede telah muncul adanya pembangkangan budaya terselubung, sebagaimana tercermin dalam istilah MUJA, yaitu Muhammadiyah Jawa, serta munculnya budaya serba boleh. Munculnya fenomena semacam MUJA, dan budaya serba boleh jika dilihat sebagai proses da'wah (proses perubahan budaya) yang belum selesai, ini berarti suatu bentuk modifikasi dari gerakan da'wah Muhammadiyah, belum tentu suatu kekalahan bagi subkultur santri modernis dalam perubahan budaya yang terjadi. Akan tetapi jika dilihat dari sisi kuatnya pengaruh budaya yang datang dari luar masyarakat Kotagede ataupun tradisi warisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini dapat dibaca sebagai salah satu bentuk penetrasi budaya luar ke dalam subkultur Islam Modernis.

Dinamika Politik Kasus Pilkada Kota Yogyakarta

Pendahuluan

Kekuasaan merupakan sesuatu yang mempunyai daya tarik tinggi, sehingga tak aneh apabila selalu menjadi perhatian utama para elit baik politisi maupun non-politisi. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut tidak sedikit orang yang rela mengorbankan harta benda dan bahkan kehormatannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang telah mendapatkan kekuasaan enggan untuk melepaskannya dan tak jarang akan mempertahankannya dengan segala upaya, bahkan dengan segala cara, baik dari kekuasaan tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal (kepala daerah, maupun kepala desa).

Dalam konteks sejarah Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami perubahan yang evolusioner. Ada tiga perubahan yang terjadi dalam sistem pemilihan kepala daerah. *Pertama*, masa feodal, dimana penguasa lokal ditentukan dengan sistem dinasti secara turun temurun. *Kedua*, masa orde baru, di masa ini penentuan kepala daerah secara formal ditentukan oleh DPRD. Tetapi pada

kenyataannya sistem ini lebih bersifat *bureaucratic government*, yakni sebuah pemerintahan yang hanya dimiliki dan dikendalikan oleh birokrat dan tentara. Sistem ini dilandasi oleh UU No. 5 Tahun 1974 yang salah satunya memberi batasan bahwa calon kepala daerah haruslah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang setara eselon II, sehingga yang bisa menjadi kepala daerah hanya birokrat atau tentara berpangkat Letkol.

Ketiga, masa reformasi yang merupakan masa kebangkitan demokrasi dan desentralisasi. Masa ini juga merupakan masa bergesernya kekuasaan dari pusat ke daerah, dari *bureaucratic government* menjadi *party government*, dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, dan dari *floating mass* menjadi *mass society* (Sutoro Eko, 2004). Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 diharapkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, terutama bagi pemerintahan daerah. Dikeluarkannya undang-undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPRD, termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi dalam praktiknya, pilkada selama era reformasi meninggalkan sejumlah masalah yang menimbulkan *distrust* dan kekecewaan masyarakat.

Banyak realita dan berbagai kasus yang terjadi selama ini yang menunjukkan bahwa pembelajaran politik dan demokratisasi kepada masyarakat tidak pernah diberikan oleh para elite karena modelnya yang oligarkhis. Berbagai kasus pilkada dan pilgub menunjukkan bahwa arena itu hanya merupakan kepentingan politik dan konflik para elite, baik dalam bentuk *common interest* maupun *like interest*. Misalnya, politik kepentingan di balik pilkada menyebabkan kandidat calon dan tim suksesnya, melalui dukungan penyandang dana (elit pengusaha), menyalurkan sejumlah dana kepada anggota dewan dan para pejabat agar bisa menang dalam pilkada tersebut (Lihat Moch Nurhasim (ed). 2005). Dan masih banyak kasus-kasus lain yang kesemuanya hanya untuk kepentingan para elite, baik berebut kekuasaan, untuk mengamankan posisinya, maupun mengamankan usaha bisnisnya. Hal itulah yang menyebabkan lambatnya perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, terutama pada aras lokal.

Di tengah-tengah *distrust* dan kekecewaan masyarakat terhadap proses pilkada, muncul gagasan pilkada secara langsung. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan merevisi

UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang antara lain berisi tentang pengaturan pilkada secara langsung.

Harapannya bahwa pilkada langsung merupakan alternatif untuk menjawab permasalahan yang timbul dan jeleknya proses (*electoral process*) maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat DPRD. Pilkada langsung menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada masa lalu dan berpotensi menegakan demokratisasi di daerah baik pada lingkungan pemerintahan maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*). Pilkada langsung juga berpotensi untuk menumbuhkan demokrasi di kalangan internal partai politik di daerah lewat mekanisme konvensi, musyawarah, atau muktamar partai yang menghargai kedaulatan anggota (Djohermansyah Djohan, 2004). Pilkada langsung juga merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi suatu wilayah sekaligus sebagai cara pendidikan politik bagi rakyat ([http:// www.suamerdeka.com /harian / 0504/21/kot13.htm](http://www.suamerdeka.com/harian/0504/21/kot13.htm)).

Namun, problem lain yang cukup mendasar adalah belum melembaganya demokrasi sosial dalam masyarakat. Karena itu diperlukan upaya pemberdayaan untuk mendewasakan masyarakat melalui berbagai pendidikan politik (Aminudin dan A. Zaini Bisri, 2006). Apalagi adanya prediksi bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkadal 2006 akan turun (Republika, 9 Januari 2006) yang juga akan menghambat proses demokratisasi. Oleh karena itu pilkada langsung tersebut harus memiliki karakteristik yang berbeda dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Parameter terpentingnya antara lain yaitu harus dilaksanakan secara demokratis dan tidak hanya sekedar perayaan demokrasi prosedural-elektoral, melainkan juga untuk menuju pendidikan demokrasi yang substansial.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kesadaran demokratisasi elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta?

2. Kondisi dominan apa saja yang menghambat demokratisasi elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana proses demokratisasi elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana arah demokratisasi elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta?

Kerangka Konseptual

Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal

Ketika transisi menuju demokrasi dimulai, menyusul bangkrutnya Orde Baru, semangat desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Undang-undang lama dihapuskan dan kemudian digantikan oleh UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004, yang lebih “konkret” dan sedikit-banyak mempunyai semangat desentralisasi dan demokrasi lokal. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi penghidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional (Sutoro Eko, 2003).

Semangat yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakekatnya untuk mengoptimalkan demokratisasi di daerah, disamping sebagai perwujudan otonomi daerah seluas-luasnya. Tujuan Pilkada langsung adalah agar rakyat di daerah dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Oleh karena itu, Pilkada secara langsung adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya partisipasi masyarakat dan pengakuan perbedaan, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut harus diselesaikan secara damai.

Penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung merupakan bagian dari pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah, KPUD dan aktor-

aktor dalam masyarakat harus berupaya agar kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya berdemokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik yang mengotori demokrasi lokal. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung juga merupakan mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atas mandeknya pembangunan demokrasi di tingkat lokal (Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006).

Menurut Sutoro Eko (2004), bahwa ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokrasi secara langsung. *Pertama*, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, karena melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas. Partisipasi akan membuka voice, akses, dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. *Kedua*, proses partisipatif memungkinkan adanya kontrak sosial antara kandidat, partai politik, dan konstituen. Kontrak sosial adalah sebuah proses yang mempertemukan antara visi misi kandidat dan mandat dari konstituen melalui mediasi partai politik. *Ketiga*, pilkada langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi konstituen untuk menentukan calon pemimpin yang lebih baik dan *legitimate*.

Pilkada langsung merupakan arena masyarakat politik, tempat bagi masyarakat untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara. Sehingga, bagaimanapun pilkada secara langsung merupakan proses pemilihan dengan model yang lebih demokratis dibanding dengan model feodal, model birokrasi, maupun model oligarkhis.

Harapan-harapan ideal tersebut dapat terwujud bila ditopang beberapa hal. *Pertama*, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. *Kedua*, adanya budaya politik demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif. *Ketiga*, masa pemilih yang terdidik, *well-informed* dan rasional-kritis. *Keempat*, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen (Sutoro Eko, 2004). Untuk itu, maka peranan para elit lokal (baik elit politik maupun elit non-politik) sangat penting sebagai mediasi atau menjembatani terwujudnya pilkada langsung yang demokratis.

1. Elit Lokal dan Demokratisasi

Arti kata demokrasi berasal dari Yunani yang berarti “*rule by the people*”. Istilah ini pertama kali digunakan sekitar abad ke lima sebelum Masehi, oleh Herodotus yang merupakan kombinasi dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan. Arti demokrasi pada waktu itu adalah demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung dan bersama-sama lewat suatu pertemuan menentukan keputusan-keputusan politik yang mendasar (Held, 1987 dalam Kutut Suwondo. 2005). Kemudian dengan semakin berkembangnya dan kompleksnya permasalahan negara maka demokrasi menjadi tidak langsung tapi berkembang menjadi demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Di mana adanya beberapa orang yang dipilih melalui mekanisme tertentu sebagai perwakilan dari rakyat. Dengan adanya perwakilan tersebut berarti rakyat harus mengakui adanya legitimasi elitisme politik dan sekaligus sebagai institusi elite dalam berpolitik.

Asumsinya bahwa elit politik sebagai perwakilan dari rakyat sudah seharusnya merupakan orang-orang yang mempunyai potensi dan kemampuan lebih dibandingkan dengan yang diwakili (rakyat), termasuk juga bagaimana dalam berdemokrasi. Sebagai orang yang mempunyai kemampuan dan potensi yang lebih dibanding rakyat, maka elite politik harus bisa memberikan teladan kepada rakyat bagaimana berdemokrasi yang baik. Elite politik juga harus bisa memberikan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Di samping elit politik sebagai aktor yang mempengaruhi proses demokrasi, juga ada elit non politik yang juga mempunyai akses atau bisa mempengaruhi masyarakat.

Teori tentang elit memandang setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori, yakni sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran

kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Seperti Mosca dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), dan massa umum (*non-elite*). (Lihat S.P. Varma, 1987; Maurice Duverger, 1982).

Atas dasar teori elit tersebut, maka dalam penelitian ini membagi dua kategori elit dalam konteks lokal, yaitu sebagai berikut.

Elit politik lokal, yaitu seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif, yang dipilih melalui pemilu yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik, seperti bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.

Elit non-politik lokal, yaitu seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam masyarakat, seperti elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan sebagainya. (Moch Nurhasim (ed.), 2005)

Demokratisasi (sebagai upaya pembelajaran dan mewujudkan masyarakat yang demokratis) yang dilakukan para elit lokal dapat dipahami dari berbagai dimensi. *Pertama*, kesadaran para elit lokal terhadap demokratisasi. Apabila elit lokal tidak menyadari pentingnya demokratisasi dan bahkan tidak memahami demokratisasi maka tentunya mereka tidak akan melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kehidupan politik (pilkada) yang demokratis.

Kedua, fenomena yang menghambat demokratisasi. Fenomena ini merupakan kondisi kultural dan struktural yang dapat mendorong dan menghambat proses demokratisasi elit lokal. Kondisi kultural yang menjadi penghambat demokratisasi, yakni kekuasaan patrimonial, kekuasaan yang berjenjang, interaksi patronage, dan sakralisasi kekuasaan. (1) kekuasaan yang bersifat patrimonialistik adalah suatu kekuasaan yang bersifat tunggal, utuh atau tidak terpecah-pecah dan bersifat personal (Anderson. 1972. dalam Kutut Suwondo. 2005). Misalnya kekuasaan jamannya Soeharto yang terasa sangat tunggal dan personal, proses kuningisasi menjelang pemilu

1997, dan juga pemberian monopoli tertentu kepada pengusaha tertentu oleh penguasa. (2) kekuasaan yang berjenjang (hirarki) merupakan paham kekuasaan yang khas Jawa yang tidak hanya mendominasi kelas bawah dari kelompok budaya sendiri tetapi juga terhadap budaya lain, yang pada akhirnya akan dipinggirkan. (3) interaksi patronage merupakan hubungan patron-client, yakni hubungan antar individu yang bersifat reciprocal atau timbal balik dengan menukarkan sumber daya (*exchange of resources*) yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Scott, 1993). (4) sakralisasi kekuasaan yakni upaya mensakralkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang kemudian juga dianut oleh masyarakat. Keempat budaya tersebut sangat menghambat proses demokratisasi pada aras lokal. Menurut Kutut Suwondo (2005), bahwa empat hal tersebut juga dipakai oleh elit politik untuk mempertahankan dan merebut kekuasaannya sambil seolah-olah menginginkan pengembangan *civil society* (demokratisasi).

Adapun hambatan struktural ini diantaranya aturan atau kebijakan yang kurang jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, kepentingan politik dan konflik para elite, dan campur tangan kewenangan dari pusat ke lokal. Hambatan struktural tersebut sering kali terjadi dalam proses demokratisasi pada aras lokal. Misalnya, konteks keluaaarnya UU No. 32 Tahun 2004 dalam waktu yang tidak tepat, prosesnya terlalu singkat sehingga mengabaikan partisipasi rakyat. Selain itu, beberapa pasal diantaranya bertentangan dengan UU lain yang terbit mendahuluinya (Flamma, 2005).

Ketiga, proses demokratisasi yang dilakukan oleh elit lokal, termasuk di dalamnya adalah media dan pola yang dilakukan para elit dalam mewujudkan demokratisasi pilkada secara langsung. *Keempat*, arah demokratisasi yang dilakukan oleh para elit lokal. Arah suatu demokratisasi bisa menuju demokrasi yang lebih baik, tetapi juga bisa terjadi pembusukan demokrasi (Sorensen, 2003) atau defisit demokratisasi (John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Törnquist, 2004)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami dan memperoleh gambaran tentang kesadaran demokratisasi yang dimiliki elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kondisi atau fenomena yang menghambat demokratisasi elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta.

3. Memahami dan memperoleh gambaran tentang proses demokratisasi yang dilakukan elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta.
4. Mengetahui arah demokratisasi yang dilakukan elit lokal pada Pilkada langsung 2006 di Kota Yogyakarta.

Penutup

Pada bagian akhir dari tulisan tentang 'Politik lokal' kiranya perlu penulis sampaikan catatan penutup, semacam review dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Dari pemaparan sebagaimana telah penulis kemukakan dapat diambil beberapa pemahaman sebagai berikut;

Pertama, kajian dan pembahasan tentang politik lokal di Indonesia memiliki urgensi yang tidak terbantahkan dalam memahami kehidupan politik di Indonesia. Kajian tentang politik lokal sangat diperlukan untuk bisa memahami bekerjanya sistyem politik di Indonesia.

Kedua, kajian tentang politik lokal di Indonesia mendapatkan momentum pentingnya ketika negeri ini mengalami peristiwa reformasi politik tahun 1998. Reformasi politik yang ditandai dengan runtuhnya Rezim Orde Baru, sering kali juga dimaknai oleh masyarakat lokal sebagai bagnkitnya kekuatan dan otonomi masyarakat politik di tingkat lokal.

Ketiga, kajian tentang politik lokal dalam beberapa aspek memiliki keterkaitan yang erat dengan momentum otonomi daerah. Momentum era otonomi daerah memberikan kontribusi pada menguatkan dinamika politik lokal di Indonesia. Hal tersebut antara lain dikarenakan melalui otonomi daerah terjadi proses desentralisasi otoritas dan desentralisasi anggaran, serta peluang untuk terjadinya teritorial reform.

Keempat, dinamika otonomi daerah di Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua, memiliki karakter yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, khusus dinamika politik lokal di Aceh sangat di pengaruhi oleh kehadiran partai politik lokal, dimana partai lokal ini tidak dijumpai pada daerah lain yang tidak mendaaptkan status sebagai daerah istimewa.

Kelima, adalah menarik untuk mencermati relasi antara pusat dan daerah dalam perspektif unitaris dan melihat implementasinya dalam realitas politik di Indonesia yang dalam beberapa hal mengambil prinsip-prinsip demokrasi liberal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pengembangan bahan ajar berupa modul Nilai-nilai Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dihasilkan melalui empat tahap yaitu tahap define, design, development dan deseminasi.
2. Modul Nilai-nilai Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal setelah diujicobakan secara terbatas pada mahasiswa semester 5 Pendidikan IPS dan dapat mencapai tujuan kompetensi dengan beberapa perbaikan.

B. Saran

1. Penelitian pengembangan bahan ajar perlu diperluas dan digalakan untuk menghasilkan mutu bahan ajar yang lebih berkualitas
2. Penelitian pengembangan sebagaimana peneliti laksanakan perlu mendapat judgment yang lebih kompeten.

Daftar Pustaka

- Bungaran Antonius S. (2011). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Penerbit Buku Obor, Jakarta.
- Chamamah Soeratno et. al. (ed) (2004). *Keraton Yogyakarta: the history and cultural heritage (2nd print)*. Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations.
- Fadel Muhammad (2008). *Reinventing Local Government*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- G. Moedjanto (1994), *Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen, Antara 1755-1992*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan Wiradi (2001) *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Laperia, Penerbit Larea Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2009), Editor, *Politik lokal di Indonesia*, Penerbit Buku Obor dan KTTLV, Jakarta.
- Jurnal Ilmu Politik, Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas, Vol.7,No.2, 2010
- Jurnal Ilmu Politik, Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah Evaluasi dan Prospek, penerbit AIPI dan Pustaka Pelajar, Edisi 21 tahun 2010.
- Kacung Marijan, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- KPH Notoyudo (1975) *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta*.
- Maria S.W Sumardjono (2008) *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Monograph Keistimewaan Yogyakarta, PLOOD, JIP UGM, Vo. 2 No. 1 . 2008
- Muhammad Yamin, *Pidato pengukuhan Guru Besar*, Kampus Universitas Sumatera Utara, 2 September 2006.
- Purwo Santoso (2010), *Sinergi Pengembangan Ilmu Pemerintahan dengan Pembaharuan Tata Pemerintahan Lokal*, Polgov, Vol.4, No.1 UGM Yogyakarta.
- P.J. Suwarno (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prisma, Vol 29. Juli 2010, Otonomi Daerah untuk Siapa?

- S. Margana (2004). *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation.
- Sujanto (1988) *Daerah istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pen. PT Bina Aksara, Jakarta.
- 100 tahun Nusantara*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006
- Widya P. Setyanto, *Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah, Dinamika Politik lokal di Indonesia*, Percik, Salatiga, 2011.
- Wawancara dengan Prof. Suyitno (Dosen Fakultas Hukum, UGM), Bulan Juli 2008 di Kantor Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

a. Anggaran Biaya

No	Uraian Pembiayaan	Vol	Harga satuan	Harga total
1	Alat Bahan			
	ATK penelitian			
	1) Kertas	6	Rp. 50.000	Rp. 300.000
	2) Cartridge	2	Rp. 300.000	Rp. 600.000
	Jumlah			Rp. 900.000
2	Pengembangan Instrumen			
	a) Penyusunan instrument	4	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
	b) Penggandaan	200	Rp. 5.000	Rp. 1.000.000
	c) FGD	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Jumlah			Rp. 4.000.000
3	Analisis Data			
	a) Persiapan	5	Rp. 100.000	Rp. 500.000
	b) Pelaksanaan	5	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
	Jumlah			Rp. 1.400.000
4	Akomodasi Penelitian	5	Rp. 100.000	Rp. 500.000
	Perizinan	1	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	Transportasi	2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
	Jumlah			Rp. 1.900.000
5	Pelaporan			
	a) Penyusunan	2	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000
	b) Penggandaan	10	Rp. 25.000	Rp. 250.000
	c) Publikasi			Rp. 450.000
	Jumlah			Rp. 1.800.000
	Total Pengeluaran			Rp. 10.000.000

b. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian																											
	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Proposal		■	■	■																								
Persiapan Penelitian					■	■																						
Pengambilan Data									■	■	■	■																
Pengolahan Data													■	■														
Penyusunan Laporan																	■	■	■	■								
Seminar hasil																									■	■	■	■